



TASAWUF BIROKRASI



TASAWUF BIROKRASI



TASAWUF BIROKRASI

Copyright @2020

PENULIS

Prof. Dr. Phil. H. M Nur Kholis Setiawan

PENYELARAS

M. Arif Efendi, S.Sos.,I,MA

Benny Andrios

DESAIN

Mega Halimah, S.Ds

Cetakan Pertama, 2020



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan banyak karunia, termasuk kesehatan dan kesempatan kepada penulis untuk bisa menuangkan pengalaman sebagai birokrat di Kementerian Agama, hingga menjadi buku.

Ketika menjabat sebagai Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama, Juli 2013-Juli 2017, al-hamdulillah juga telah terbit buku yang penulis beri judul: *Menata Yang Terserak; Akademisi di Pusaran Birokrasi*.

Seiring berjalannya waktu, sejak Agustus 2017 sampai akhir September 2018 penulis mengemban amanah sebagai Inspektur Jenderal Kemenag, dan sejak awal Oktober 2018 diamanahi menjadi Sekretaris Jenderal. Dua posisi ini memiliki fungsi yang berdekatan, sebagai pengawas dan pembantu pemimpin [menurut Perpres nomor 7/2015 yang diperbarui dengan Perpres 68/2019].

Kementerian Agama, sejak 2017 sedang giat mendengungkan Reformasi Birokrasi [RB] dengan segala aspeknya. Tim-tim *ad hoc* dibentuk untuk mengawal pelaksanaan program tersebut baik di pusat maupun di daerah.

Sebagai orang yang ikut memimpin pelaksanaan RB, penulis merasa perlu ada sentuhan dan pendekatan baru

dalam mengakselerasi pelaksanaannya di Kementerian Agama, yakni dengan pendekatan tasawuf/sufistik.

Menurut penulis, pendekatan sufistik diperlukan untuk memberi nilai tambah dalam pelaksanaan RB yang memiliki kemuliaan dari sisi filosofis sekaligus sisi manfaat untuk masyarakat. Kebijakan pemerintah terkait RB sangat selaras dengan kaidah fikih, “kebijakan pemerintah atas rakyat selayaknya didasarkan atas kemanfaatan [*taṣarrāfu l-imām ‘alā l-ra‘iyyah manūṭun bi l-maṣlahah*].

Buku yang ada di hadapan pembaca ini, penulis beri judul ***Tasawuf Birokrasi*** yang merupakan kumpulan materi pembinaan di berbagai tempat dan acara di lingkungan Kemenag selama saya diamanahi sebagai Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal. Karena merupakan kumpulan materi hasil transkripsi dari materi-materi lisan dan spontan, tentu tulisan yang tersaji tidak sistematis seperti layaknya buku hasil riset ilmiah.

Untuk membantu menghubungkan pikiran-pikiran sufistik dalam tulisan yang beragam, penulis kelompokkan berdasarkan kedekatan tema agar lebih mudah difahami. Mudah-mudahan pembaca tidak memiliki kesulitan berarti dalam mengikuti keterkaitan tulisan satu sama lain. Disamping itu, penulis juga lampirkan foto pendukung sebagai jejak digital acara-acara yang menjadi inspirator lahirnya tulisan-tulisan tersebut.

Bagi pembaca yang tertarik untuk mendalami lebih rujukan-rujukan kitab kuning yang saya pakai, dipersilahkan membaca kitab aslinya, karena insya Allah yang saya tuliskan

dalam buku ini, benar-benar termaktub dalam kitab-kitab kuning yang saya sebutkan.

Terima kasih tak terhingga kepada pimpinan penulis, Menteri Agama Kabinet Kerja, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, serta Menteri dan Wakil Menteri Agama Kabinet Indonesia Maju, Bapak Fachrul Razi dan Bapak Zainut Tauhid Sa'adi yang telah mengizinkan penulis mengisi undangan acara di berbagai satuan kerja, baik pusat maupun daerah.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan satuan kerja, para Pimpinan eselon I pusat, KaKanwil, Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan, Balai Litbang dan Diklat Keagamaan, UPT Asrama Haji yang pernah mengundang saya dalam acara yang digelar. Mudah-mudahan gelaran acara menjadi salah satu wasilah amal jariyah, karena menginspirasi tulisan-tulisan dalam buku ini.

Terima kasih juga kepada M. Arief Efendi dan Benny Andrios yang memprovokasi terbitnya buku ini. Selanjutnya terimakasih kepada tim Humas Biro HDI yang menuliskan pemberitaan acara-acara yang saya hadiri di laman Kemenag, baik pas tugas langsung maupun berkolaborasi dengan Humas Kanwil, juga selalu meminta kepada Humas Kanwil untuk merekam sambutan-sambutan saya. Rekaman tersebut oleh mereka berdua ditranskrip dan disusun awal sebagai bahan-bahan materi penulisan buku ini.

Sebagai orang yang dilahirkan, dibesarkan dan dididik dalam tradisi pesantren, penulis terinspirasi para ulama saleh yang menyarankan bahwa menulis merupakan sesuatu yang

mulia. Oleh karena itu terbitnya kumpulan tulisan ini, mudah-mudahan menjadi wasilah kemuliaan bagi penulis dan semua pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini.

Penulis juga menyadari, buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya, penulis membuka ruang bagi seluruh pembaca untuk memberikan fikiran-fikiran yang konstruktif dalam penulisan buku-buku selanjutnya. Akhir kalam, semoga kita semua dalam kebaikan.

Aamiin Ya Rabbal-Alamin.

Villa Bintaro Regency awal April 2020

“

Birokrasi sejatinya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima dengan prinsip transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	viii
Bab I Tasawuf Birokrasi	1
Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Tasawuf	1
Enam Unsur Pimpinan	9
Delapan Arah Perubahan Kementerian Agama 2020-2024	14
Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi	23
Bersih Melayani dalam Kajian Tasawuf	33
KMA 580/2019 dan Ikhtiar Kemenag	37
SKB Penanganan Radikalisme ASN	41
Jalankan yang dibolehkan, Hakekatnya Tinggalkan yang diharamkan	46
Strategi Optimalisasi Serapan Anggaran	50
Bab II Lecut Kinerja ASN	53
Memaknai Blangkon	53
Empat Cacat Manusia	57
Duta Akrual Kemenag, Ciptakan Inovasi Hadirkan Solusi	69
Pranata Humas dan Hoax Kaum Ansor	73
Bimwin dan Tantangan Kekinian	78
TIK Kemenag : Rumah Kreatif Sebarkan Informasi	81
Bab III Dirasah Islamiyah	85
UU Pesantren, Kado Spesial Kemenag	85
Pesan Perdamaian di Puncak Hari Santri 2019	91

DAFTAR ISI

Afirmasi dan Inovasi Anggaran Madrasah 2020	96
Lima Mapel Keislaman di Madrasah	101
Moderasi Beragama : Peran PTAI	106
Dengungkan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Kristen.....	114
Nasihat Sufi dalam Pendidikan untuk Kehidupan	119
Menjaga Kitab Suci	124
Bersikap Proporsional dan Wajar Apa Adanya	127
Bab IV Agama sebagai Perekat Bangsa	133
Manifestasi Syukur	133
Agama Adalah Spritualitas Bukan Sekadar Syariat	138
Tokoh Agama dan Konflik Sosial	143
Menebar Cinta Kepada Sesama	147
Ormas Islam Perekat Bangsa	151
Situasional Dalam Dakwah Islam	156
Bab V Haji dari Sisi Tasawuf	163
Konsultan Ibadah Haji Perempuan Ditambah	163
Media Center Haji (MCH) dan Antisipasi Hoax	167
Petugas Haji, Ibadah Tertinggi ala Sufistik	171
Pendukung dan Pencela	176
Dedikasi Petugas Haji di Tanah Suci	182
Ladang Ibadah di Terminal Syib Amir	187
Sekilas Tentang Penulis	193

“

Jabatan sebagai amanah akan ditunaikan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai bagian dari lahan untuk beribadah. Sebaliknya ketika dimutasi atau-pun lainnya, juga akan lapang dada dan tetap nyaman mensikapinya, bukan menganggapnya sebagai akhir dari perjalanan hidup maupun karirnya.





BAB I

Tasawuf Birokrasi

Reformasi Birokrasi Dalam Perspektif Tasawuf

Birokrasi di mata khalayak kadang sering disematkan sebagai mata rantai yang memperlambat layanan, menjemukan, mandek dan istilah miring lainnya sehingga memunculkan lahirnya program pemerintah yang kemudian lebih dikenal dengan istilah Reformasi Birokrasi.

Birokrasi sejatinya harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima dengan prinsip transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya untuk

mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur agar menjadi aparatur negara yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan, sehingga dapat terwujud tatakelola pemerintahan yang baik.

Kementerian Agama memulai proses Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama.

Kemudian tahun 2010 reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama telah dilaksanakan dengan ditetapkannya *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama 2010-2014.

Peta jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama 2010-2014 telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Reformasi Birokrasi Kementerian Agama dilaksanakan untuk menjawab tuntutan terhadap delapan area perubahan yaitu penataan organisasi, perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja yang terwadahi dalam komitmen pimpinan, organisasi yang sesuai ukuran, *right sizing*, penataan tata laksana (*bussiness process*), peraturan perundang-undangan, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya kriteria keberhasilan terhadap delapan area perubahan reformasi birokrasi tersebut ditunjukkan dengan hasil capaian pada tingkat kepuasan masyarakat atau pengguna

layanan, peningkatan profesionalisme SDM Aparatur serta sampai sejauh mana pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Agama.

Sebenarnya ada benang merah yang sangat jelas antara nilai-nilai Reformasi Birokrasi dengan dunia tasawuf. Misalnya tatkala seseorang yang diamanahi jabatan dengan tradisi tarekat.

Dalam *al-Mafakhir al-Aliyah fi l-Ma'atsir al-Syadziliyah*, Abu Hasan al-Syadzili menyatakan sebagai berikut:

لما كان كل من انتسب الى شيخ من مشايخ الطريقة واعلام
الحقيقة ينبغي له ان يعرف مبنى طريقة شيخه ويعرف اذكار شيخه
واوراده... وسلسلته لتزيد فيه رغبته وتؤكد محبته

*(lamma kāna kullu man intasaba ilā syaikhin min
masyāyikh al-ṭarīqati wa-a'lami l-haqiqati yanbaghī
lahū an ya'rifa mabniya ṭarīqati syaikhīhi wa-ya'rifa
adzkārahu syaikhīhi wa-awrādahu ... wa-silsilatahu li-
tazīdafīhirughbatuhuwa-tata'akkadamahabbatuhu).*


Ketika seseorang hendak berguru kepada ahli tarekat selayaknya ia harus mencermati lebih dahulu tiga hal sebelum memutuskan tarekat apa dan siapa gurunya. Pertama mengetahui dengan pasti prinsip dasar ajaran tarekat dari sang guru. Kedua, ketahu amalan dan doa-doa rutinnya, dan ketiga ketahu sanad atau silsilah sanad dari sang guru, apakah nyambung atau tidak kepada Rasulullah saw.

Aspek yang pertama, sebelum memutuskan untuk berguru

dan tarekat apa yang akan diikuti, ia harus memahami terlebih dahulu seberapa pantaskah seseorang itu dijadikan guru atau panutan berikut tarekat beserta amalannya. Jadi harus tahu persis fungsi dasar ajaran tarekat tersebut. Misalnya, seseorang tertarik untuk berbai'at tarekat *Qadariah* atau *Naqsyabandiyah*, maka sebelum memutuskan untuk berguru dengan seorang mursyid tarekat tersebut, lakukan pendalaman dahulu, dengan membaca, menggali informasi, maupun tahu persis, apa prinsip-prinsip dasar dari tarekat tersebut.

Dalam birokrasi pemerintahan, terkait dengan reformasi birokrasi, ketika seseorang diamanahi sebuah jabatan/posisi, maka seseorang tersebut hendaknya tahu betul dan menguasai apa tugas dan fungsinya. Dalam konteks Kementerian Agama, ketika seseorang dilantik dalam satu jabatan eselon II, sebagai Kepala Biro, Kepala Pusat, Direktur, Inspektur maupun Sekretaris Ditjen, Badan maupun Itjen, serta KaKanwil Kemenag Provinsi, maka menjadi sebuah keniscayaan orang tersebut faham dan menguasai tugas dan fungsinya. Penguasaan terhadap tugas dan fungsi untuk sebuah amanah jabatan menjadi keniscayaan keberhasilan seseorang dalam menjalankan tugasnya.

Demikian pula ketika seseorang dikukuhkan sebagai pejabat eselon I, baik sebagai Sekjen, Dirjen, Kepala Badan maupun Irjen, maka penguasaan terhadap tugas dan fungsi menjadi mutlak untuk penunaian tugas dan sehatnya organisasi Kementerian. Sebaliknya, gagalnya penguasaan terhadap tugas dan fungsi menjadi indikator kuat gagalnya roda organisasi, khususnya terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.



Meskipun birokrasi pemerintahan mengenal struktur dan hirarki dalam tugas dan tanggung jawab, pemimpin yang gagal menguasai tugas dan fungsinya akan sangat berpengaruh terhadap kondusivitas organisasi. Memimpin dalam manajemen modern tidak semata-mata dengan pola *top down* tetapi acapkali kombinasi antara pola *button up* dan *top down*. Untuk itu kematangan dan penguasaan tugas dan fungsi dari seorang pimpinan tetap memiliki peran yang utama.

Aspek yang kedua, mengetahui amalan dan wirid dari ajaran tarekat yang hendak diikuti. Seorang murid harus tahu amalan dan wirid tarekat itu apa saja, seperti baca shalawat, tahlil sekian ribu kali, dan amalan lainnya. Dengan mengetahui amalan dan wirid tarekat seseorang bisa berkaca dan mengukur diri apakah ia akan mampu menjalankan atau tidak amalan dari tarekat tersebut sehingga berfikir ulang untuk meneruskan niat masuk tarekat tersebut. Dengan kata lain, sebelum membaiah diri pada paham atau ajaran tarekat tertentu seseorang harus mengukur kemampuan dirinya.

Dalam birokrasi pemerintahan, setelah seseorang itu mengetahui dan menguasai tugas dan fungsi, dia juga harus bisa memilah mana program rutin, program prioritas sekaligus logistik dan akunnya. Ini menjadi penting karena pelaksanaan program dan kegiatan di Kementerian/Lembaga senantiasa dipilah menjadi beberapa kelompok, diantaranya: rutin, prioritas dan mandatori sekaligus dengan akun belanjanya masing-masing. Disamping itu, belanja negara juga dipilah berbasis kelompok, pertama belanja rutin/pegawai, belanja barang

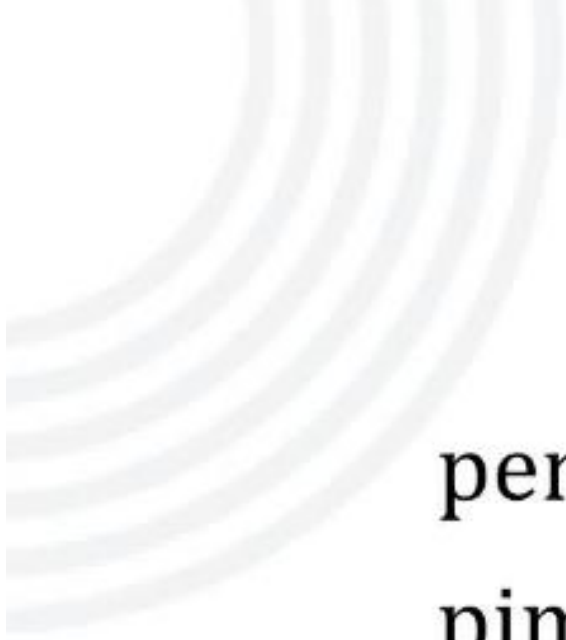
operasional dan belanja barang non operasional.

Bisa dibayangkan jika seorang pejabat tidak mengerti tentang akun pada program kerja sementara ia akan menjalankan tugas dan fungsinya. Sudah pasti hasil kinerjanya buruk dan cenderung ada potensi dibohongi bawahan. Jadi seorang pejabat harus tahu persis dan mampu memilah mana program yang mandatori, prioritas nasional dan program lainnya, sehingga ketika tiba-tiba ada masalah pada kinerja dia bisa menguasai permasalahan.

Jika semua pejabat sudah melakukan itu maka bereslah tugas dan fungsinya. Bawahan dan staf-staf lain itu sifatnya hanya membantu oleh karena seorang pejabat menguasai substansi tugas dan fungsi serta jenis program maupun akun belanjanya.

Aspek ketiga, jika seseorang mau masuk dan belajar ilmu tarekat, ia harus tahu silsilah guru. Silsilah atau sanadnya sampai ke Nabi Muhammad atau tidak. Ketersambungan sanad, menjadi dasar legitimasi ajaran sebuah tarekat, alias tarekat tersebut memang otoritatif untuk diikuti dan dianut. Sebaliknya, jika sanadnya terputus, maka ajaran tarekat tersebut tidak layak untuk diikuti dan dipedomani. Dikhawatirkan, ajaran tarekat yang tidak sambung sanadnya tersebut menjadi ajaran yang sesat dan menyesatkan.

Dalam ranah birokrasi, seorang pejabat harus tahu regulasi dari yang paling tinggi sampai regulasi paling bawah. Terlebih, dalam konteks Kementerian Agama yang *vertikal*, aturan di masing-masing unit eselon 1 berupa petunjuk teknis sebagai



penjabaran dari Peraturan Menteri, merupakan acuan bagi pimpinan satuan-satuan kerja Kementerian Agama di daerah seluruh Indonesia. Untuk itu diperlukan penguasaan yang komprehensif, baik dalam merencanakan, menyusun serta mensyahkan aturan-aturan tersebut agar tidak tumpang tindih, dan menjadi acuan yang mudah bagi satuan-satuan kerja di bawah untuk dilaksanakan.

Sebagai contoh, petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal disamping sangat penting juga harus mempertimbangkan kemudahan implementasinya di daerah. Program Pelatihan Guru [PPG] antara Ditjen Pendidikan Islam dengan Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen, Katolik, Budha dan Hindu serta Konghucu mestinya selaras untuk bisa diimplementasikan bersama. Adanya dua fungsi di Kementerian Agama, yakni fungsi agama dan fungsi pendidikan agama dan keagamaan, dan seiring dengan statusnya sebagai Kementerian *vertikal*, semua pejabat di Kementerian ini harus sadar akan urgensi dari regulasi yang sifatnya *vertikal*, agar tidak tumpang tindih, yang pada gilirannya akan memiliki dampak signifikan dalam mengakselerasi reformasi birokrasi pada Kementerian Agama.

Contoh lain yang bisa dikemukakan adalah belum seragamnya petunjuk teknis [juknis] penyuluh agama bukan PNS di masing-masing Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat. Semestinya juknis tersebut sama atau setidaknya senada, faktanya, terkait rekrutmen penyuluh agama bukan PNS ada yang berlaku untuk tiga tahun, ada pula yang tiap tahun diperbaharui. Untuk itu perlu sinergitas di dalam mengeluarkan

petunjuk teknis, agar memudahkan pelaksanaan program sekaligus berdampak signifikan terhadap reformasi birokrasi.

Aspek keempat, tujuan seseorang melakukan langkah pertama, kedua dan ketiga sebelum memutuskan tarekat apa yang akan dimasuki dan kepada siapa akan berguru, tidak lain agar ketika sudah memutuskan bergabung dengan salah satu aliran tarekat, seseorang makin merasa nyaman dalam pengembaraan spiritualitasnya. Makin seseorang sebagai seorang *sālik* menjalani ajaran tarekat, makin asyik orang tersebut dalam pencarian dan upaya *ma'rifatullāh*.

Dalam dunia birokrasi, ketika seseorang diangkat dan dikukuhkan dalam suatu jabatan, dan dia menguasai tugas dan fungsi, faham dengan pemilahan program berikut dukungan anggarannya, serta menguasai regulasi sebagai dasar mengeksekusi program tersebut, ia akan menjalani amanah jabatan dengan nyaman dan tenang. Hiruk pikuk fitnah dari orang sekeliling yang tidak suka, terkadang gorengan tuduhan dari kalangan yang tidak bertanggungjawab juga akan disikapi dengan santai dan proporsional. Pejabat yang seperti ini akan tenang dan profesional di dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Jabatan sebagai sebuah amanah akan ditunaikan dengan penuh rasa tanggungjawab sebagai bagian dari lahan untuk beribadah, ketika atau-pun lainnya, juga akan lapang dada dan tetap nyaman mensikapinya, bukan menganggapnya sebagai akhir dari perjalanan hidup maupun karirnya.

Enam Unsur Pimpinan

Kementerian Agama sebagai lembaga *vertikal* memiliki dasar yakni Perpres Nomor: 07 tahun 2015 serta diperbaharui menjadi Perpres 68 tahun 2019. Ada enam unsur pimpinan, pertama unsur pemimpin dijabat oleh Menteri, kedua, unsur pembantu pemimpin, yaitu Sekretaris Jenderal, ketiga unsur pelaksana; para Direktur Jenderal, keempat, unsur pengawas, Inspektur Jenderal, kelima unsur pendukung, yakni Kepala Badan dan keenam unsur pelaksana tugas pokok di daerah, yakni para Kepala Kantor Wilayah.


Enam unsur pimpinan tersebut merupakan urat nadi dalam perjalanan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Kebijakan besar Menteri sebagai pembantu Presiden diterjemahkan dalam program baik Prioritas Nasional [PN], Program Prioritas [PP] maupun Kegiatan Prioritas [KP] di masing-masing unit eselon 1 Kementerian Agama. Sekjen menempati peran dukungan layanan manajemen organisasi, meliputi aspek perencanaan anggaran, keuangan, kepegawaian, keortalaan, advokasi hukum dan tata peraturan per-undang-undangan, kehumasan, serta dukungan umum, ditambahkan dengan fungsi kerukunan umat beragama dan layanan terhadap umat Konghucu. Sementara para Direktur Jenderal merupakan unsur pelaksana baik di fungsi agama maupun pendidikan agama dan keagamaan.

Karena sebagai instansi vertikal, lima unsur pimpinan yang berada di Kantor Pusat menjadi acuan dan imam regulasi

serta kebijakan. Para pimpinan satuan kerja di daerah tidak bisa melaksanakan program dan kegiatan tanpa mengacu pada kebijakan yang diterbitkan oleh pimpinan eselon 1 pusat. Beberapa contoh bisa diuraikan sebagai berikut.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak hanya dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tetapi juga Ditjen Bimas yang mengelola pendidikan. Untuk itu, juknis yang diterbitkan oleh Ditjen Pendis sebagai acuan para kepala Madrasah negeri dan kasi Madrasah untuk BOS Madrasah swasta di daerah semestinya sinkron dengan juknis yang sama yang diterbitkan oleh Ditjen Bimbingan Masyarakat yang menangani pendidikan dasar dan menengah. Komponen atau peruntukan dana BOS agar diatur sedemikian rupa yang memastikan dana tersebut bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan pada Kementerian Agama.

Untuk fungsi Agama, contoh yang dikemukakan spesifik layanan untuk umat Islam, yakni penyelenggaraan ibadah haji. Kepuasan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji semakin tinggi, namun tidak berarti upaya perbaikan dan pembenahan berhenti. Inti dari ibadah haji adalah ritual di Arafah, Mudzdalifah dan Mina, seperti disebutkan dalam hadits: *al-hajju 'arafatu*. Untuk itu demi kesempurnaan ibadah tersebut, Kementerian Agama tidak boleh hanya berkutat dengan tugas-tugas pelayanan yang sifatnya piranti, seperti penerbangan, pemondokan, transportasi dan katering, melainkan fokus pada garansi kesempurnaan ibadah inti tersebut.



Kuncinya adalah manasik yang benar-benar mampu membuat calon jemaah haji memahami dengan baik serta menjalankannya saat mereka berada di tanah suci. Karena memakan waktu lama, diawali dengan miqat di Bir Ali, bagi jemaah gelombang pertama yang menuju Madinah terlebih dahulu, serta miqat di Jeddah, bagi jemaah gelombang kedua yang langsung ke Mekkah sampai dengan kepulangan, diperlukan panduan ringkas dan komprehensif. Belum lagi, kondisi jemaah yang sangat beragam dari latar belakang pendidikan, profesi serta pengalaman bepergian, menuntut Kementerian Agama untuk selalu melakukan evaluasi terkait dengan panduan yang dipakai dalam kegiatan manasik tersebut.


Buku manasik yang diterbitkan oleh Bank Penerima Setoran Jemaah memang sudah bagus, menjadi bahan bacaan bagi jemaah yang mau membaca. Akan tetapi, karena literasi mereka juga beragam, diperlukan terobosan baru, agar tidak hanya buku manasik, melainkan keterangan-keterangan singkat namun komprehensif dalam bentuk gambar ataupun alat bantu lain, termasuk juga yang bisa dipakai melalui telepon genggam para jemaah. Kesempurnaan jemaah di dalam melaksanakan ibadah haji, pada gilirannya juga menjadi kontribusi amal jariyah aparatur Kementerian Agama yang menjadi wasilah untuk mempermudah pemahaman tata cara beribadah yang baik dan benar bagi jemaah haji.

Masih di fungsi agama, keberadaan penyuluh agama menempati baris terdepan. Pembentukan sektor ini, di bawah

Ditjen Bimbingan Masyarakat, menjadi sangat niscaya, karena kepenyuluhan agama di era kini mengalami perubahan yang amat mendasar dibanding dengan era sebelumnya. Persoalan faham keagamaan, di mana pemerintah mencanangkan faham yang moderat, menjadi salah satu tantangan bagi tugas penyuluh agama tersebut. Untuk itu diperlukan dua langkah simultan, pertama bagaimana meningkatkan kapasitas para penyuluh agama di tengah anggaran fungsi agama yang makin terbatas, serta meng-*update* konten kepenyuluhan agar sesuai dengan kebutuhan keagamaan masyarakat kekinian.

Terkait dengan efektif dan tidaknya kebijakan di unit Direktorat Jenderal, Balitbang memiliki peran sebagai *supporting agency*. Fungsi kelitbangan berperan untuk melakukan penelitian-penelitian kebijakan, disamping sebagai bahan evaluasi juga untuk merumuskan kebijakan baru di masa mendatang. Untuk evaluasi, Litbang melakukan pengukuran keberhasilan target-target kinerja, sementara untuk kebijakan baru, Litbang berkewajiban memberi telaah dari hasil kajian, perlunya kebijakan baru atau tidak.

Kebijakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal, implementasinya diawasi oleh unsur Pengawas, yakni Inspektorat Jenderal. Baik fungsi agama maupun fungsi pendidikan agama dan keagamaan, Inspektorat Jenderal memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan efektivitas dan kepatuhan para aparatur Kemenag dalam menjalankan tugasnya di masyarakat. Piranti untuk audit, *review* dan berbagai aktivitas pengawasan lainnya juga meniscayakan



update. Inspektorat Jenderal di setiap awal tahun anggaran telah merumuskan kebijakan pengawasan, pada program apa saja yang akan menjadi lokus dari pengawasan, mengingat SDM auditor juga terbatas.

Kembali kepada substansi enam unsur pimpinan, semua melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Ketika fungsi pimpinan dari nomor satu sampai dengan lima berjalan dengan baik dan di level keenam sebagai implementator di daerah juga patuh terhadap juknis yang digariskan, niscaya reformasi birokrasi bukanlah sesuatu yang sulit untuk dijalankan, sebaliknya kesuksesannya akan bisa diwujudkan dengan baik.

Delapan Arah Perubahan Kementerian Agama 2020-2024


Kementerian Agama dari tahun ke tahun terus melakukan pembenahan dan perubahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pelayanan pada bidang pendidikan agama dan kehidupan keagamaan.

Seiring perkembangan zaman, pelayanan pendidikan keagamaan dan kehidupan keagamaan terus bertransformasi sesuai tuntutan zamannya. Setiap orang ada zamannya, dan setiap zaman ada orangnya. Demikian pula dengan bentuk layanan yang diberikan Kementerian Agama kepada masyarakat, terus menyesuaikan dinamika masyarakat pada masanya sebagai bentuk pelayanan pada seluruh masyarakat. Bentuk layanan dalam program kerja tersebut tertuang dalam delapan arah perubahan Kementerian Agama tahun 2020-2024;

Pertama, Peningkatan kualitas kesalehan umat beragama.

Kesalehan umat beragama itu terdiri dari dua sudut pandang, yakni ada kesalehan *vertikal* atau kesalehan ritual, dan kesalehan *horizontal* atau sosial. Kedua kesalehan ini menjadi kunci dalam upaya meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama.

Keduanya, tidak boleh dipertentangkan melainkan selainya diperjumpakan. Seseorang yang beragama, otomatis akan semakin dekat dengan Tuhannya, selanjutnya tentu akan semakin empati dan humanis. Bila seseorang merasa sudah



dekat dengan Tuhannya sementara rasa empatinya tidak tumbuh, berarti kesalehan ritualnya bisa diragukan. Agama itu harus mampu membuat pengimannya semakin soleh baik secara ritual [*vertikal*] maupun sosial [*horizontal*].

Dengan demikian, untuk bisa membentuk kesalehan seseorang itu meniscayakan sebuah faham. Posisi Kementerian Agama disini menjadi sangat penting, dimana salah satu tugasnya adalah untuk membangun kehidupan keagamaan yang lebih baik.

Di masyarakat, pemahaman keagamaan yang berkembang mengarah kepada dua sisi yakni ada sisi yang cenderung ekstrem kanan dan ada juga ekstrem kiri. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Agama, agar masyarakat tetap pada pemahaman keagamaan yang moderat [*wasatīyah*] atau ditengah-tengah. Kalau pemahaman keagamaan seseorang itu tidak moderat sangat sulit untuk menyeimbangkan kesalehan sosial dan ritual. Banyak orang kadang memahami beragama yang penting adalah ibadah sama Tuhan, puasa terus menerus, namun tidak baik dengan tetangga, tidak peduli dengan penderitaan orang lain, dan sebagainya. Ini tentu tidak seimbang, karena semua agama mengajarkan kebaikan kepada sesama.


Untuk itu, kualitas kesalehan umat beragama salah satu tolok ukurnya adalah, semakin dalam umat beragama di Indonesia menjalankan agama dan keyakinannya, akan semakin baik tatanan sosial kemasyarakatannya, karena agama mampu menjadi perekat sosial umat beragama di Indonesia. Untuk menuju kesalehan tersebut, program dan kegiatan di

Kementerian Agama difokuskan pada strategi diseminasi faham keagamaan yang moderat, dengan sebuah keyakinan, faham moderat-lah yang mampu mengantar perilaku keagamaan yang juga moderat, sehingga kesalehan tersebut bisa terwujud.

Kedua, Penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama. Cara pandang moderat maksudnya tidak ekstrem kiri ataupun ekstrem kanan, namun selalu berada ditengah [*wasatīyah*] yang tentunya mempunyai kontribusi riil pada kehidupan keagamaan, dimana muaranya adalah peningkatan kesalehan yang pada akhirnya menggaransi terjaganya kerukunan umat beragama.

Seseorang yang dikatakan moderat tidak pernah menafikan orang lain, apalagi mengklaim dirinya yang paling benar. Orang moderat adalah orang yang meyakini secara absolut kebenaran agama yang dia anut, pada saat yang sama memberikan ruang kepada orang lain yang berbeda.

Orang yang berfaham moderat dalam beragama setidaknya memiliki empat indikator, yaitu i] *terbuka*; ii] *mengedepankan akal sehat*, iii] *menyadari keterbatasan diri*, dan iv] *rendah hati*. Dengan menjalankan ajaran agama, semestinya umat beragama akan semakin terbuka, karena agama tidak pernah mengajarkan ketertutupan. Demikian pula seorang yang menjalankan agama, dirinya akan makin rasional, karena agama selalu mengajarkan akal sehat. Semakin dalam keilmuan keagamaan seseorang dan makin dalam penghayatan dan pengamalan agama seseorang, maka orang tersebut akan makin menyadari keterbatasan dirinya. Demikian pula, makin dalam seseorang menghayati



dan mengamalkan ajaran agamanya, dirinya akan menjadi orang yang rendah hati.

Moderasi dan kerukunan tidak bisa dipisahkan, sebaliknya saling berkelindan. Faham moderat menjadi pintu masuk umat beragama untuk bisa memiliki empat karakter seperti disebutkan di atas, dan pada gilirannya, agama akan mampu menjadikan umatnya memiliki, kohesi sosial, sehingga kerukunan umat beragama akan mampu terjalin dengan baik.

Ketiga, Penyediaan layanan keagamaan yang adil dan merata. Aparatur Sipil Negara [ASN] Kementerian Agama punya tugas untuk menghadirkan dirinya sesuai tantangan zaman. Bentuk layanan kepada masyarakat yang bersifat konvensional dan lamban, harus terus diubah dan diinovasi seiring perkembangan zaman. Pelayanan Terpadu Satu Pintu [PTSP] di Kantor-kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota, misalnya, merupakan salah satu upaya Kemenag menghadirkan layanan yang lebih mudah.

Demikian pula, bentuk layanan keagamaan tidak melulu pada orang tua, justru sekarang zamannya layanan keagamaan mengarah pada orang-orang muda (kaum millennial dan zentalial/usia dari 15-37 tahun). Sebab, generasi mereka inilah nantinya yang menjadi estafet penerus kehidupan keagamaan dimasa mendatang.

Kehidupan keagamaan yang semakin kompleks, perlu disikapi dengan arif, dan bentuk kearifan tersebut adalah memperluas pengaruh faham keagamaan moderat. Kanal-kanal digital, saluran media sosial dipergunakan semaksimal

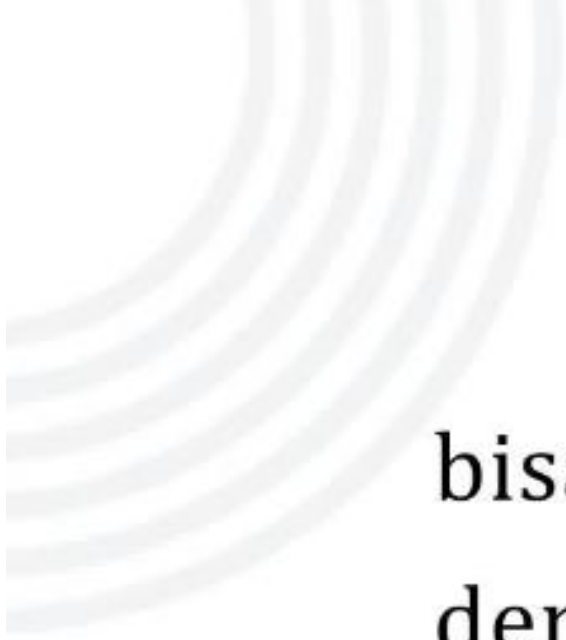
mungkin untuk mendiseminasi faham keagamaan yang moderat, sehingga masyarakat luas memiliki rujukan yang seimbang terkait dengan kebutuhan keagamaan mereka.

Keempat, Peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan dan sumber daya ekonomi umat. Jumlah lembaga atau institusi keagamaan semakin banyak, dan mereka memiliki peran penting dalam pembinaan umat. Oleh karenanya, pemerintah menjadikan mereka sebagai mitra strategis terlebih terkait dengan kebijakan penguatan moderasi beragama.

Relasi antara pemerintah dengan lembaga keagamaan merupakan relasi yang saling membutuhkan dan melengkapi. Sebagai alat negara, Kementerian Agama memiliki kewenangan untuk menerbitkan seperangkat aturan yang memudahkan, memfasilitasi serta menjadikan lembaga keagamaan menjadi mitra. Sementara, lembaga keagamaan yang didirikan oleh masyarakat mendapatkan legitimasi dan keabsahan dari pemerintah, dan mereka bersinggungan langsung dengan umat beragama

Dana-dana masyarakat merupakan dana yang amat penting dalam pembinaan kehidupan beragama. Zakat, infak, sedekah, dan dana-dana sosial keagamaan yang dihimpun oleh lembaga-lembaga keagamaan sangat berperan dalam peningkatan ekonomi umat. Jaminan sosial dari dana sosial keagamaan semestinya mampu dikelola dengan baik agar memiliki dampak sosial terhadap umat beragama.

Di sinilah arti penting Kementerian Agama untuk menjadi fasilitator dan regulator optimalisasi dana-dana keumatan yang



bisa dikelola untuk pemberdayaan ekonomi umat. Sinergitas dengan Baznas, misalnya, hanyalah satu dari sekian banyak contoh sinergi pemerintah dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan.

Kelima, Perluasan akses pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan keagamaan. Untuk bisa mendesiminasikan sekaligus menggaransi kesalehan umat, jalur pendidikan merupakan piranti niscaya. Pendidikan agama dan keagamaan baik yang formal, *non-formal* maupun informal memerlukan sentuhan serius agar lebih berkualitas di masa mendatang.

Keberadaan satuan pendidikan dasar, menengah atas, maupun tinggi di Kementerian Agama membutuhkan kebijakan bukan saja untuk keberlangsungannya, melainkan untuk peningkatan dalam hal akses, tata kelola dan signifikansi.

Dalam kaitan aspek yang kelima ini, perluasan akses menjadi sangat signifikan. Pendidikan agama tidak bisa hanya diberikan secara terbatas jenjangnya kepada peserta didik. Sebaliknya pendidikan agama haruslah diberikan secara total dan komprehensif, sehingga target pemahaman peserta didik terhadap ajaran agama yang diyakini bisa memadahi. Persoalan jam tatap muka di Pendidikan Dasar dan Menengah, memang terkesan klise, akan tetapi, dengan kemajuan piranti pembelajaran, jam tatap muka bukan lagi menjadi hambatan dalam proses internalisasi nilai-nilai keagamaan bagi peserta didik.

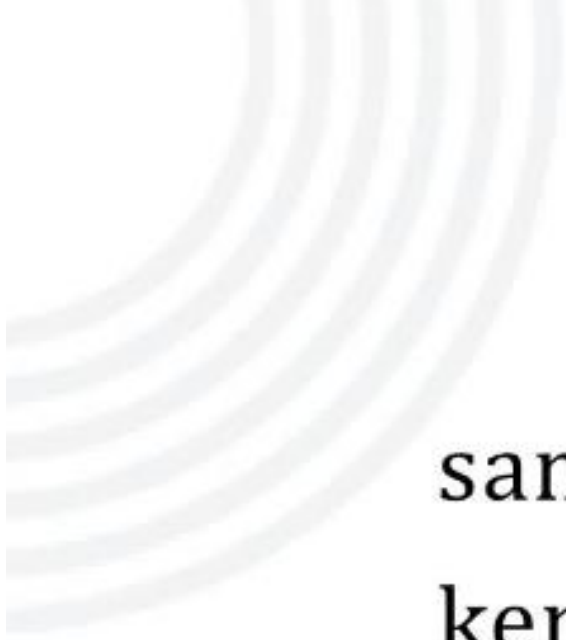
Untuk itu, Kementerian Agama punya kewajiban memperluas akses pendidikan agama dan keagamaan, seperti

Madrasah, sekolah menengah keagamaan dan Perguruan Tinggi Keagamaan. Transformasi kelembagaan beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan negeri dari Sekolah Tinggi menjadi Institut, dari Institut menjadi Universitas adalah ikhtiar nyata Kementerian Agama di dalam memperluas akses kepada masyarakat.

Keenam, Peningkatan kualitas pengelolaan dan mutu pendidikan agama dan keagamaan. Bicara daya saing sebenarnya bukanlah menghasilkan lulusan dari satuan pendidikan yang sebanyak-banyaknya, melainkan pada kualitas lulusan. Seiring dengan jenjang pendidikan yang dikelola Kementerian Agama yang meliputi PAUD sampai dengan Pendidikan Tinggi, maka upaya serius untuk membenahi kualitas disamping perluasan akses dilakukan secara kontinyu. Program-program yang mampu menumbuhkan-kembangkan kreativitas dan inovasi terus digalakkan.

Dalam konteks transformasi kelembagaan, dari IAIN menjadi UIN, misalnya, sejatinya Kementerian Agama sedang berbicara tentang peradaban masa datang. Dalam dunia Perguruan Tinggi yang masih melazimkan dikotomi antara ilmu dan agama, di UIN sedang dan terus digalakkan upaya perjumpaannya. Dengan kata lain, paradigma keilmuan yang sedang dan terus dibangun adalah paradigma non-dikotomi ilmu dengan agama. Keduanya saling melengkapi, dan jika ini terwujud, *best practice* di UIN bukannya tidak mungkin, akan menjadi rujukan peradaban Islam dunia.

Para santri di pesantren sejatinya memiliki potensi yang



sangat luar biasa. Kementerian Agama perlu memfasilitasi kemandirian para santri. Mereka memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang diasah sejak dini. Disamping itu, sistem pendidikan pesantren merupakan sistem yang komplet karena para santri mampu mengembangkan potensi dirinya dengan maksimal, tanpa kehilangan dimensi moralnya. Acapkali dunia pendidikan dihadapkan pada tantangan dikotomik, pengembangan nalar, mengesampingkan moral, atau mengembangkan moral, nalar terkesampingkan.

Ketujuh, Penguatan produktivitas dan daya saing pendidikan keagamaan. Dinamika kehidupan keberagaman di Indonesia yang tengah menghadapi tantangan perlu disikapi bersama secara arif. Sebagian masyarakat memilih mencari jawaban atas pertanyaan tentang keagamaan melalui media-media sosial. Padahal, persoalan keagamaan memerlukan jawaban dari para ahlinya. Dampaknya menjadi sangat tidak sederhana, karena informasi yang tersaji tidak terverifikasi dan tervalidasi secara memadai. Acapkali, pendapat yang dirujuk sebagai jawaban tidaklah sesuai dengan yang semestinya, bahkan berpotensi “menyesatkan”.

Ini menjadi hal baru, sebab, selama ini pengetahuan keagamaan diperoleh oleh umat dari sumber utama, yaitu kyai atau pun pemuka agama. Namun, saat ini dalam era industri 4.0, atau dikenal dengan era disrupsi, maka keberadaan media sosial menggeser peran para pihak otoritatif tersebut.

Menghadapi hal ini, Kementerian Agama sebagai lembaga negara yang konsen pada kehidupan keagamaan dan

pendidikan, berkomitmen untuk terus memperkuat peran lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan. Hal ini ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi keagamaan masyarakat. Kemenag beserta lembaga keagamaan menghadirkan diri di ruang-ruang publik untuk memproduksi konten-konten moderat dalam beragama. Dengan upaya ini, setidaknya, masyarakat akan memiliki alternatif rujukan jawaban atas persoalan keagamaan yang mereka miliki.

Kedelapan, Peningkatan kualitas tata kelola yang efektif dan akuntabel. Sebagai Kementerian yang besar ASN Kemenag harus banyak berfikir strategis, bagaimana rupiah yang dialokasikan berdaya guna dan berdaya saing. Misalnya bertahun-tahun Pendidikan Islam memiliki BOS, dan KIP.

Manfaat langsung dari program tersebut adalah mengurangi orang putus sekolah, melanjutkan pendidikan lebih tinggi sesuai kebutuhan. Terkait ini, tata kelola pemerintahan pada Kementerian Agama harus akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab agar dana yang dikelola bisa dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah [APIP] di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dituntut untuk lebih *up to date* dengan program-program pengawasan yang dimiliki.

Delapan Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi

Pemerintah telah menjalankan program Reformasi Birokrasi secara nasional sejak tahun 2009. Hingga saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua. Hal ini ditandai dengan disusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui PERMENPAN-RB No. 11 Tahun 2015.

Dalam *Road Map* tersebut ditetapkan tiga sasaran dan delapan area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019. Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2. Birokrasi yang efektif dan efisien; serta 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran Reformasi Birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area perubahan reformasi birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi.

Area perubahan reformasi birokrasi tersebut adalah :

1. Mental Aparatur

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh sebagian para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi, seperti lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, feodal, dan lainnya.


Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditunjukkan pada perubahan mental aparatur dengan harapan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan berkualitas. Mental aparatur dalam perspektif agama adalah setiap orang itu pemimpin, maka ia akan bertanggungjawab dalam kepemimpinannya, minimal pemimpin bagi diri sendiri. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai seorang pemimpin harus bisa menempatkan dirinya secara profesional dan proporsional.

Kapan dia bisa sebagai pelecut atau cambuk agar pegawai bersemangat, kapan dia bisa memberikan arahan dan kapan dia memberi perintah pada bawahan. Begitu seorang pemimpin memberikan perintah kepada bawahan, seharusnya diberi target dan tentu melakukan evaluasi. Seorang pemimpin bisa berada di depan, bisa di tengah dan bisa juga di belakang.

كلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ

Kullukum rā'in wa-kullukum mas'ūlun 'an ra'iyyatihi
[Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian juga akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinan kalian].

Pemimpin itu sangat komprehensif dan luas



cakupannya. Pemimpin bagi diri sendiri indikatornya menandakan tugas dengan baik, dan dapat memberi saran yang rasional dan bisa diterima oleh siapapun. Terkait dengan kepemimpinan di sebuah lembaga, yang baik itu belum tentu baik bagi orang lain, bisa disebabkan karenakan cara penyampaiannya dan bisa juga karena waktu penyampaiannya yang kurang tepat. Oleh karenanya, diperlukan kecermatan, ketelitian dan cara yang tepat untuk menyampaikan, agar pesan tersebut tersampaikan dengan baik dan memberi dampak energi positif kepada yang para anggota yang dipimpin.

Kepemimpinan juga bukan hanya dari atas ke bawah, melainkan juga dari bawah ke atas. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin perlu mendengar, menyimak dan mempertimbangkan masukan-masukan dari bawahannya. Demikian pula, ketika pemimpin menemukan ketidak-sinkronan antara unit bawah yang dipimpin, dalam menyelesaikan persoalan tersebut, pemimpin seharusnya melibatkan pihak-pihak yang tidak sinkron tersebut agar ditemukan solusi yang terbaik.

2. Organisasi

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan


keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur.

Karena itu, perubahan pola kepemimpinan diharapkan akan mampu mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, demi percepatan proses layanan kepada masyarakat. Hal tersebut membutuhkan organisasi yang tepat ukuran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Kementerian Agama sebagai instansi vertikal memiliki satuan kerja terbesar di Republik ini, tidak kurang dari 4596 satuan kerja. Hal ini tentu memerlukan perhatian serius terkait rentang kendali satuan kerja dari pusat sampai ke daerah. Oleh karenanya, perubahan mental aparatur di Kementerian Agama menjadi sangat signifikan.

Meski memiliki satuan kerja yang begitu banyak, tidak berarti bahwa organisasi Kementerian Agama tidak tepat ukuran, *right sizing*. Sebaliknya penataan organisasi yang secara struktur dimulai dari sebelas unit eselon 1 pusat, dengan masing-masing eselon 2, 3, dan 4, serta eselon 2 di tiga puluh empat Provinsi di daerah dengan masing-masing eselon 3 dan 4-nya serta ribuan UPT, baik KUA maupun Asrama Haji, telah sepenuhnya sesuai dengan prinsip tepat ukuran seperti yang telah diutarakan.

Semua tugas dan fungsi yang diemban dalam struktur jabatan di pusat maupun daerah telah disesuaikan dengan analisis jabatan yang ditetapkan oleh Kementerian PAN&RB. Untuk itu prinsip organisasi yang tepat ukuran tadi telah terpenuhi pada Kementerian Agama, tinggal



bagaimana para pejabat dan pemimpin tersebut mampu menjalankan peran dan fungsinya secara profesional dan proporsional.

3. Tata laksana

Kejelasan proses bisnis/tata kerja/tata laksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tata laksana yang baik.

Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tata laksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur. Ketata-laksanaan lebih banyak terkait dengan proses bisnis dari pelaksanaan tanggung jawab. Hal-hal yang terkait dengan layanan terhadap umat beragama, Kemenag memiliki kewajiban untuk membuat prosedur operasional baku atau standar melalui berbagai petunjuk teknis yang diterbitkan.

Petunjuk teknis inilah yang menjadi tolok ukur apakah tata laksana di Kementerian Agama telah berjalan dengan baik atau belum. Dalam tataran implementasi juknis, di dalam rangka menjamin baik tidaknya, Inspektorat Jenderal memiliki peran signifikan melakukan

pengawasan.

Sebagai contoh, ketika Zona Integritas dicanangkan di Kementerian Agama sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi, dari sisi ketata-laksanaan, Itjen yang melakukan evaluasi terhadap satuan-satuan kerja yang telah mencanangkan Zona Integritas tersebut.

4. Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Agama memiliki kewajiban untuk menelaah ada atau tidak, bahkan banyak/sedikit peraturan, seperti Peraturan Menteri Agama, serta Keputusan Menteri Agama yang dirasa tumpang tindih. Peraturan dimaksudkan untuk memberi kemudahan sekaligus kepastian hukum atas program-program pemerintah yang dijalankan. Oleh karenanya, filosofi dasar dari area perubahan tentang Per UU-an ini adalah menjadikan mudah tanpa kehilangan ketegasan dari sebuah regulasi bagi yang melakukan pelanggaran.

Contoh yang bisa dikemukakan adalah peraturan tentang pendirian rumah ibadah. Aparatur Kementerian Agama seharusnya sangat memahami perbedaan antara rumah ibadah dan tempat ibadah, sehingga ketika ada problem tentang rumah ibadah bisa mensikapi secara proporsional.

Masing-masing agama memiliki tata cara beribadah sendiri dan menempati tempatnya yang juga khas. Khusus untuk contoh Islam, yang dimaksud dengan rumah ibadah

adalah masjid, sementara musholla, langgar ataupun tempat-tempat biasa yang bisa dipakai untuk salat bukanlah rumah ibadah.

Disamping itu, peraturan akan lebih bermakna jika disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Untuk itu, pendekatan di dalam mengatur keberadaan rumah ibadah bukan semata-mata pendekatan hukum, melainkan berbasis prinsip musyawarah.

5. SDM Aparatur

Manajemen SDM yang tidak tertata dengan baik semenjak dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, hingga mekanisme pemberhentian pegawai akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

إذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة

idzā wusida al-amru ilā ghairi ahlihi fantadzir al-sā'ah

[segala sesuatu jika diberikan kepada bukan ahlinya akan rusak dan tidak akan jalan]

Penataan SDM berbasis orang yang pas pada posisi yang tepat, *the right man and the right place*, merupakan keniscayaan. Sistem dan mekanisme penjenjangan karir mutlak untuk dibenahi, baik untuk struktural maupun fungsional. Adanya kepastian penjenjangan menciptakan iklim yang sehat bagi hak ASN untuk mengembangkan dirinya.


6. Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya.

Situasi seperti ini menuntut perubahan dalam sistem pengawasan. Salah satu yang dikembangkan adalah sistem deteksi dini, *early warning system*, dalam kepengawasan *internal*.

Satuan kerja Kementerian Agama yang berjumlah lebih dari 4000 bisa dikelompokkan menjadi lima; *i] unit eselon 1 pusat; ii] Kanwil Kemenag Provinsi dan Kabupaten/Kota; iii] Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; iv] Balai Litbang dan Diklat Keagamaan serta UPT Asrama Haji; dan v] Madrasah Negeri.*

Pengelompokan satuan kerja tersebut mempermudah Inspektorat Jenderal menggunakan pendekatan dalam audit maupun aktivitas pengawasan lainnya. Antara unit eselon I pusat sebagai regulator, Kanwil Kemenag Provinsi



dan kantor Kemenag Kabupaten/Kota dengan PTKN tentu memiliki karakteristik dan dinamika persoalan yang berbeda. Untuk itu pendekatan dalam pengawasan pun diselaraskan dengan kompleksitas tantangan dan dinamika masing-masing satker tersebut.

7. Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber dana atau anggaran yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar lebih bermanfaat bagi publik seringkali menjadi pertanyaan.

Terkadang pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan *outcome* (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Kuatnya perubahan dalam sistem pengawasan akan mampu memperbaiki akuntabilitas pengelolaan anggaran Kementerian/Lembaga. Untuk itu, antara penguatan pengawasan dengan akuntabilitas memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan, bisa dikatakan, baiknya nilai akuntabilitas ditentukan oleh keberhasilan perubahan dunia pengawasan.

8. Pelayanan Publik

Hasil akhir dari 7 area perubahan yang telah disebutkan sebelumnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Faktanya, pelayanan publik Kementerian/Lembaga belum sepenuhnya lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman dan terjangkau.

Untuk itu, dengan manajemen perubahan melalui terlaksananya 7 area perubahan sebagai piranti diharapkan pelayanan publik sebagai area perubahan ke delapan menjadi terwujud dan lebih baik. Sebuah awal yang baik, dimulai dari mental aparatur sampai dengan perubahan hasil berupa membaiknya pelayanan publik sejatinya selaras dengan nilai sufistik, barang siapa yang awalnya baik, akhirnya pun akan menjadi baik pula, sesuai nasihat dalam *al-Hikam* karya Ibn Atha'illah al-Sakandari sebagai berikut:

من اشرقت بدايته اشرقت نهايته

man asyraqat bidāyatuhu asyraqat nihāyatuhu,
[barangsiapa baik di awalnya, akan baik pula di
akhirnya.

Bersih Melayani dalam kajian Tasawuf

Aparatur Sipil Negara, sebagaimana namanya, memiliki tugas dalam menata sekaligus melaksanakan kebijakan negara demi tegaknya pemerintahan yang baik. Sesuai dengan pengertian mental aparatur, dalam konteks pemerintahan modern sekarang ini, para pejabat tidak lagi kemudian memiliki paradigma yang konvensional, tapi justru harus menjadi pelayan. Birokrat itu melayani, karena ada otoritas yang diberikan agar bisa memberikan keputusan serta menerbitkan regulasi yang bermanfaat bagi kehidupan orang lain.

Aparatur di Kementerian Agama harus memiliki prinsip, di depan ia bisa menjadi panutan yang baik, di tengah bisa menjadi mediator, dan di belakang bisa menjadi pendorong. Prinsip seperti ini semestinya dibudayakan dari pimpinan level tertinggi sampai ke bawah.

Melayani merupakan perbuatan yang mulia, namun belum semua aparatur Kementerian Agama memiliki kemauan untuk bersikap sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu, landasan sufistik terhadap pelayanan masyarakat menjadi penting. Jika tidak, acapkali ego masih mendominasi.

Ibn Athoillah al-Sakandari dalam *al-Hikam* mengatakan sebagai berikut:

ادفن وجودك في ارض الخمول فما نبت من ما لم يدفن لا يتم
نتاجه

*idfin wujūdaka fī ardl l-khumūli fa-mā nabata min
mā lam yudfan lā yatimmu nitājuhu*
*[benamkanlah wujudmu dalam lembah kehinaan,
sesuatu yang tumbuh karena tidak tertanam dalam
biasanya tidak sempurna buahnya]*

Pesan agar seseorang mampu membenamkan diri dalam lembah kehinaan merupakan langkah antisipatif, agar seseorang tidak mudah terjebak dalam kesuksesan dan popularitas. Acapkali ketenaran membawa seseorang kepada rasa bangga dan membusungkan dada. Dengan pesan sufi tersebut ketika kesuksesan menghampiri seorang pemimpin, yang muncul adalah rasa syukur dan berbagi kebahagiaan dengan seluruh jajaran.

“Sesuatu yang tumbuh karena tidak tertanam biasanya buahnya tidak sempurna” juga merupakan nasihat kehati-hatian bagi seorang pemimpin. Pemimpin tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi melalui proses penjenjangan karir yang profesional. Ketika kegagalan menghampiri, pemimpin mensikapinya dengan arif, tidak mengumbar kemarahan kepada anak buahnya.

Dalam rangka pembenahan dan perbaikan Kementerian Agama, hendaknya semua ASN Kemenag menempatkan diri sebagai aktor, representator dan perwujudan. Sebagai aktor, pengertiannya adalah para ASN tersebut adalah pelaku, pelaksana program dan kegiatan. Untuk itu, keterlibatan aktif sesuai tugas dan fungsi adalah keniscayaan. Disamping itu,

mereka juga mengambil bagian untuk menumbuh-kembangkan kebersamaan.


Sebagai representator, setiap ASN yang mengemban tugas berperan sebagai wakil dan duta Kementerian Agama. Oleh karenanya, profesionalitas menjadi keharusan. Representator juga bisa dimaknai sebagai “kata ganti” yang secara penuh menempati posisi yang “digantikan”. Karena posisi yang penuh ini, pada gilirannya para ASN akan mampu melaksanakan tugas secara optimal.

Perwujudan, sebagai makna ketiga, adalah gabungan antara aktor dan representasi. ASN Kemenag sebagai aktor yang mewakili institusi Kemenag menandakan perwujudan kongkret dalam menghadirkan Kemenag di tengah-tengah masyarakat. Untuk perwujudan yang seperti ini membutuhkan keistiqamahan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Masih terkait dengan pemimpin yang melayani, pelajaran ilmu nahwu tentang *fā'il* [pelaku] dari Alfiyah ibn Mālik berikut layak untuk disimak:

وبعد فعل فاعل فإن ظهر # فهو والا فضمير استتر

*wa-ba'da fi'lin fā'ilun fa-in dzahar fa-huwa wa-illa
fa-ḍamīrun istatar*
[setelah *fi'il* (kata kerja) pastilah *fa'il* (pelaku), baik terlihat jelas maupun tersembunyi]

Pemimpin sebagai pelaku ada dua kategori, pelaku yang terlihat dan yang tidak terlihat. Pelaku yang terlihat adalah



ketika setiap ASN Kemenag melaksanakan tugas sesuai fungsi dan amanah yang diemban. Masing-masing memiliki kewenangan, ruang lingkup tanggungjawab yang berbeda sesuai jabatannya. Pelaku yang tidak terlihat adalah ketika para bawahan mampu memberikan *feeding*, saran, masukan konstruktif dan rasional kepada pimpinan unitnya, serta saran tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan atasannya.

Dengan demikian, secara kolektif perbaikan dan pembenahan bisa dilakukan berbasis prinsip nilai tasawuf serta *i'tibar* ajaran keislaman lainnya.

KMA 580/2019 dan Ikhtiar Kemenag

Ikhtiar reformasi birokrasi di Kementerian Agama terus berlangsung. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama [KMA] No 580 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah [SPIP]. SPIP bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas, efisiensi pada pencapaian tujuan penyelenggaraan negara, laporan keandalan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal dimaksud sebagai bagian dari upaya mengefektifkan rentang kendali yang cukup luas sebagai instansi vertikal. KMA 580 terbit agar bisa menjadi pedoman pelaksanaan SPIP bagi seluruh Satuan Kerja/UPT secara efektif. Dengan demikian, ada mekanisme yang jelas dan dapat dipantau. KMA ini mengamanatkan bahwa seluruh Satuan Kerja/UPT pada Kementerian Agama Wajib melaksanakan SPIP sesuai dengan lingkup dan fungsinya, serta pimpinan wajib membentuk Satuan Tugas SPIP.

Kementerian Agama juga telah membuat aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Intern [SIMPI] sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penerapan SPIP. Dalam sistem pengendalian dikenal istilah tiga lapis pertahanan, yaitu: pemilik resiko, satgas SPIP, dan APIP. Sebagai lapis pertama, pemilik resiko adalah para pimpinan satker, terutama jajaran KPA [Kuasa Pengguna Anggaran] dan

PPK [Pejabat Pembuat Komitmen], sebagai eksekutor program, kegiatan serta bantuan kepada masyarakat.

Mereka inilah yang secara langsung berhadapan dengan potensi resiko, apabila tidak mengindahkan norma, peraturan serta petunjuk teknis yang berlaku. Khusus terkait bantuan kepada masyarakat, misalnya, mereka yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama, apabila bantuan yang diberikan bermasalah di kemudian hari. Selain itu, mereka adalah penanggung jawab pengadaan barang.

Belanja barang non operasional, termasuk pengadaan barang dan jasa, serta pembangunan sarana fisik, yang sangat berpotensi memiliki resiko adalah KPA dan PPK tersebut. Oleh karenanya, sebagai lapis pertama, mereka dituntut untuk memiliki kesadaran akan potensi resiko tersebut. Kesadaran akan potensi resiko bisa ditumbuhkan dengan proses *learning by doing*. Struktur hirarkis Kementerian Agama yang memberlakukan satuan kerja pada masing-masing unit sangat memungkinkan adanya proses dimaksud.

Lapis kedua adalah satgas SPIP yang bertugas memonitor pengendalian yang dilakukan oleh pemilik resiko untuk memperkuat pengendalian satker/UPT. Keberadaan satgas menjadi sangat penting untuk memberikan analisis resiko sekaligus peta potensi masalah yang akan ditimbulkan, apabila lapis pertama tidak cermat dan kurang hati-hati dalam mengeksekusi program dan kegiatan serta bantuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Sedangkan lapis ketiga yakni Inspektorat Jenderal sebagai

APIP yang bertugas sebagai pembina satgas sekaligus memonitor pengendalian yang dilakukan oleh satgas SPIP pada satker/UPT agar pelaksanaannya sesuai dengan norma yang sudah ditetapkan. Dalam rangka memaksimalkan dua level pertahanan terkait potensi resiko, APIP selayaknya memberikan pembinaan-pembinaan, khususnya terkait pengadaan barang sarana fisik. Besarnya alokasi SBSN untuk asrama haji di Ditjen PHU, untuk KUA di Ditjen Bimas Islam, dan untuk Madrasah Negeri dan Perguruan Tinggi Islam Negeri, APIP semestinya gencar melakukan *probity audit*, yakni pendampingan terhadap satker yang mendapatkan alokasi SBSN tersebut.

Hal ini dimaksudkan untuk deteksi dini, munculnya masalah di kemudian hari. Karena keberadaan satgas SPIP yang strategis ini, maka yang ditugasi dalam posisi haruslah orang-orang yang memiliki kompetensi di atas rata-rata, tidak sembarang ASN. Meminjam istilah ilmu gramatikal bahasa Arab, para anggota satgas SPIP adalah kata benda definit yang bisa menjadi *mubtada* [subyek], Alfiyah ibn malik seperti diilustrasikan sebagai berikut:

ولا يجوز الابتداء بالنكرة # ما لم تفد كعند زيد نمره

wa-lā yajūzu l-ibtida bi-l-nakirah #

mā lam tufid ka-'inda zaidin namirah

[tidaklah diperbolehkan membuat subyek dengan

isim nakirah selagi tidak memberi faidah, seperti di

sisi Zaid terdapat seorang putri]

Subyek [*mubtada*] dalam tata gramatikal bahasa Arab seharusnya berupa sesuatu yang jelas atau definit, tidak boleh dari sesuatu yang masih umum kalau tidak memiliki faidah. Yang ditugasi sebagai satgas SPIP oleh para pimpinan adalah mereka yang memiliki rekam kompetensi dan integritas yang baik. Di tangan satgas ini, pemilik resiko akan termonitor dan terdampingi dengan baik, sehingga kemungkinan untuk terjadinya kesalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengeksekusi bantuan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

SKB Penanganan Radikalisme ASN

Memandang perlunya kehadiran dalam menangani radikalisme yang berkembang ditengah-tengah masyarakat utamanya kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah melalui sebelas Kementerian dan Lembaga Negara bersepakat menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme ASN dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN. SKB tersebut ditandatangani pada 12 November 2019 di Jakarta.

Selain Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, SKB ini ditandatangani pimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Idiologi Pancasila, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

SKB ini mengatur tentang sinergitas K/L dalam rangka penanganan tindakan radikalisme ASN. Dimana berdasarkan SKB akan dibentuk tim satuan tugas lintas K/L yang bertugas menerima laporan, menindaklanjuti, dan memberikan rekomendasi penanganan kepada pimpinan K/L terkait dengan tembusan ke KemenpanRB, Kemendagri, BKN, dan Komisi ASN.


Hadirnya kesepakatan ini dilandasi oleh keprihatinan pemerintah, berbasis aduan masyarakat, banyaknya ASN yang tidak bisa konsisten dengan aturan internal kepegawaian.


Seiring dengan maraknya media sosial, perbincangan-perbincangan informal, bahkan pinggir jalan yang mungkin awalnya biasa dan lumrah terjadi, perbincangan tersebut berdampak sangat serius di masyarakat karena tersebarkan melalui jejaring media sosial. Ujaran-ujaran kebencian terhadap sesama, terlebih terhadap pemerintah berikut simbol-simbol aparatnya, amat mengkhawatirkan apabila dibiarkan.

Untuk itu, kesepakatan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi ASN yang pelaksanaannya disesuaikan dengan norma PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tersebut merupakan acuan regulasi sekaligus semacam hukum acara bagi Kementerian/Lembaga ketika ASN di kantornya melakukan pelanggaran di media sosial.

Tentu kebedaraan SKB ini menjadi penting, khususnya bagi ASN Kementerian Agama agar lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya /medsos, untuk mampu menghindarkan diri dari ujaran-ujaran kebencian yang mengarah kepada sikap atau pemikiran yang radikal. Sebaliknya, ASN Kemenag mampu menjadikan medsos lebih memiliki manfaat, bukan sebaliknya, yakni mendatangkan madlarat.

Tindakan radikalisme itu sendiri mencakup intoleransi, anti ideologi Pancasila, anti NKRI, dan perbuatan yang bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Berikut ini 11 jenis pelanggaran yang diatur dalam SKB Penanganan Radikalisme ASN:

- 
1. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tulisan dalam format teks, gambar, audio, atau video, melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.
 2. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tulisan dalam format teks, gambar, audio, atau video, melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar golongan.
 3. Penyebarluasan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, repost, dan sejenisnya*).
 4. Tanggapan atau dukungan sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana angka 1 dan 2 dengan memberikan *likes, dislike, love, retweet, atau comment* di media sosial.
 5. Pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial.
 6. Penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial.
 7. Penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan



membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

8. Keikutsertaan pada organisasi dan atau kegiatan yang diyakini mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.
9. Penggunaan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.
10. Pelecehan terhadap simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial; dan/atau.
11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN.

Dengan penjelasan sebelas poin pelanggaran tersebut diharapkan ASN Kemenag mampu menjaga diri masing-masing sekaligus mensosialisasikan kepada pihak lain agar rambu-rambu dalam SKB tersebut bisa dipatuhi dan dijalankan.



SKB PENANGANAN RADIKALISME ASN

Ada 11 Pelanggaran yang di atur dalam SKB penangan Radikalisme ASN :

1. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tulisan dalam format teks, gambar, audio, atau video, melalui media sosial yang bemuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.
2. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tulisan dalam format teks, gambar, audio, atau video, melalui media sosial yang bemuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar golongan.
3. Penyebarluasan pendapat yang bemuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost, dan sejenisnya).
4. Tanggapan atau dukungan sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana angka 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial.
5. Pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial.
6. Penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial.
7. Penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.
8. Keikutsertaan pada organisasi dan atau kegiatan yang diyakini mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah
9. Penggunaan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.
10. Pelecehan terhadap simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial; dan/atau.
11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN.

● Jika ada ASN yang melanggar, Masyarakat kini bisa mengadukannya melalui saluran :

ADUANASN.ID.

Jalankan yang dibolehkan, Hakekatnya Tinggalkan yang diharamkan

Aturan ini merupakan sebuah keniscayaan agar kehidupan berjalan dengan tertib, aman dan damai. Tata kehidupan bermasyarakat sampai dengan bernegara menjadi kesepakatan bersama agar dijalankan dengan baik demi tujuan bersama. Sedangkan sumber dari pranata tersebut bisa dari aturan adat, budaya, bahkan agama. Sebagai Muslim, pranata hukum Islam mengajarkan adanya lima kategori aturan hukum dalam perilaku keseharian, yakni wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

Wajib, sesuatu yang harus dikerjakan, jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa; sunnah, sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa; haram sesuatu yang harus ditinggalkan, jika mengerjakan mendapatkan dosa, makruh, sesuatu yang ketika dikerjakan tidak mendapatkan dosa, ketika ditinggalkan berpahala; sedangkan mubah, mengerjakan dan meninggalkan tidak mendapatkan pahala ataupun dosa.

Logika ushul fikih mengajarkan sesuatu yang sangat brilian. Ketika sesuatu yang asalnya netral, tidak memiliki konsekuensi apapun, ternyata dalam ushul fikih mubah bisa bertransformasi menjadi meninggalkan yang diharamkan. Dalam *Hasyiyah al-'Atṭār 'alā Jam'i al-Jawāmi'* jilid 1 halaman 224, disebutkan sebagai berikut:

اذ ما من مباح الا ويتحقق به ترك حرام ما فيتحقق بالسكوت
ترك القذف وبالسكون ترك القتل

idz mā min mubāhin illa wa-yatahaqqaqu bihi tarku harāmin mā, fayatahaqqaqu bis-sukūti tarku al-qadzafi wa-bis-sukūni tarku l-qatli .

[ada kalanya sesuatu yang mubah bisa bertransformasi menjadi meninggalkan yang dilarang, seperti diamnya seseorang (mubah) ternyata meninggalkan tidak terlibat menuduh orang berbuat zina, demikian pula diamnya seseorang di rumah alias tidak bepergian, juga tidak terlibat dalam kejahatan pembunuhan]

Logika ushul fikih yang seperti ini jika diterapkan dalam dunia birokrasi memiliki implikasi positif yang sangat luar biasa. Keberadaan aparatur negara dalam dunia birokrasi yang normanya diatur dengan peraturan per undang-undangan memang sudah baik. Akan tetapi, khusus bagi yang muslim, ketika mereka mengetahui dan menyadari logika ushul fikih tersebut, dampaknya terhadap kinerja dan reformasi birokrasi akan sangat luar biasa.

Kehadiran seseorang di kantor sudah diatur dengan aturan presensi. Tentu punya dampak kedisiplinan, minimal dalam hal kehadiran. Akan tetapi, ketika sudah hadir di kantor, apakah ada jaminan ASN tersebut akan berkiprah maksimal?


Jawaban terhadap pertanyaan tersebut bisa dilakukan dengan pendekatan keislaman, logika ushul fikih tadi.

ASN bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Terlebih jika melihat pada Kementerian Agama sebagai organisasi *vertikal* yang besar. Kehadiran para ASN di kantor yang kemudian dibatasi dengan tugas dan fungsi yang melekat acapkali belum memiliki daya dorong yang kuat untuk optimalisasi kinerja. Nilai keislaman diharapkan mampu lebih melecut kinerja ASN muslim disamping karena dimensi ibadahnya yang kental, juga nilai tambah dari perspektif ushul fikih tadi.

Sebagai contoh bisa disampaikan sebagai berikut. Seorang pemimpin di unit kerja atau satuan kerja Kemenag memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap anak buahnya agar kinerjanya lebih optimal. Sementara, pendekatan yang dipakai oleh pemimpin tadi hanya menggunakan norma dan aturan. Anak buah yang mendapatkan pembinaan dari pemimpin yang seperti ini bisa jadi jenuh, tidak menggugah dan tidak menginspirasi. Sebaliknya, jika pemimpin tersebut menggunakan sentuhan keislaman, dapat dipastikan energi positif dan semangat baru akan senantiasa timbul.

Sesuatu yang terlihat sederhana, bahwa ibadah sejatinya ada dua kategori, ibadah murni, *mahḍah* dan ibadah tidak murni, *ghairu mahḍah*. Kerja keras dan tuntas di kantor sesuai dengan amanah yang diemban hakikatnya adalah bagian atau salah satu bentuk dari ibadah jenis kedua.

Presensi di kantor dengan niat yang baik dari rumah merupakan ibadah, akan bertambah nilai ibadahnya jika mengerjakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-



masing, sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.

Di saat jeda, selesai mengerjakan tugas, sambil menunggu tugas yang lain, istirahat adalah sesuatu yang lumrah. Dalam bahasa ushul fikih istirahat adalah sesuatu yang mubah. Ketika istirahat digunakan secara positif, seperti tidak terlibat ngerumpi dengan teman sejawat atau ngobrol sana sini yang tidak ada gunanya, nilai tambah secara keislaman akan bertambah karena tidak ikut ngerumpi dan tidak ikut ngobrol yang tidak berguna, menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak baik.

Menerapkan prinsip mubah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam melaksanakan tugas sebagai ASN, merupakan nilai tambah signifikan dalam kesempurnaan seseorang menjalankan ajaran Keislaman.

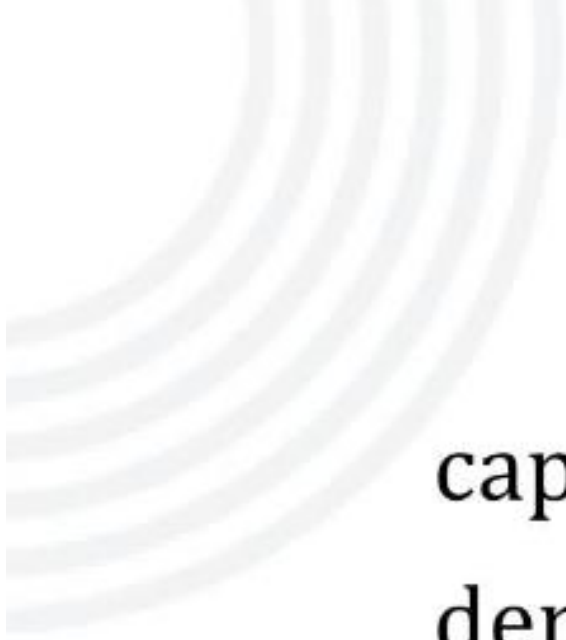
Strategi Optimalisasi Serapan Anggaran

Setiap akhir tahun anggaran berjalan, serapan anggaran selalu menjadi persoalan yang dialami oleh Kementerian/Lembaga. Tidak terkecuali pada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama. Akan hal ini, seluruh pemangku jabatan di Kemenag diminta untuk dapat menelaah dan segera melakukan sejumlah langkah dalam optimalisasi serapan anggaran tahun 2019.

Hingga 8 Oktober 2019, serapan anggaran pada Sekretariat Jenderal hampir 80 persen. Ini tidak terlalu buruk, tetapi tentunya semua pemangku jabatan harus memiliki strategi agar serapan anggaran di akhir tahun dapat tercapai dengan optimal. Langkah **pertama** yang perlu dilakukan adalah membuat *time schedule* pencairan anggaran. Masing-masing Biro dan Pusat, membuat *time schedule* target serapan anggaran. Dengan membuat hitungan mundur dari tanggal akhir penerimaan SPM (Surat Perintah Membayar) terakhir pada 15 Desember 2019.

Kedua, melakukan penilaian ulang terhadap program-program yang belum dan dapat segera terlaksana. Setelah menyusun *time schedule*, ditekankan agar mengetahui, program-program apa saja yang *executable*. Masing-masing Biro dan Pusat, diminta mengidentifikasi anggaran yang tidak mungkin terealisasi sehingga bisa dialihkan atau direvisi untuk program lain yang lebih prioritas.

ASN Kemenag sebagai pemangku jabatan, harus mencermati program-program yang memungkinkan dilakukan kolaborasi. Dengan demikian, diharapkan serapan anggaran maupun



capaian tugas dan fungsi ke-setjen-an khususnya dapat tercapai dengan optimal. Begitu juga dengan mempersiapkan diri menghadapi survei terkait Reformasi Birokrasi (RB) yang akan dilakukan oleh tim Menpan-RB.

Seluruh jajaran Kemenag dapat menunjukkan hasil Reformasi Birokrasi yang selama ini dilakukan di lingkungan Setjen. Selain itu, seluruh jajaran Kemenag untuk mencermati hambatan yang mungkin selama ini dialami dalam pencapaian Reformasi Birokrasi. Salah satunya adalah *cascading* jabatan.

Kelemahan selama ini yang paling mendasar, Reformasi Birokrasi sudah berjalan bagus pada tingkat pusat, tapi belum optimal di tingkat daerah. Dalam kajian tasawuf setiap pekerjaan yang diawali dengan baik, maka hasilnya juga akan baik, seperti kata ibn Athaillah al-Sakandari dalam *al-Hikam*:

man asyraqat bidāyathu asyraqat nihāyatuhu

[barang siapa baik di awal, akan baik pula di akhir].

Siklus pekerjaan dalam Kementerian/Lembaga itu dimulai dari perencanaan, melaksanakan program, dan membuat pelaporan sebagai hasil pertanggungjawaban dari sebuah pekerjaan amanah. Dalam hal ini, diperlukan suatu kecermatan dalam membuat perencanaan agar menghasilkan yang lebih baik. Kaitannya dengan pelayanan keagamaan di Kementerian Agama adalah siklus kegiatan atau program yang dilaksanakan menjadi uji validitas terhadap perencanaan yang sudah dilakukan. Untuk itu dibutuhkan kecermatan dan strategi serapan anggaran dengan melakukan identifikasi secara cermat dan tepat sasaran.

“

*Kaum Santri sebagai bagian dari Indonesia
senantiasa mengedepankan sikap santun,
menghargai perbedaan, anti kekerasan dan
anti permusuhan atas nama apapun*





BAB II

Lecut Kinerja ASN

Memaknai Blangkon

Blangkon menjadi penutup kepala khas orang Jawa yang terbuat dari kain batik. Blangkon biasanya digunakan oleh kaum pria yang mengenakan pakaian tradisional Jawa. Bentuknya seperti topi, ditaruh di atas kepala, dan mempunyai punduk di bagian belakang.

Secara jamak blangkon dibagi ke dalam empat jenis yakni blangkon Yogyakarta, blangkon Surakarta, blangkon Kedu, dan blangkon Banyumasan. Bagi sebagian orang blangkon hanyalah sebuah asesoris pakaian tradisional Jawa. Dalam kajian sufistik, blangkon memiliki makna yang mendalam. Ada satu alasan yang membuat orang Jawa memakai blangkon.

Arti harfiah blangkon sebenarnya *belange lakon* [cacatnya kehidupan]. *Lakon* adalah perjalanan hidup, sedangkan *belang* adalah cacat atau aibnya seorang manusia. Artinya tidak ada

orang yang hidup di dunia ini yang tidak punya cacat, kelemahan atau aib.

Karena Allah maha pengasih sehingga aib manusia itu tidak ada yang dibukakan. Coba kalau aib kita dibuka sama Allah sangat luar biasa mampu memermalukan yang dibuka aibnya tersebut. Makna yang tersirat dari blangkon ini adalah jangan sampai kita mengulangi belang-belang dalam kehidupan. Tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang memiliki kelemahan dan kelebihan. Orang yang berakal, ketika berbuat salah harus diingat, jangan sampai diulangi lagi. Ketika Blangkon ditaruh diatas, maknanya jangan berbuat kesalahan yang diulang-ulang.

Begitu juga dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), ketika dia melaksanakan tugas, ritme dalam birokrasi diwarnai dengan dinamika. Saat melaksanakan tugas misalnya, lalu seseorang berfikir membantu, dan melakukan revisi, itu biasa. Seorang ASN jika diibaratkan, ia layaknya ahli mekanik, orang yang berada dan bekerja di bengkel.

Reformasi sedang berbicara sistem, pelaksanaan reformasi birokrasi diibaratkan mobil yang sedang mogok, rusak atau kondisinya tidak prima. Saat mobil diservis, para ASN sebagai ahli mekaniknya tentu melakukan perbaikan di sana sini, seperti menservis mesin, ganti oli, sehingga tangannya blepotan, kotor dan lain-lain. Ia sedang bekerja serius agar mesin bekerja dengan baik. Akan tetapi, setelah jam kerja di bengkel selesai, maka tangannya akan dibersihkan dari semua kotoran mesin yang melekat, sehingga hidupnya tetap bersih

dan sehat.

Ilustrasi tersebut setidaknya bisa dipakai untuk menggambarkan pekerjaan di birokrasi pemerintah. Acapkali aturan-aturan yang diterbitkan tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Terlebih, ketika baru di tengah tahun anggaran, misalnya, ada bencana yang menyedot perhatian nasional. Semua Kementerian/Lembaga diperintah untuk ikut dalam *recovery* dan penormalan akibat bencana. Semua KPA [Kuasa Pengguna Anggaran] dan PPK [Pejabat Pembuat Komitmen] harus gerak cepat melakukan revisi-revisi anggaran, realokasi untuk bisa membantu proses *recovery* tersebut.

Proses revisi anggaran sedang berjalan, namun kegiatan pendukung segera harus dilaksanakan, sehingga acapkali birokrat menggunakan istilah kantong kanan dan kantong kiri. Tentu, jika hanya melihat kepada tertib administrasi semata, kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena proses revisi sedang berjalan. Oleh karena itu, di sinilah ilustrasi tentang bekerja di bengkel sebagai seorang ahli mekanik menjadi relevan.

Eksekusi program dan kegiatan meniscayakan intervensi keberanian mengambil keputusan, sehingga resiko yang dihadapi adalah “kotor” tangan dari perspektif administrasi yang sifatnya normatif, tetapi ketika pekerjaan itu sudah selesai ditunaikan, tertib administrasi segera dibenahi, dengan melibatkan bukti-bukti pembelanjaan yang diperlukan. Pada akhirnya, laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

bisa diterima dengan baik sebagai laporan yang akuntabel.

Belange lakon [cacat/kesalahan dalam kehidupan] merupakan sesuatu yang lumrah, karena tidak ada satupun manusia sebagai makhluk yang tidak memiliki kesalahan atau kekhilafan. Perjalanan karir seorang ASN dalam jabatan fungsional maupun struktural, tidak lepas dari dinamika yang terjadi.

Terlebih jika kebetulan kita adalah pemimpin, maka dituntut untuk memiliki kearifan ekstra di dalam melihat tubuh organisasi yang para anggotanya beragam. Mungkin ada diantara mereka yang memang memiliki rekam jejak kurang baik, sehingga pembinaan intensif perlu dilakukan. Prinsip husnu dzon dalam menjalankan kepemimpinan ada baiknya melaksanakan nasihat Umar ibn al-Khattab, saat beliau menjadi khalifah. Beliau mengatakan:

وضع امر اخيك على احسنه حتى يجيءك ما يغلبك

wa-ḍa' amra akhīka 'alā ahsanihi hattā yaji'aka mā yaghlibuka

[tempatkan urusan saudaramu dalam posisi terbaik (husnu dzon), sampai akhirnya kamu tahu bahwa husnu dzon kamu itu keliru].

Akhirnya dengan berkaca kepada Blangkon, perilaku ASN Kementerian Agama diharapkan bisa lebih baik di masa mendatang, bukan saja ikut serta dalam gerakan reformasi birokrasi, tetapi langkah dan aktivitas sebagai ASN pada hakikatnya bisa menjelma menjadi sebuah ibadah yang memiliki nilai kemuliaan di sisi Tuhan YME.

Empat Cacat Manusia

Lumrah diketahui, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia adalah makhluk biologis sekaligus makhluk peradaban. Oleh karenanya, banyak kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Sekaligus tidak luput dari kekurangan. Ajaran kearifan lokal menyebutkan manusia memiliki empat kekurangan mendasar; *i]* *angan-angan tanpa guna; ii]* *memaksakan kehendak; iii]* *keras kepala dalam berpendirian; iv]* *egois.*

Berangan-angan yang tanpa guna seperti memimpikan sesuatu yang nyaris mustahil diraih. Angan-angan berbeda dengan cita-cita. Cita-cita adalah idealisme di masa mendatang yang memungkinkan untuk dicapai dengan berbagai upaya yang realistis.

Sebagai ASN peningkatan karir merupakan hak sekaligus indikator prestasi kinerja. Tetapi cara yang digunakan untuk meningkatkan karir jangan sampai menyalahi norma kelaziman, akibat terdorong angan-angan yang menggebu. Agar menjadi positif, bimbinglah angan-angan yang tanpa guna perlahan berubah menjadi cita-cita, sehingga bisa diwujudkan melalui cara-cara yang rasional dan bermartabat.

Kedua, terlalu memaksakan kehendak. Kelemahan yang seperti ini sering menghinggapi orang yang sedang diberi otoritas. Dampak yang akan timbul jika pemimpin memiliki karakter memaksakan kehendak adalah rusaknya roda organisasi. Pemimpin menjadi bukan sosok yang mengayomi,

mencerahkan dan menebarkan energi positif bagi anak buahnya, sebaliknya hadir sebagai momok yang membosankan.

Mempunyai kehendak tentu manusiawi, akan tetapi, kehendak tersebut apakah akan bermanfaat terhadap organisasi atau tidak, perlu mendapatkan perenungan mendalam. Bagi sosok pemimpin diperlukan kearifan untuk memenej kehendak agar proporsional dan tidak berdampak buruk terhadap jajaran yang dipimpin.

Ketiga, keras kepala dengan pendirian. Sifat negatif ini apabila melekat kepada pemimpin, kepemimpinannya akan tidak berhasil dengan baik. Memimpin sejatinya memiliki seni, kapan harus menjadi penentu arah yang dikawal secara tegas, kapan menjadi mediator ulung di tengah keragaman pendapat dan kapan menjadi pendorong yang kuat untuk anak buah yang dipimpin. Kemampuan untuk mendengar saran, ketajaman untuk menganalisis masukan dan kecepatan dan ketepatan mengambil keputusan hanya bisa dimiliki oleh orang yang punya pendirian tetapi tidak keras kepala. Sikap yang semestinya diambil adalah berpendirian dengan membuka diri terhadap masukan konstruktif orang lain.

Ada teladan sangat penting dari sosok besar, Imam Malik ibn Anas, pendiri madzhab Maliki. Sebagai ilmuwan besar, dan tentu kepakaran ilmunya tidak ada yang meragukan, toh masih membuka diri terhadap masukan ilmuwan lain. Apalagi cuma pemimpin-pemimpin seperti kita yang keilmuannya masih sangat pas-pasan. Dikisahkan, ketika imam Malik ibn Anas tuntas menyusun draft kumpulan hadis yang kemudian

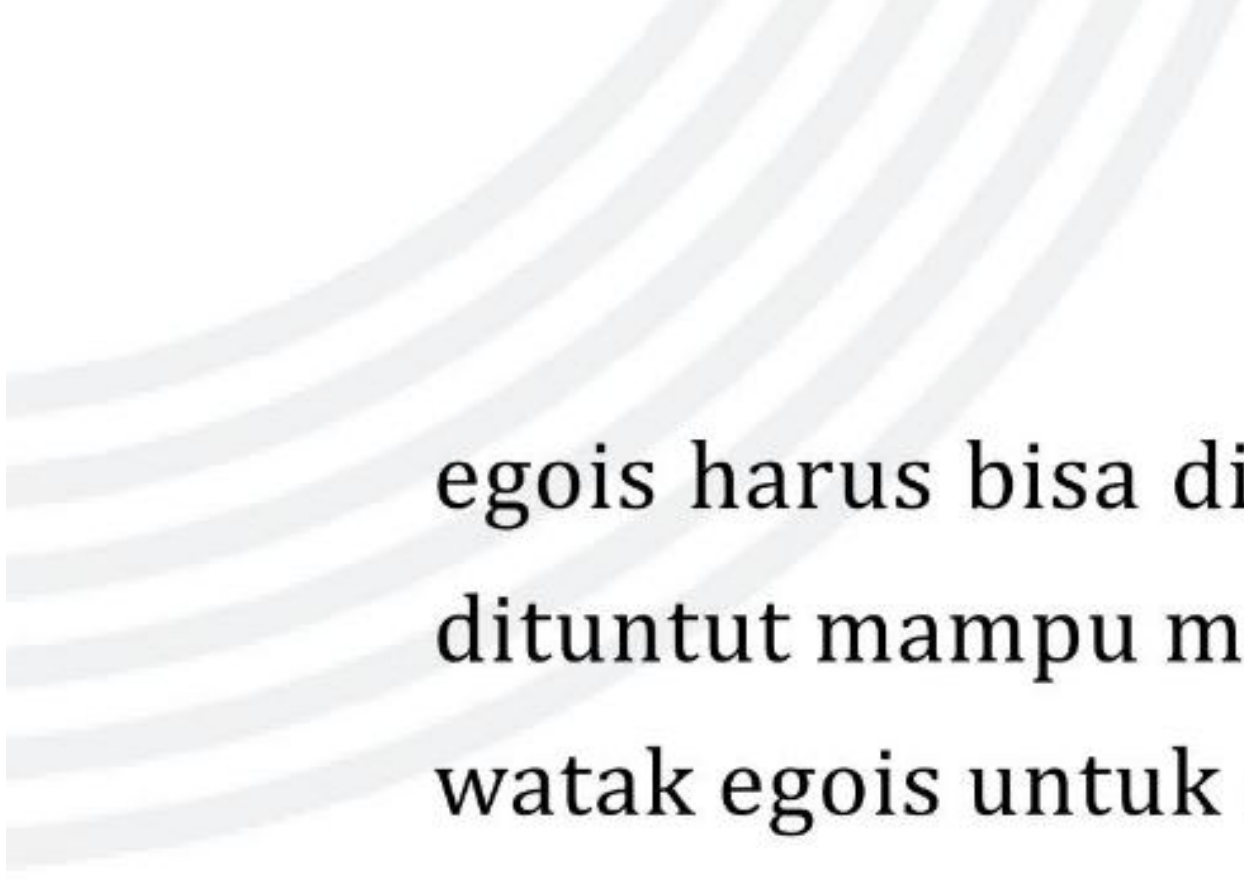
dikenal dengan nama al-Muwaṭṭa', sebelum diterbitkan, beliau memberikan tulisan tersebut kepada tujuh ahli se Madinah untuk mendapatkan masukan. Seluruh tujuh puluh ahli, setelah membaca draft tersebut, memberi catatan persetujuan, karena disetujui, akhirnya draft tersebut diberi nama oleh imam Malik ibn Anas dengan nama *al-Muwaṭṭa*. Berikut kalimat dari Imam Malik:

عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة فكلهم
واطاني عليه فسميته الموطاء

'aradtu kitābī hādzā 'alā sab'īna faqīhan min fuqahā'i l-madīnati fa-kulluhum wāṭa'anī 'alaihi fa-sammaituhu al-muwaṭṭa'

[Aku sodorkan kitab tulisan ku ini kepada tujuh puluh ahli se antero Madinah, semuanya menyepakati tulisan ku tersebut, oleh karenanya aku beri nama al-Muwaṭṭā (yang disepakati)]

Keempat, egois. Sifat negatif ini bisa melekat kepada siapa-pun. ASN di level apapun ketika dihinggapi sifat egois maka karakter destruktifnya terhadap organisasi sangat menonjol. Organisasi Kementerian akan berjalan dengan normal dan baik jika para ASN nya jauh dari watak egois. Terlebih, godaan untuk egois biasanya terjadi terkait dengan besar kecilnya alokasi anggaran di masing-masing unit teknis. Oleh karena itu, demi kebaikan bersama dan keberhasilan program, maka watak



egois harus bisa dimenej agar tidak terus menerus. Pemimpin dituntut mampu mengidentifikasi anak buahnya yang memiliki watak egois untuk diarahkan dan dibina secara kontinyu untuk bisa berkontribusi lebih positif bagi organisasi.

Peran Kepengawasan; Teladan Sisi Sufistik

Seiring perkembangan zaman paradigma internal audit mengalami perubahan yang tadinya sebagai *watchdog* bergeser menjadi mitigatif. Mitigasi resiko, menjadi sangat penting dimiliki oleh para auditor dalam kerangka sebagai aparatur pengawas internal pemerintah.

Mengapa mitigasi penting, karena Kementerian Agama dengan satuan kerja yang sedemikian banyak dan mengemban dua fungsi yakni layanan pendidikan agama dan kehidupan keagamaan. Kedua fungsi ini menjadi satu tantangan mengingat dinamika masyarakat yang terus berkembang, misalnya, terkait dengan fungsi agama, khususnya dalam pemberian bantuan untuk tempat atau rumah ibadah.

Terkait bantuan, setidaknya memerlukan dua kesepahaman sekaligus, pertama; Kementerian Agama sebagai aparatur negara yang harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan pemenuhan Standar Operasional Prosedur [SOP]. Sementara masyarakat yang mendapatkan bantuan juga harus memenuhi pertanggungjawaban dengan baik dan benar.

Dalam hal ini, mitigasi yang dilakukan oleh para auditor menjadi sangat penting dengan membaca sekaligus mengetahui potensi masalah yang akan terjadi. Oleh karena itu, sebagai auditor yang memiliki tugas mitigasi, dibutuhkan lima karakter yang diambil dari teladan para sufi.

Pertama adalah keterbukaan, seorang sufi ketika mengajarkan kepada muridnya selalu terbuka. Seorang

mursyid, akan menjelaskan ajarannya, siapa beliau, perjalanan hidupnya dan kelebihan spiritual sebagai anugerah dari Tuhan. Ketika membedah, siapa tokoh tarekat tertentu maka si mursyid tidak pernah menutup-nutupi ajarannya. Hal ini sesuai pesan dari Abū Hasan al-Syadzilī dalam *al-Mafākhir al-'Aliyah fi l-Ma'atsir al-Syādziliyyah*, yakni: *an-ya'rifa mabniya tariqati syaikhihi* [mengetahui detail ajaran tarekat dari calon guru], sehingga seseorang yang mendapatkan tugas sebagai guru tarekat/mursyid dituntut untuk terbuka di dalam memberikan penjelasan terkait ajaran tarekat tersebut.

Kedua, rasional, di dalam memaknai perjalanan spiritual seorang sufi, maka akal sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam menerima ajaran agama, tetap memiliki peran penting. Meski dalam dunia tasawuf dimensi yang dikedepankan adalah rasa, namun akal dan rasionalitas tetap penting untuk membedakan penglihatan batin di level tertentu, apakah betul itu mata batin yang mulai terbuka, ataukah godaan dari syaitan. Godaan syaitan lumrah untuk memperdaya pelaku sufi, agar berhenti dan berpuas diri ketika diperlihatkan kepadanya sesuatu yang sifatnya non-indrawi.

Seorang auditor yang mengedepankan nalar, ketika melakukan audit, mitigasi, harus mengedepankan rasionalitas. Ketika ada permasalahan, maka yang dicari adalah sebab masalah, bukan semata-mata menyalahkan. Misalkan saja, ada potensi temuan pada bantuan Madrasah, seorang auditor harus mencari masalah mengapa ada temuan, apa ada unsur kesengajaan atau karena ketidaktahuan atau kondisi lain

seperti petunjuk teknis [juknis] yang datang terlambat atau ada kondisi lain.

Misal ada persoalan di Madrasah swasta, yang sebagian dari mereka masih mengandalkan dana BOS. Dalam Juknis disebutkan dana BOS mestinya untuk gaji guru honorer, namun faktanya sarana prasarana gedung belum memadai, lalu digunakanlah dana BOS tersebut untuk membangun gedung, ini menyalahi Juknis yang ada.

Dalam hal ini, seorang auditor disini tidak boleh kaku, hanya melihat hitam putih, tanpa melihat sebab penggunaan dana BOS tersebut, dengan mengedepankan rasionalitas, padahal yang dilakukan itu baik, karena untuk melengkapi sarana prasarana Madrasah. Disinilah mitigasi yang dilakukan oleh auditor, bukan memberikan rekomendasi hukuman.

Auditor memiliki tugas agar peran auditi tidak melakukan penyimpangan, atau penyimpangan tidak makin besar dalam suatu instansi/Kementerian, dengan memberikan rambu-rambu yang lebih proporsional. Seorang auditor seharusnya membuka ruang dan mau berdiskusi dengan satuan kerja (Satker), mengingat latar belakang seorang auditor itu bermacam-macam, dan yang di audit juga bermacam-macam, ada kantor Kemenag, Madrasah negeri, Perguruan Tinggi negeri, balai litbang dan diklat serta UPT.

Selanjutnya **ketiga** adalah tawadhu, rendah hati. Para sufi memiliki rasa tawadhu, tidak pernah memunculkan dirinya, bahkan kebanyakan seorang sufi itu menyembunyikan dirinya, seorang sufi lebih banyak mengedepankan rasa tawadhu agar

dengan tawadhu itu memancarkan kemuliaan.

Seorang sufi ketika menguraikan tentang orang lain, senantiasa menunjukkan kelebihan orang yang sedang diuraikan. Dengan kata lain, tradisi memuji orang lain sangat dominan di kalangan kaum sufi. Memuji orang lain adalah menempatkan orang lain lebih daripada yang memuji, dan sikap seperti ini sejatinya adalah wujud nyata ketawadlu-an. Sebagai contoh adalah kalimat prosaik yang diuntai oleh Ibrahim ibn Muhammad ibn Nasirudin ibn al-Milaq ketika menyanjung Abu Hasan al-Syadzili dalam *al-Mafākhir al-'Aliyah* halaman 7, sebagai berikut:

لو قيل لي من في الارض مكمل # لقلت امامي الشاذلي ابو
الحسن

*law qīla lī man fi l-rijāli mukmilun # la-qultu imāmī
al-syādzili abū l-hasan*

*[Andai dikatakan kepadaku, siapa orang yang
sempurna # tentu aku katakan tiada lain imamku al-
syadzili abu hasan]*

Sebagai orang yang memiliki kapasitas pengetahuan di atas rata-rata, seorang auditor akan bertambah kemuliaannya jika ia memiliki sifat rendah hati, tidak merasa paling tau, dengan langsung memberikan vonis bahwa auditi itu salah. Seorang auditor belum tentu berpengalaman menjadi eksekutor, sehingga mendalami auditi untuk menggali latar belakang

munculnya masalah yang berpotensi temuan merupakan sikap dan tindakan terpuji, yang sama sekali tidak akan mengurangi kewibawaan auditor. Demikian pula di pihak auditi, jika ia memang orang yang profesional, karena mendapatkan jabatan dengan cara yang baik, maka pelaksanaan tugas auditor akan berjalan dengan baik.

Kementerian Agama akan lebih baik, jika relasi profesional antara auditor dengan auditi bisa dibangun dengan baik. Auditi melaksanakan dan mengeksekusi program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang baik disertai juknis sebagai acuan, dan auditor mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai profesionalitasnya.

Ujung tombak pengawasan terkait dengan *fraud* [penyimpangan] dan tindakan koruptif ada di Inspektorat Investigasi. Baik yang diketahui melalui aduan masyarakat ataupun dari jalur yang lain, Inspektorat Investigasi menjadi tumpuan pencari keadilan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan investigatif, mencari dan mendapatkan fakta atau *novum* yang bisa ditindaklanjuti sebagai bentuk pelanggaran disiplin ASN atau PNS sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Auditor investigasi dituntut untuk tegas dan berprinsip zero toleran ketika menemukan fakta penyimpangan, terlebih ketika menginvestigasi kasus pelanggaran terkait dengan penyalahgunaan kewenangan pejabat, tindakan koruptif, kolusif dan nepotisme. Jika auditor Inspektorat Wilayah merupakan pembina bagi mitra auditi berbasis wilayah dan

unit eselon 1 pusat, maka auditor investigasi masuk ke seluruh satker terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran, baik sifatnya administratif maupun lainnya.

Di dalam memberikan rekomendasi sanksi disiplin-pun, auditor investigasi tidak boleh memiliki *personal interest*, atau relasi individu terhadap auditi, baik suka dan empati maupun benci, karena keduanya akan mempengaruhi obyektivitas. Agar terhindar dari subyektivitas yang keterlaluan, ada baiknya mengikuti kaidah dalam Ushul Fikih, terkait dengan *jarīmah* atau asas dalam hukum pidana Islam. Disebutkan dalam satu kaidah sebagai berikut:

لان الامام لان يخطيء في العفو خير من ان يخطيء في العقوبة

li-anna l-imām la-an yukhṭia fi l-‘afwi khairun min an yukhṭia fi l-‘uqūbah

[Bagi pemimpin, lebih baik keliru di dalam memberi ampunan daripada keliru menjatuhkan hukuman].

Yang direkomendasi untuk mendapatkan sanksi disiplin adalah akibat perbuatannya yang melanggar norma dan hukum sesuai peraturan perundang-undangan dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Niat untuk menghukum adalah mengurangi dosa si pelaku, karena jika tidak diberi hukuman, perilaku jahatnya akan terus berlarut dan berdampak negatif terhadap marwah Kementerian Agama.

Keempat mampu berkolaborasi, mengingat kerja pengawasan lebih besar dan luas yang diawasi dari pada para pengawasnya. Disamping itu, auditor di Itjen Kemenag juga dibagi berdasar kelompok kerja, ada auditor keuangan, tugas dan fungsi, kepegawaian dan BMN. Semuanya harus saling berkolaborasi untuk proses *lesson learned* sesama auditor sehingga ketika mendapatkan tugas yang sifatnya lintas keahlian, para auditor tidak mengalami kesulitan berarti.

Siklus anggaran adalah siklus tahunan, semenjak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Pengawasan yang bersifat mitigatif bisa difokuskan secara bertahap di tiga tahapan tersebut. Ruang terbuka potensi ketidak-patuhan dimulai semenjak perencanaan. Dalam satuan kerja atau unit kerja, perencanaan, karena waktu yang tersedia dalam proses-proses pembahasan tidak banyak, acapkali kebiasaan “kopi tempel” dari tahun sebelumnya masih terjadi, terutama terkait belanja-belanja rutin. Padahal, setiap tahun pasti mengalami perubahan seiring dengan perubahan prioritas program. Untuk itu, fokus mitigasi menjadi signifikan di fase ini.

Kelima, pemberi pencerah. Dalam dunia tasawuf seorang *sālik*, pencari jalan kema'rifatan yang tengah berguru kepada mursyid tidak dilarang untuk berbagi pengalaman spiritualnya. Perjalanan spiritual yang dialami bisa dishare untuk menjadi bahan evaluasi, apakah *riyadah* yang dilakukan atas petunjuk mursyid sudah *on the track* atau belum. Murid tarekat yang dianggap level capaian spiritualnya telah tinggi acapkali ditugasi sebagai badal oleh mursyid, untuk bisa



membimbing murid tarekat lainnya.

Analog dengan dunia kepengawasan, relasi antara auditor dengan auditi, jamak diketahui posisinya adalah “atas-bawah”. Para auditor dengan peran mitigatif seperti diuraikan di atas, dengan berkaca pada dunia tasawuf bisa memperankan diri menjadi pembimbing “*makrifat*” bagi para auditi, dalam pengertian makrifat tentang kebenaran administratif segala bentuk pertanggungjawaban setiap program dan kegiatan.

Jika peran tersebut bisa dilakukan secara baik dan kontinyu, maka audit-audit kinerja yang dilakukan oleh semua Inspektorat Wilayah bisa memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap organisasi Kementerian Agama secara keseluruhan.

Duta Akrual Kemenag, Ciptakan Inovasi Hadirkan Solusi

Kehadiran Duta Akrual dan BMN tentu sangat penting di tengah keinginan untuk mempertahankan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagaimana yang sudah diraih oleh Kementerian Agama pada tahun-tahun sebelumnya.

Duta Akrual dan BMN Kementerian Agama posisinya sangat strategis oleh karena salah satu yang amat penting bagi program pemerintah adalah mempertanggungjawabkan keuangan negara. Setiap ASN Kemenag mestilah memahami dengan sepenuh hati bahwa salah satu kekuatan birokrasi ialah bagaimana menyerap anggaran sebesar-besarnya tetapi juga dapat dilaporkan secara akuntabel. Jangan hanya berfokus pada serapan anggaran tetapi melupakan menyusun laporan yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Keberadaan Duta Akrual di Kementerian Agama memiliki peran tidak hanya pada proses akhir penyusunan laporan keuangan, melainkan juga tugas-tugas lain yang terkait, diantaranya penyelesaian pagu minus, kesesuaian antara Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Para duta membantu pimpinan satuan kerja untuk terus memonitor dinamika dan hambatan-hambatan terkait penyusunan laporan di masing-masing satuan kerja.

Oleh karena itu, dengan dipilih dan dilantiknya 45 orang Aparatur Sipil Negara [ASN] Kementerian Agama menjadi Duta Akrual dan Duta Barang Milik Negara (BMN) periode

2019-2021, di Malang, Jawa Timur menjadi tonggak komitmen Kemenag untuk menambah jumlah duta akrual dan duta BMN.

Jumlah duta akrual maupun BMN dibandingkan dengan jumlah satuan kerja Kementerian Agama tentu masih jauh dari proporsional. Namun, setidaknya, Kementerian Agama melalui Sekretariat Jenderal bukan hanya memiliki komitmen tetapi langkah kongkret untuk menyusun strategi pertahanan opini atas Laporan Keuangan Kementerian Agama. Para duta adalah aktor-aktor di belakang layar yang menjadikan laporan keuangan dan BMN Kementerian Agama akuntabel.

Dengan jumlah yang masih belum proporsional, dan terus akan diupayakan proporsional, Duta akrual dan BMN dituntut untuk terus berinovasi sehingga dapat menghadirkan solusi perbaikan bagi praktek birokrasi di Kementerian Agama dengan mencari sebuah model baru, cara baru, nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap masalah yang kita hadapi.

Inovasi dan kreativitas untuk mencari solusi menjadi kunci bagi sebuah institusi/lembaga untuk mampu bertahan dalam menghadapi perubahan zaman yang dinamis. Dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini, seluruh jajaran Kementerian Agama dituntut agar memiliki cara pandang “keluar dari Kotak nyaman”. Selain proaktif dalam melakukan inovasi dan kreativitas, setiap Duta Akrual dan BMN harus mampu bersinergi antar unit kerja, tentunya dengan tidak menghilangkan ruh Kementerian Agama. Pada prinsipnya kreatif itu mencari jalan keluar dari masalah dan bukan menciptakan masalah baru.

Bagi para duta diharapkan mampu menerapkan nilai ajaran keislaman, tentang belajar tiada henti. Nasihat terkait hal ini dikemukakan oleh ulama besar Nusantara, Nawawi al-Bantani, dalam buku penjelasan/syarah terhadap *Sullam al-Taufiq*, yang beliau beri judul *Mirqātu Su'ūdi t-Taṣdīq*, sebagai berikut:

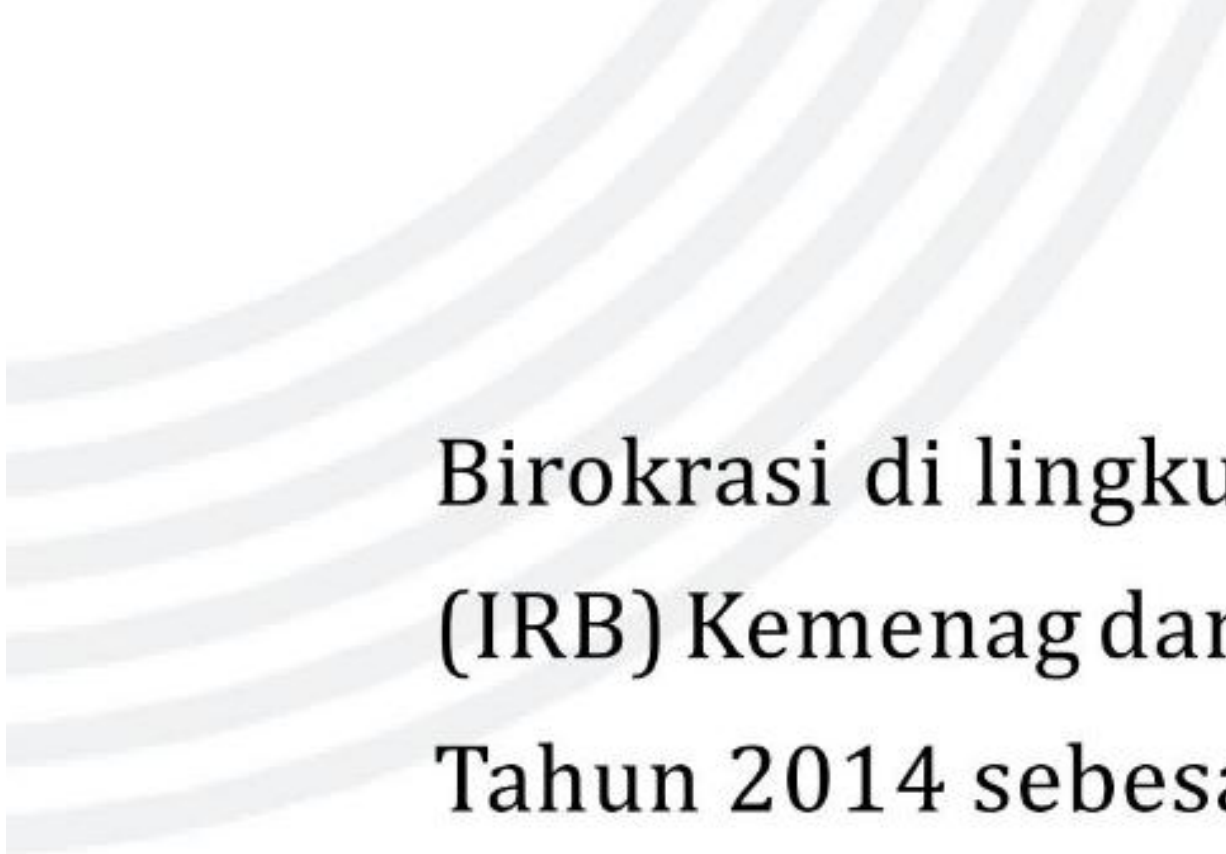
فهذا جزء لطيف يسره الله تعالى فيما يجب تعلمه وتعليمه
والعمل به للعام والخاص

*fa-hādzā juz'un laṭīfun yassarhu llāhu ta'ālā fīmā
yajibu ta'allumuhu wa-ta'līmuḥu wa l-'amalu bihī li
l-'āmi wa l-khāṣi*

*[ini adalah buku yang sederhana, mudah-mudahan
Tuhan memberikan kemudahan bagi kewajiban untuk
mempelajari, mengajarkan dan mengamalkannya
bagi orang umum dan khusus]*

Nawawi al-Bantani memberikan uraian dalam buku tersebut bahwa terdapat tiga kewajiban seseorang terhadap ilmu pengetahuan, yakni mempelajari, mengajarkan kepada orang lain dan mengimplementasikan dalam kehidupan. Dus, pengetahuan tidak cukup dipelajari untuk dirinya sendiri, melainkan juga diajarkan kepada orang lain, sekaligus diimplementasikan.

Disamping terkait langsung dengan laporan keuangan dan BMN, keberadaan Duta Akrual dan BMN diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan terlaksananya Reformasi



Birokrasi di lingkungan Kemenag. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kemenag dari periode tahun 2014 - 2019 terus meningkat. Tahun 2014 sebesar 54,83 (CC); tahun 2015 sebesar 62,28 (B); tahun 2016 sebesar 69,14 (B); tahun 2017 sebesar 73,27 (BB) dan tahun 2018 sebesar 74,02 (BB).

Salah satu pendukung naiknya nilai RB dan tunjangan kinerja Kementerian Agama yang signifikan yaitu opini LKKA Kemenag yang mendapatkan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berturut-turut dari tahun 2016-2018.

Untuk itu, pengalaman para Duta Akrual dan BMN dalam memperkuat Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Agama, dengan mengambil pelajaran dari nasihat Nawawi al-Bantani diharapkan menjadi vitamin segar bagi Kementerian Agama yang lebih baik di masa-masa mendatang.

Pranata Humas dan Hoax Kaum Anshor

Hubungan Masyarakat sebagai bagian dari Biro di Sekretariat Jenderal dimaksudkan untuk membangun komunikasi timbal balik dengan publik. Pranata Humas yang memiliki fungsi penting dalam desiminasi informasi khususnya pembangunan bidang agama dan pendidikan sebagai tugas dan fungsi layanan Kementerian.

Dalam perjalanan panjang berdirinya Kementerian Agama, pada tahun 2019, untuk pertama kalinya, sebanyak 83 pejabat Fungsional Pranata Humas baik pusat maupun daerah dikukuhkan. Pranata Humas sebagai jabatan fungsional disamping perannya yang memang strategis, juga perhatian negara terhadap fungsi kehumasan menemukan signifikansinya.

Dalam kesempatan melantik ke 83 pejabat fungsional tersebut, saya menggarisbawahi peran strategis kehumasan di era disrupti sekaligus menyinggung tugas berat Humas terkait dengan maraknya hoax yang teramplifikasi di media-media sosial yang nyaris tidak kenal batas. Diperlukan kecepatan antisipatif terhadap isu-isu keagamaan yang berkembang, bukan semata-mata reaktif.

Riwayat tentang berita yang hoax banyak ditemukan pula dalam peradaban masa lalu. Sebagai contoh adalah kesalahpahaman sahabat kepada Rasulullah saat fathu Makkah, sekitar tahun ke delapan Hijriyah. Kisah sebagai contoh tersebut ditemukan dalam buku *Hilyatu l-Auliyā wa Tabaqatu l-Aṣfiyā'*, karya Abu Nu'aim al-Isfahani, sebagai berikut;

Ketika Rasulullah berada di Makkah, orang-orang Quraish yang meskipun tidak ikut hijrah, merasa diri mereka dekat dengan Rasulullah karena satu suku. Merasa dekatnya diwujudkan dengan sering meminta apa yang dimiliki Rasulullah, sebaliknya Rasulullah juga memberikan apa saja yang diminta oleh orang-orang Quraish Makkah seperti uang, makanan, baju, sorban, bahkan kambing dan unta. Sementara para sahabat Anshor justru merasa agak jauh, karena Rasulullah banyak dikelilingi oleh orang-orang Quraish Makkah.

Rupanya salah satu sahabat Anshor, Sa'ad bin Ubadah, karena merasakan desas desus yang semakin kuat seolah sahabat Anshor jauh dari Rasul dan seolah Rasul lebih dekat dengan kaum Qurash, dan berpotensi fitnah [hoax], mengadu kepada Rasulullah yang lantas Rasulullah memintanya untuk mengumpulkan seluruh sahabat Anshor.

Suatu waktu semua sahabat Anshor dikumpulkan dalam suatu tempat, dan atas perintah Rasulullah, tidak boleh ada orang lain, semua yang berkumpul adalah Anshor. Kepada kaum Anshor Rasulullah mengatakan sbb:

الا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة والبعير
وانتم ترجعون الى رحالكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

*alā tarḍauna yā ma'syara l-anshāri an yadzhaba
al-nāsu bi l-syāti wa l-ba'īri wa-antum tarji 'ūna ilā
rihālikum ma'a rasūlillāhi*

[wahai kaum anshar, apakah kalian tidak rela,

jika orang-orang Quraish pergi dari ku membawa kambing dan onta, sementara kalian nanti akan pulang kembali bersamaku alias membawaku seutuhnya]

Kalimat Rasulullah menjelaskan kepada Anshar, bahwa Quraish Mekkah hanya butuh harta benda Nabi, tetapi tidak membutuhkan beliau, sementara kaum Anshar memiliki Nabi seutuhnya. Implisit di dalam penjelasan selanjutnya dipahami, bahwa Nabi memberikan perbandingan kualitas, mana yang lebih berkualitas orang yang akan diikuti Rasulullah sampai akhir hayat dibandingkan dengan orang-orang yang hanya memerlukan harta benda Nabi.

Kalimat Rasulullah sekaligus juga merupakan tabayyun kepada Anshar, dan berikutnya Anshar menangis menyesali su'udzon mereka dan hoax-hoax yang ditimbulkan akibat kesalah-pahaman mereka terhadap Rasulullah memperlakukan Quraish Mekkah.

Peran yang diambil oleh Sa'ad ibn Ubadah bisa menjadi teladan positif fungsi kehumasan. Banyak hal-hal positif yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Kementerian Agama, hanya tidak terinfokan dengan baik ke publik. Pranata Humas seharusnya mampu tampil sebagai ujung tombak terdepan untuk amplifikasi pemberitaan yang mencerahkan dan mampu mengeliminasi pemberitaan miring terkait kinerja Kementerian Agama.

Disamping itu, Humas juga harus bisa memfasilitasi serta


meng-amplifikasi informasi ke ruang-ruang publik secara jernih. Di tengah perkembangan isu akhir-akhir ini, seperti banyaknya hoax yang mengganggu kedamaian, kenyamanan dan ketenangan, Humas beserta ASN Kemenag semestinya tampil ke depan untuk menetralsir keadaan.

Humas banyak mensosialisasikan ke segenap ASN Kemenag untuk bijak dalam menggunakan bajet, yakni dengan berprinsip 3 S [saring sebelum sharing]. Untuk itu setiap informasi yang diterima, karena belum tentu benar dan baik, dan bisa jadi itu informasi adalah hoax, terlebih dahulu diteliti kebenarannya.

Langkah 3 S sederhananya sebagai berikut. Pertama, info yang diterima, lakukan dulu verifikasi untuk memastikan apakah info tersebut benar adanya. Kedua, lihat dulu, apakah info yang telah diverifikasi punya manfaat untuk publik atau tidak. Jika langkah pertama dan kedua jawabannya adalah iya, maka silahkan di-share kepada jejaring yang dimiliki.

Sebaliknya, jika langkah pertama dan kedua jawabannya adalah negatif, maka sebaiknya info yang didapatkan tersebut langsung di-*delete*, sehingga tidak menyebar ke jejaring yang lebih luas. Jangan sampai Humas dan ASN Kemenag juga turut menjadi penyebar berita bohong.

Sikap responsif dan antisipatif perlu lebih dikedepankan, agar proses penyebarluasan informasi tidak terkesan reaktif atas *issu* yang sedang diviralkan karena kepentingan-kepentingan tertentu. Tugas Humas, memang lebih menantang, tetapi dengan bekal nilai keislaman seperti yang dicontohkan dalam hoax kaum Anshar akan menjadikan Humas lebih



optimal, mampu menyuguhkan informasi yang lebih *maknyus*,
lebih sehat, dan bekerja yang lebih cepat.

Bimwin dan Tantangan Kekinian

Meningkatnya kasus perceraian dalam beberapa tahun terakhir di beberapa wilayah di Indonesia, demikian pula masih banyaknya angka *stunting* mendorong Kemenag untuk menggalakkan kegiatan bimbingan perkawinan atau biasa disingkat dengan bimwin.

Bimbingan perkawinan diperuntukkan bagi calon pengantin. Program ini didesain untuk memberikan wawasan yang memadai tentang sakralitas pernikahan dan aspek-aspek terkait dengan membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Kementerian Agama melalui Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sejak tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan tersebut. Semula, program ini sudah dilaksanakan dengan nama kursus calon pengantin [*suscatin*]. Pelaksanaannya berada di KUA Kecamatan dan penanggungjawabnya adalah Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Semula materi utama dari bimbingan perkawinan adalah penguatan perspektif keislaman yang kental. Tentang sakralitas pernikahan, termasuk dimensi-dimensi ibadah lain yang terkait dengan dunia pernikahan. Diantaranya hak dan kewajiban suami dan istri, membangun keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, serta hal-hal lain yang dimaksudkan untuk memperkuat bangunan rumah tangga sekaligusantisipasi jangansampai pernikahan tersebut tidak terawat dengan

baik yang mengakibatkan perceraian.

Sejak tahun 2018, materi bimbingan perkawinan diperkaya sekaligus di *update* metodologi penyampaiannya. Misal, dari sisi filosofi dasar, pernikahan dalam konteks agama bukan hanya sesuatu yang sakral melainkan menjadi faktor penentu lahirnya sebuah keluarga yang sehat dan harmonis. Materi-materi keislamannya dipadukan dan diperkaya dengan psikologi, kesehatan reproduksi, kesehatan keuangan rumah tangga serta wawasan tentang bahaya akibat perceraian.

Animo calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan semakin besar. Kementerian Agama bertanggungjawab untuk senantiasa meng-*update* konten bimbingan sekaligus metode penyampaian agar lebih menarik dan mengundang calon pengantin mendalami materi yang disampaikan. Selain pertemuan dalam kegiatan yang didesain selama dua hari, Kemenag juga menerbitkan modul dan bahan-bahan bacaan terkait, agar calon pengantin bisa mempelajari sendiri setelah mengikuti bimbingan yang waktunya terbatas.

Meningkatnya angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir penting untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi, apakah benar tengah terjadi proses desakralisasi pernikahan? Sekilas orang melihat prosesi ijab kabul dalam upacara pernikahan begitu sederhana, apabila seseorang tersebut tidak mendalami fikih munakahat. Oleh karenanya, keterlibatan Balitbang Diklat Kemenag sebagai "*back office*" [dapur pemberi saran kebijakan dari hasil riset] menjadi sangat penting. Apa saja yang menjadi faktor determinan meningkatnya angka perceraian, apakah

faktor ekonomi, atau jangan-jangan pasangan suami istri tidak menghayati dengan sepenuhnya arti sebuah ikatan suci, *mītsāq ghalīdza* dalam rumah tangga.

Untuk itu, disamping fakta bahwa program bimbingan perkawinan menarik animo calon pengantin yang semakin besar juga menarik perhatian Kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK, Kementerian Agama dituntut untuk selalu mampu melakukan *upgrading* dan revitalisasi program ini disesuaikan dengan tantangan kekinian. Oleh karenanya, sejak 2019, materi bimbingan perkawinan semakin dimantapkan dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait. Bahkan, ketika di sebagian wilayah Indonesia mengalami *stunting*, program bimbingan perkawinan dijadikan sebagai salah satu sosialisasi bahaya *stunting*.

Di tengah program yang bagus seperti ini, kendala masih ditemukan, yakni keterbatasan anggaran, karena di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, anggaran yang teralokasikan adalah anggaran fungsi agama. Disamping adanya kecenderungan dalam dua tahun terakhir, anggaran fungsi agama semakin mengecil, pada saat yang bersamaan, program strategis seperti bimbingan perkawinan memerlukan dukungan anggaran yang lebih memadai.

Diperlukan upaya bersama untuk memastikan bahwa ketika sebuah program memiliki nilai manfaat yang begitu besar dan positif, maka harus ada keberpihakan negara untuk mendukung dengan alokasi yang mencukupi, agar program bisa berjalan dengan lebih baik di masa-masa mendatang.

TIK Kemenag; Rumah Kreatif Sebarkan Informasi

Bagian Teknologi Informasi pada Biro Humas Data dan Informasi diharapkan bisa menjadi rumah yang dapat mewadahi kreativitas penyebaran informasi program dan kegiatan Kementerian Agama. Bagian ini bisa menjadi wadah kreativitas Aparatur Sipil Negara [ASN] pusat untuk menggiring tim-tim di daerah untuk bisa maksimal mendiseminasi informasi tentang Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan di Indonesia.

Perubahan terus terjadi, bahkan era disrupsi sekarang ini mampu meruntuhkan kemapanan dan kenyamanan. Perubahan dalam pola sebaran informasi yang berdampak pada pergeseran paradigma berfikir, strategi konten, dan strategi jangkauan mengharuskan insan di bagian teknologi informasi mampu mengadaptasikan diri.

Untuk itu, khususnya ASN pada bagian Humas dan TIK harus menghidupkan sikap tidak reaktif, gumunan dan kaget dalam menyikapi era disrupsi. Sebaliknya ASN di bagian ini harus proaktif, sekaligus antisipatif agar mampu melihat tanda perubahan zaman.

Sepuluh atau dua puluh tahun lalu, saluran informasi didominasi media cetak atau koran. Meski sudah ada stasiun televisi, namun belum fokus pada berita. Info peradaban saat itu masih didominasi koran. Banyak orang berebut untuk menjadikan dirinya sebagai narasumber, sementara, sekarang, kondisinya berbalik, awak media yang justru banyak mengejar narasumber.

Menghadapi situasi terkini, setidaknya Kemenag perlu melakukan tiga hal penting. Pertama, revitalisasi piranti, kedua, pengembangan dan *upgrading* SDM TIK, dan ketiga optimalisasi jejaring pusat dan daerah.

Revitalisasi piranti tentu terkait dengan kekuatan jaringan TIK, dan ini merupakan bagian dari belanja rutin perkantoran. Kecepatan dan kekuatan jaringan menjadi sebuah keniscayaan karena besarnya data yang dikelola oleh Kementerian Agama, baik data keagamaan maupun data Pendidikan Keagamaan. SDM di bagian ini tentu yang lebih tahu dan bisa mengukur seberapa besar dan kuat jaringan yang dimiliki untuk mendukung jejaring kanal informasi.

Kedua, terkait dengan SDM, semestinya yang diberi tugas di bagian ini adalah mereka-mereka yang senantiasa *update* dengan teknologi informasi. Literasi terhadap piranti-piranti TI menjadi prasyarat utama penugasan mereka di bagian tersebut. Program-program pelatihan, pendidikan lanjut, kursus pendek terkait tugas-tugas olah data dan yang terkait menjadi prioritas untuk selalu dilakukan pada setiap tahun anggaran.

Ketiga, optimalisasi jejaring pusat dan daerah bisa menempuh beberapa strategi. Diantaranya pembagian peruntukan untuk laman resmi Kemenag antara pusat dan daerah. Laman Kementerian Agama fokus untuk kanal informasi resmi, sementara laman-laman unit eselon I pusat cukup fokus pada penguatan layanan. Sementara, laman resmi Kemenag Provinsi juga fokus kepada layanan masyarakat tidak perlu membuat saluran pemberitaan.

Sebagai instansi vertikal, Kementerian Agama mampu membuat kebijakan informasi satu pintu yang di amplifikasi oleh seluruh jajaran pusat dan daerah. Mestinya, dengan rentang kendali satu pintu tersebut, strategi komunikasi publik terkait dengan program Kemenag bisa terinformasikan optimal kepada masyarakat.

Tantangannya adalah, menghadapi kemas-kemas pemberitaan yang sering kali teramplifikasi di media sosial. Banyak pemberitaan di media sosial yang merupakan hasil olahan dan “gorengan”.

Masyarakat modern bisa dianalogkan sebagai masyarakat yang *smart* dan gemar hidup sehat. Salah satu pola hidup sehat yang dibiasakan oleh masyarakat sekarang adalah mulai mengurangi bahkan diet dengan tidak mengonsumsi gorengan.

Kondisi yang seperti ini tentunya menjadi poin positif tersendiri bagi Kemenag untuk memperbanyak informasi yang sifatnya “rebusan” sebagai tandingan pemberitaan yang kebanyakan merupakan “gorengan”.

Semakin banyak konten informasi yang merupakan hasil “rebusan” yakinlah, masyarakat yang *smart* dan berpola hidup sehat tentunya akan lebih banyak memilih menu-menu “rebusan” ketimbang “gorengan” yang banyak mengandung sumber-sumber penyakit.

“

Lima indikator sebagai pijakan bagaimana implementasi moderasi ber-Islam. Yaitu; terbuka; mengedepankan nalar kritis; menyadari keterbatasan diri; tawadlu' dan berfikir untuk kemanusiaan





BAB III

Dirasah Islamiyah

UU Pesantren, Kado Spesial Kemenag

Hari Santri tahun 2019 sepatutnya harus disyukuri sebab Kementerian Agama mendapatkan “kado spesial”, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren sudah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR pada tanggal 24 September 2019 lalu.

Hadirnya UU tentang Pesantren adalah ikhtiar negara dalam mengapresiasi kontribusi Pesantren untuk bangsa dan negara Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Pesantren sudah lebih dulu ada dan berkembang dengan kemandirian dan khazanahnya. Apalagi dalam sejarahnya, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan terutama pembangunan sumber daya masyarakat.

Dalam hal ini, UU tentang Pesantren hadir untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan

fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, yang mana diperlukan pengaturan untuk memberikan pengakuan [rekognisi], afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan kekhasannya.

Tema hari santri 2019 adalah Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia. Tema ini dipilih mengingat perdamaian merupakan kebutuhan global. Tidak ada satupun penduduk bumi yang menghendaki konflik dan perang. Disamping itu, kaum santri juga erat dengan nilai-nilai kedamaian, mengingat salah satu budaya yang ditumbuh-kembangkan dalam dunia Pesantren adalah respek, melalui kebiasaan menghargai perbedaan pendapat.

Ajaran klasik dalam Ushul Fikih, sebuah keilmuan khas Pesantren, menumbuh-kembangkan teguh memegang pendapat yang diyakini, sekaligus menghargai pendapat lain yang berbeda. Dalam ranah ijtihad, misalnya, hasil ijtihad seorang ulama/ ilmuwan tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad lain, yang populer disebut dalam kaidah berbunyi:

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

Al-ijtihādu lā yanqīḍu bi-l-ijtihādi

[ijtihad tidak bisa dirusak/dibatalkan oleh ijtihad yang lainnya]

Respek, menghargai pendapat orang lain adalah salah satu dari sikap utama dalam etika global. Tanpa respek perjumpaan

antar negara-bangsa, antar peradaban dan antar golongan tidak mungkin bisa diwujudkan. Respek menjadi dasar perlakuan setara sesama umat manusia, di tengah-tengah perbedaan dan keragaman dari berbagai sisi.

Pembiasaan menghargai orang lain yang menjadi salah satu pilar kehidupan yang damai di tengah keragaman, telah dipraktekkan dengan baik oleh kaum santri. Mereka bukan hanya berteori dengan apa itu damai dan bagaimana mewujudkan, melainkan mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karenanya, santri untuk perdamaian dunia sebagai tema hari santri 2019 menemukan relevansinya.

Kado istimewa tentang Undang-Undang Pesantren, di mana Pesantren dilihat dari tiga aspek sekaligus, sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga dakwah dan lembaga pemberdaya masyarakat. Ketiga merupakan entitas yang saling terkait, tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Sebagai lembaga pendidikan, Pesantren bisa dilihat sebagai penyelenggara pendidikan yang membawahi satuan pendidikan formal dari Paud, Dasar Menengah dan Pendidikan Tinggi, juga sebagai satuan pendidikan itu sendiri, yakni tempat para santri menimba ilmu-ilmu keislaman melalui Madrasah Diniyah dan kajian-kajian kitab kuning khas Pesantren.


Semenjak awal, Pesantren disamping dijadikan sebagai kaderisasi keilmuan ulama juga sebagai tempat penempatan para da'i. Keilmuan keislaman yang dipelajari di Pesantren dijadikan sebagai bahan para alumni nantinya untuk mengembangkan ilmu dengan berdakwah di tengah-tengah

masyarakat. Oleh karenanya, tidak mengherankan, para alumni Pesantren memiliki jejaring yang kuat dan erat, karena sama-sama memiliki panggilan tugas untuk berdakwah, mengabdikan diri kepada agama Allah.

Untuk itu, ketika Undang-Undang Pesantren menempatkan Pesantren sebagai lembaga dakwah sangatlah tepat dan memiliki sisi historis yang sangat kuat. Dakwah adalah diseminasi, sementara konten yang akan didiseminasikan sudah seharusnya selalu *update* dan memiliki rujukan dan *sanad* keilmuan yang jelas. Dan tempat untuk menggaransi *sanad* dan rujukan keilmuan yang otoritatif adalah ulama dan Pesantren.

Pesantren juga memiliki historis kuat sebagai basis pengembangan masyarakat. Di masa revolusi fisik sebelum kemerdekaan, Pesantren juga menjadi basis kekuatan umat melawan penjajah. Perumusan strategi perjuangan, filantropi logistik serta berbagai pengembangan untuk kemandirian umat, tidak kooperatif dengan penjajah, banyak dilakukan oleh ulama-ulama Pesantren dengan para santrinya. Pengembangan masyarakat telah dilakukan dengan berbagai sudut pandang, apakah kemandirian usaha, pengembangan pertanian dan perkebunan, jejaring pemasaran produk dan hal lain yang terkait pengembangan ekonomi umat.

Untuk itu, ketika Undang-Undang Pesantren juga mengakomodir Pesantren sebagai pengembangan masyarakat, tentunya memiliki relevansi yang sangat signifikan. Baik sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah maupun sebagai



pengembangan masyarakat, Pesantren menemukan jati dirinya sebagai institusi yang tidak lekang oleh zaman. Sebaliknya ia terus relevan selaras dengan dinamika tantangan zamannya.

Berikutnya tentu menjadi tantangan bagi pemerintah dan komunitas Pesantren itu sendiri, bagaimana tiga fungsi tersebut bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih optimal di masa-masa mendatang. Yang pasti, dengan UU Pesantren, Pesantren akan semakin mendapatkan perhatian dari negara sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengembangan peradaban Indonesia di masa mendatang. Akhirnya, Selamat Hari Santri 2019.



Hari Santri 2019
Seribu Cahaya Santri
untuk Perdamaian Dunia

22 Oktober



Pesan Perdamaian di Puncak Hari Santri 2019

Malam Puncak Hari Santri, tanggal 22 Oktober 2019 diperingati dengan gelar acara yang bertajuk “Syiar dan Syair Perdamaian”. Tema ini dipilih untuk menggelorakan pesan-pesan perdamaian melalui syiar dan syair yang bersumber dari khazanah dan kekhasan kaum pesantren. Saat sekarang, penting bagi umat Islam Indonesia untuk menggaungkan syiar damai dalam setiap dakwah dan kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan masyarakat banyak.

Syiar damai dimaksudkan untuk mengedepankan bahwa Islam adalah inspirasi bukan semata-mata aspirasi, Islam sebagai rahmat bukan untuk melaknat dan Islam sebagai spirit kemajuan, bukan batu sandung yang menyebabkan kemunduran. Demikian pula, Islam sebagai wadah persatuan, bukan ajang untuk permusuhan.

Syiar tanpa syair tentulah belum lengkap, makanya melalui syair perdamaian pada malam puncak hari santri 2019, dilantunkan nada-nada dan sholawat yang dapat mendamaikan jiwa dan lubuk hati, agar insan Indonesia yang dimotori kaum santri senantiasa mampu menjaga diri, menjaga jari, menjaga lisan dan menjaga perilaku dan tindakan.

Kaum santri sebagai bagian dari Indonesia senantiasa mengedepankan sikap santun, menghargai perbedaan, anti kekerasan dan anti permusuhan atas nama apapun.

Sikap kaum santri yang seperti di atas sebenarnya merupakan hasil internalisasi budaya pesantren. Tradisi

pesantren yang mengedepankan kebersamaan, toleran, menghargai perbedaan pendapat, memiliki selera humor tinggi, cinta seni dan budaya serta banyak melakukan *problem solving* dengan cara-cara santai.

Tentang melatih untuk menghargai pendapat, pesantren punya metode pengajaran *bahsu l-masā'il* atau kelas musyawarah. Forum ini menyerupai diskusi group terfokus untuk mencari jawaban atas persoalan-persoalan keagamaan. Santri dituntut untuk membaca banyak literatur dalam memberikan jawaban. Bisa dipastikan, karena rujukan kitab fikih dan ushul fikihnya beragam, jawaban atas pertanyaan yang dimunculkan dalam forum itu juga beragam dengan dalil atau argumentasinya masing-masing. Kyai sebagai guru yang alim melatih para santri untuk mengemukakan pendapat, mempertahankannya dengan dalil yang diyakini, sekaligus mengajarkan untuk menghargai pendapat berbeda yang dilontarkan santri lainnya.

Cinta akan seni dan keindahan juga diajarkan dalam tradisi pesantren. Saat bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, santri dipastikan membaca syair-syair prosaik nan indah yang diadopsi dari beberapa literatur, dan yang paling populer adalah al-Barzanji. Pujian-pujian dan alunan cinta terhadap sang panutan menjadikan kaum santri terbiasa dengan kalimat-kalimat indah dan puitik. Demikian pula seni kaligrafi yang mengajarkan nilai estetika begitu tinggi.

Ketika kyai mengajarkan dan membacakan kitab kuning

kepada santri, banyak dimensi non akademis yang disisipkan oleh kyai. Apalagi, ketika yang dibaca adalah kitab tafsir, hadits ataupun tasawuf. Candaan-candaan ringan kyai kala memberikan penjelasan atas kitab yang dibacakan memberi bekas yang kuat kepada para santri untuk memiliki selera humor.

Humor merupakan ekspresi rasa syukur atas luasnya nikmat yang dianugerahkan Allah kepada hambanya. Salah satu pijakan yang dipakai kaum santri dalam mengembangkan selera humor adalah kalimat dalam *Ihyā' Ulūmuddin karya al-Ghazali*, sebagai berikut:

ان من خيار امتي قوما يضحكون جهرا من سعة رحمة الله
وييكون سرا من خوف عذاب الله

*inna min khiyāri ummatī qauman yaḍhakūna jahran
min sa'ati rahmati llāhi wa-yabkūna sirran min
khaufi 'adzābillāh*

[bahwa ada bagian dari ummatku yang selalu optimis, karena yakin akan luasnya kasih sayang dan rahmat Allah. Namun, di saat yang lain juga suka menangis tersedu, karena khawatir akan azab dari Tuhan].

Sastra dan seni budaya pesantren juga bisa berkembang dengan subur karena ada pelajaran 'arud, yakni bagaimana cara mengubah syair yang indah sekaligus bermakna.

Pelajaran ilmu *balaghah* di pesantren menjadi basis kaderisasi seniman lisan dan tulis di pesantren.

Banyaknya syair dalam bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, dan bahasa daerah lain yang puitik dengan nada-nada yang mengikuti nada bacaan sholawat menggambarkan suburnya sastra pesantren.

Sebagai contoh adalah syair ala nada sholawat terkait dengan pelajaran tasawuf ala pesantren, sebagai berikut:


*Kang aran soleh bagus atine # kerana mapan sari
ngelmune*

*laku toreqot lan ma'rifate # ugo haqiqat manjing
rasane*

*[disebut saleh karena hatinya mulia akibat inti ilmu
agamanya telah mapan]*

*[dilengkapi dengan tarekat dan laku ma'rifat serta
hakikat rasa telah menjiwai]*

Problem solving dengan cara sederhana juga menjadi bagian dari budaya pesantren. Para santri yang sudah senior banyak yang mempelajari pengobatan ala *Nabi, al-Tibb al-Nabawi*. Literatur yang diajarkan juga beragam sesuai dengan kelas dan kedalaman ilmunya. Dalam literatur-literatur, diantaranya yang kelasnya tinggi adalah *Manba' Usli l-Hikmah* karya Ahmad ibn Ali al-Būnī , diuraikan bahwa pengobatan tidak semata-mata untuk penyakit biologis yang disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga aspek-aspek ruhani.



Pendekatan ruhani, dalam ilmu kontemporer bisa dikaitkan psikologi atau-pun ilmu-ilmu lainnya. Pendekatan kaum santri senior dan ahli dalam dunia pengobatan mengajarkan kepada para santri *junior* akan berbagai jalan alternatif mencari solusi atas persoalan hidup kaum santri. Dan, cara yang ditempuh dalam mencari solusi tidak *njlimet* dan ilmiah, melainkan dengan cara-cara yang santai tapi solutif. Itulah santri, Hidup Santri!

Afirmasi dan Inovasi Anggaran Madrasah 2020

Rapat Koordinasi [Rakor] Madrasah telah digelar Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kementerian Agama. Rakor ini berlangsung di Yogyakarta, pada 8-10 November 2019 dan dihadiri para Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama se-Indonesia.

Beberapa point penting dalam rakor tersebut saya tekankan; *i] ketepatan perencanaan; ii] menggunakan tiga Kotak pemisah dalam perencanaan; iii] pilih yang amat prioritas dan bermanfaat; iv] ketepatan dalam mengeksekusi program yang telah dicanangkan; dan v] kesempurnaan pelaporan.*

Pertama, ketepatan dan keakuratan data untuk kepentingan perencanaan memegang kunci utama. Persoalan klasik di Kemenag terkait dengan Madrasah adalah data guru bukan PNS sekaligus keakuratan hak-hak keuangan mereka, apakah insentif, tunjangan profesi, maupun tunjangan profesi ter-inpassing. Dua tahun terakhir, persoalan terkait hal ini belum terselesaikan karena ada jarak yang cukup tajam antara data perencanaan yang dihimpun di Biro Perencanaan dengan data pendukung dari Ditjen Pendis. Untuk itu ke depan seharusnya keakuratan data pendukung dipastikan untuk menjadi pegangan ketika pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Permasalahan sering terjadi ketika Kemenag membahas

perencanaan dengan Bappenas dan Kemenkeu. Yang diajukan oleh Kemenag dan dikuatkan oleh Bappenas adalah inventarisasi kebutuhan. Namun, dalam pembahasan acapkali meleset dari yang direncanakan, karena Kemenkeu yang paling tahu dengan kondisi dan kemampuan fiskal negara. Oleh karenanya, data pendukung kebutuhan memegang peran kunci. Ketika kebutuhan untuk inpassing guru yang belum terbayar sebanyak 1 Triliun secara nasional, misalnya, kala belum bisa dipenuhi semuanya, karena data dukungnya komplet, akan bisa direncanakan penyelesaiannya dalam berapa tahun ke depan, termasuk pembayaran dari hasil re-alokasi anggaran di akhir tahun yang tidak berbeda output, mampu menutup berapa persen. Inilah yang dimaksud dengan arti penting data dukung tadi.

Kedua, dalam perencanaan pisahkan tiga Kotak, yakni Kotak afirmasi; Kotak dekonstruksi; dan Kotak inovasi. Untuk afirmasi mencakup semua program tahunan yang harus selalu ada, misalnya: belanja pegawai, baik gaji maupun tunjangan dan belanja barang operasional lainnya. Hal ini sangat mudah, mengingat belanja negara/APBN hanya ada tiga kategori, belanja rutin, belanja barang operasional dan terakhir belanja barang *non-operasional*.

Berikutnya adalah Kotak dekonstruksi. Pengertiannya, program merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, masih diperlukan karena penting, perlu dilakukan penajaman, perbaikan dan sofistikasi. Program tentang pemberdayaan guru begitu banyak. Dari mulai pendidikan lanjut, *short*

course, upgrading, peningkatan mutu pembelajaran dan lain-lain. Inventarisir program apa saja yang sudah dilaksanakan dan memerlukan keberlanjutan dengan bentuk, durasi, target group yang perlu diubah dan seterusnya. Tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan kemampuan para guru untuk mampu beradaptasi dan mengantisipasi tantangan dunia pendidikan yang makin kompleks. Dengan kata lain, dekonstruksi berisi perbaikan atas program-program yang sudah berjalan dan dianggap penting, yakni perbaikan bentuk kegiatannya, yang kedua efisiensi dan efektifitasnya.

Kotak inovasi adalah usulan-usulan program yang belum pernah ada di tahun sebelumnya. Sifat dari inovasi adalah hal yang baru dan diperlukan untuk memberikan warna bagi program-program prioritas. Untuk para guru, diperlukan banyak program inovatif agar mereka termotivasi untuk mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran, bahkan melakukan riset-riset tentang pembelajaran dan hal terkait.

Ketiga, rumus dalam perencanaan di tengah kemampuan fiskal yang terbatas adalah menetapkan program yang sangat prioritas. Prioritas dan tidaknya usulan program bisa diukur urgensinya dengan hasil yang diharapkan. Sebagai contoh, Pemerintah mencanangkan Pendidikan Profesi Guru [PPG], *updating* dari program sebelumnya, Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru [PLPG]. Program pendukung PPG menjadi sangat prioritas untuk masuk dalam perencanaan yang matang. Jika program pendukung tidak dianggarkan, PPG terancam tidak berjalan dengan sukses.

Logika memilih prioritas seperti dicontohkan di atas sejalan dengan ilustrasi kajian keislaman dalam bidang ilmu *nahwu*. Ilmu *nahwu* menempati prioritas pertama untuk dipelajari dan dikuasai, oleh karena tanpa menguasai ilmu tersebut, ujaran dalam bahasa Arab tidak akan bisa difahami. Selengkapnya sebagai berikut:

والنحو اولى اولا ان يعلم # اذ الكلام دونه لن يفهم

wa-l-nahwu awlā awwalan an yu'lama # idz al-kalāmu dūnahu lan yufhama
[nahwu adalah ilmu prioritas pertama yang harus dikuasai, karena tanpa-nya kalam tidak bisa difahami]

Keempat, eksekusi program sesuai dengan yang telah direncanakan. Pelaksanaan program akan berjalan efektif dan efisien apabila telah direncanakan dengan matang. Oleh karenanya, agar Direktorat GTK membiasakan memiliki jadwal kegiatan yang bisa menjadi acuan bersama.

Direktorat GTK menjadi imam bagi pelaksanaan seluruh program guru Madrasah se-Indonesia, oleh karenanya dengan jadwal yang sudah tersusun untuk satu tahun kegiatan, bisa menjadi acuan bagi daerah, mana kegiatan yang pelaksanaannya diorganisir oleh Direktorat dari pusat, dan mana yang akan dieksekusi oleh masing-masing Kepala Bidang Madrasah/Pendis dan Kepala Seksi di masing-masing Provinsi

dan Kabupaten/Kota.

Jika jadwal tersusun dengan baik, pusat dan daerah bisa menjadikan acuan kegiatan, maka target-target yang telah disusun dalam perencanaan program dan anggaran akan mudah dicapai. Sebaliknya, jika tidak ada acuan bersama, acapkali program tidak berjalan maksimal, dan dampaknya tentu kurang baik bagi performa Kemenag secara umum.

Kelima, pelaporan yang baik. Kemenag memiliki tanggung jawab tidak ringan dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Pertanggungjawaban program yang baik tidak disusun semua di akhir, melainkan setiap selesai program tersebut, maka laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangannya segera diselesaikan.

Setiap laporan keuangan yang telah disajikan, sebelum diserahkan secara keseluruhan oleh Kemenag kepada BKP terlebih dahulu akan *direview* oleh Inspektorat Jenderal. Ketepatan waktu penyusunan laporan sangat membantu tim Itjen untuk memastikan bahwa laporan keuangan Kemenag yang sifatnya *un-audited* [belum diaudit BPK] memang telah layak sesuai standar akuntansi pemerintah untuk diserahkan ke BPK. Dengan ritme yang seperti, kiranya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK tiap tahun bisa dilakukan dengan baik oleh Kemenag.

Lima Mapel Keislaman di Madrasah

Ada lima mata pelajaran keislaman di Madrasah, yakni al-Quran Hadis, Fiqih, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Kelimanya adalah ekstrak dari kajian keislaman atau yang biasa disebut dengan *al-dirāsah al-islāmiyyah*. Keilmuan keislaman bisa dilihat dari tiga sudut pandang; sebagai rumpun ilmu, bidang ilmu dan spesialisasi ilmu.

Sebagai rumpun ilmu, keilmuan keislaman berhubungan satu sama lain secara erat, dan tidak bisa dipisahkan. Mengajarkan al-Qur'an dan Hadis, misalnya, maka aspek akidah, fiqih dan akhlak yang terkandung dalam keduanya tidak bisa dilupakan.

Demikian pula sebaliknya, ketika akhlak sedang diajarkan, maka al-Quran dan Hadis juga disebut sebagai sumber rujukan adanya akhlak. Juga ketika akidah diajarkan, maka tidak bisa melupakan al-Qur'an demikian pula hadis-nya. Kajian keislaman sebagai rumpun ilmu seperti ini-lah yang diajarkan di satuan pendidikan dasar dan menengah di Madrasah.

Sebagai bidang ilmu, keilmuan keislaman ditempatkan secara akademis dalam kajian di Strata Satu Perguruan Tinggi Keislaman. Bidang-bidang ilmu ini biasanya dikelompokkan berbasis Fakultas dan Program Studi. Dalam pembidangan ilmu seperti ini, pengelompokan ilmu mulai diperkenalkan; yakni kelompok ilmu utama, kelompok ilmu pendukung dan kelompok ilmu pilihan keahlian.

Sebagai contoh adalah Fakultas Syari'ah. Bidang ilmu yang diperdalam adalah yang terkait dengan hukum Islam, pranata sosial Islam dari sumber aslinya, al-Qur'an dan al-Sunnah, serta pemikiran-pemikiran yang berkembang terkait dengannya.

Kelompok ilmu utama di Fakultas Syariah diantaranya al-Qur'an, Ulumul Qur'an, Hadis, Ulumul Hadis, Ushul Fikih, Fikih, Bahasa Arab. Kelompok ilmu pendukung, diantaranya: Filsafat Hukum Islam, Kaidah-Kaidah Fikih, Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum. Sedangkan kelompok pilihan keahlian diantaranya: Fikih Perbandingan [Perbandingan Madzhab], Membaca Kitab Fikih, Metodologi Riset.

Sedangkan sebagai spesialisasi ilmu, ia dijadikan sebagai area spesialisasi keilmuan di Strata Dua dan Strata Tiga pada Perguruan Tinggi Keislaman. Area spesialisasi ini menjadikan Kajian Keislaman menjadi sesuatu yang dinamis, menjadi obyek penelitian para ilmuwan yang tak mengenal habis.

Riset dalam Kajian Keislaman mengenal dua istilah, yaitu *i] yang tetap; dan ii] yang berubah*. Yang tetap adalah sumber-sumber keislaman, al-Qur'an, Hadis, teks-nya tetap dan selamanya tetap, sementara yang berubah adalah pemahaan atas teks tersebut. Pemahaman dan tafsir atas kedua teks tersebut senantiasa berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan dan peradaban umat manusia.

Kembali kepada Madrasah, lima mata pelajaran diajarkan kepada peserta didik dengan tujuan filosofis sebagai berikut: **Pertama, al-Quran Hadis**. Mata pelajaran ini mengenalkan

sumber segala sumber kebenaran dalam pandangan ajaran Islam. Sumber otoritatif dalam ber-Islam adalah kedua hal tersebut. Penanaman al-Qur'an-Hadis sebagai sumber kebenaran dalam Islam sejak dini dimaksudkan untuk memperkokoh fondasi keislaman peserta didik di Madrasah. Disamping memperkokoh, juga dimaksudkan untuk menanamkan kecintaan kepada al-Qur'an dan Hadis, sehingga diharapkan mereka di kemudian hari tidak melupakan esensi sumber ajaran Islam.

Kedua, Fikih. Ini merupakan mata pelajaran yang mengajarkan intelektualitas, kreativitas dan keberanian berpikir. Mata pelajaran Fikih merupakan pintu masuk pengenalan metodologi berfikir yang biasa disebut dengan *Ushul Fikih*. Fikih juga mengajarkan toleransi dan menghargai pendapat. Karena dalam fikih tidak bisa dielakkan adanya perbedaan pendapat. Fikih menanamkan sikap untuk respek terhadap keragaman.

Respek terhadap keragaman merupakan modal utama pembentukan karakter. Bangsa yang berdiri di atas keragaman membutuhkan perekat kuat agar perbedaan bukanlah ancaman kebersamaan, sebaliknya merupakan potensi untuk bisa saling mengisi dan bersaing secara sehat. Fikih yang ditanamkan sejak dini kepada peserta didik menjadikan mereka siap dengan keragaman dan perbedaan, sebagai modal besar kehidupan berbangsa dan bernegara di kemudian hari.


Ketiga, Akidah Akhlak. Mata pelajaran ini menanamkan dasar keislaman yang kokoh. Akidah sebagai dasar keimanan, dan akhlak menjadi ruh dalam ber-Islam. Tujuan jangka panjang

dari mata pelajaran ini, peserta didik memiliki keimanan yang kuat karena tertanam sejak awal, serta mengetahui kemuliaan akhlak sebagai ruh dalam beragama. Jika dikaitkan dengan keberanian berfikir dalam Fikih dan Ushul Fikih, peserta didik akan dibekali dengan keseimbangan antara semangat mencari tahu dalam dunia pengetahuan, yang dilandasi dengan Tauhid yang kokoh dan memiliki akhlak yang mulia.

Di sinilah letak keunggulan Pendidikan Islam, pendidikan yang memiliki idealisme menggabungkan antara dimensi nalar kritis dengan moral religius. Dengan nalar yang berkembang peserta didik akan menjelma menjadi generasi yang kreatif dan tangguh dengan segala tantangan yang dihadapi, pada saat yang bersamaan juga memiliki moral-keislaman yang baik untuk senantiasa tawakkal dan berserah diri kepada Tuhannya.

Keempat, Sejarah Kebudayaan Islam. Mata pelajaran ini hendak memberikan contoh. Ketika Alquran Hadis mengajarkan sumber kebenaran, Fikih dan Ushul Fikih mengajarkan intelektualitas, kreativitas dan keberanian berpikir, maka Sejarah Kebudayaan Islam menyajikan contoh kongkrit dalam teladan para tokoh di masa lalu. Bagaimana kombinasi antara intelektual dengan moral dicontohkan dan dipraktekkan dengan ideal oleh tokoh-tokoh di masa lalu.

Faktanya, dalam Sejarah Kebudayaan Islam di masa lalu praktek para ilmuwan Muslim di berbagai bidang keahlian menunjukkan teladan yang sangat positif. Ilmu berkembang dengan pesat, riset temuan dan perbedaan pendapat dalam



bidang keilmuan adalah hal yang sangat lumrah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam pengetahuan yang menyebabkan para ahli dan ulama terpecah belah. Sebaliknya di tengah keragaman pendapat, mereka bisa saling menghargai pendapat yang berbeda tersebut.

Substansi inilah yang diajarkan kepada peserta didik Madrasah, agar mereka memiliki kesadaran sejarah akan kemuliaan tokoh-tokoh terdahulu yang diharapkan menginspirasi para peserta didik.

Kelima, Bahasa Arab. Ini menjadi sumber utama Islam karena al-Quran berbahasa Arab. Bahasa Arab diajarkan dalam rangka menggali kebenaran dari sumber kebenaran, juga dalam rangka mengkaji metode berpikir para ulama.

Sudah saatnya Bahasa Arab yang diajarkan di Madrasah dan juga di Pesantren bukan hanya bahasa keilmuan keislaman klasik, melainkan Bahasa Arab modern sebagai keahlian penting dalam pergaulan dan komunikasi internasional anak-anak Madrasah kelak kemudian hari.

Moderasi Beragama: Peran PTAI

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam merupakan tulang punggung kajian akademik tentang keislaman. Seiring dengan jumlahnya yang signifikan, 700 PTKAI Negeri dan Swasta, dari Sekolah Tinggi, Institut maupun Universitas, mestinya Kementerian Agama dengan mudah mendapat *benefit* tentang riset-riset keislaman insan PTAI.

Lima Indikator Moderat

Untuk menstimulasi langkah-langkah kongkret dalam implementasi penguatan moderasi beragama, penting untuk diuraikan, apa indikator-indikator yang bisa dipegangi, bahwa seseorang yang menjalankan ajaran agama, dalam hal ini Islam, dikategorikan moderat.

Lima indikator bisa dijadikan sebagai pijakan bagaimana implementasi moderasi ber-Islam. Yaitu; *i] terbuka; ii] mengedepankan nalar kritis; iii] menyadari keterbatasan diri; iv] tawadlu' dan v] berfikir untuk kemanusiaan.*

Pertama, terbuka. Sikap terbuka dipraktekkan dalam peradaban keilmuan keislaman sebagai konsekuensi logis dari watak ilmu yang selalu terbuka. Hasil riset, pendapat atau temuan ilmiah memang dituntut untuk selalu terbuka, agar hasil yang baru bisa diuji kembali validitasnya. Bahkan beberapa literatur menyatakan, orang yang mengkaji dan membahas ilmu agama tetapi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dinyatakan sebagai bagian dari kelompok sesat.

Abd al-Wahab al-Sya'rānī menyatakan peringatan dari Umar ibn Abd al-Aziz dalam buku yang diberi judul *al-Mīzān al-Kubrā* sebagai berikut:

إذا رأيتم جماعة يتناجون سرا فيما بينهم بأمر دينهم فاشهدوا
ان ذلك ضلال و بدعة

idzā ra'aitum jamā'atan yatanājauna sirran fī mā bainahum bi-amri dīnihim fa-syhadū anna dzālika ḍalālun wa-bid'atun

[ketika kalian melihat sekelompok orang yang sembunyi-sembunyi mendiskusikan persoalan agama, yakinlah kalian, bahwa kelompok tersebut sesat dan bid'ah]

Keterbukaan menjadi keniscayaan dalam menjalankan agama secara moderat. Dengan terbuka, ketika ada ketidakbenaran dibandingkan dengan tuntunan yang semestinya, maka akan mudah diketahui dan disarankan yang benar sesuai tuntunan.

Kedua, mengedepankan nalar. Seseorang yang beragama secara terbuka bisa dipastikan menggunakan akal sehat dengan baik, tidak mudah melibatkan emosional. Beragama pada hakikatnya adalah menyuburkan peran akal pikiran. Sentimen emosional tidak mudah terbakar oleh isu-isu yang belum tentu benar, karena mengedepankan akal sehat.

Para ilmuwan memberikan legitimasi budaya

mengedepankan rasionalitas/nalar kritis sebagai indikator moderat. Diantaranya Nawawi al-Bantani, ketika dihadapkan pada permintaan untuk berkontribusi menulis karya tafsir, sementara, al-Bantani merasa ragu untuk melakukannya. Akhirnya, dengan pertimbangan akal sehat, al-Bantani menulis karya tafsir yang diberi judul *Murāh Labīd Tafsir al-Nawawī* atau lebih dikenal dengan tafsir Munir, literatur yang amat sering dibaca di dunia Pesantren. Selengkapnya al-Bantani mengatakan sebagai berikut:

قد امرني بعض الاعزة عندي ان اكتب تفسيراً للقران المجيد
فترددت في ذلك زماناً طويلاً خوفاً من الدخول في قوله صلى
الله عليه وسلم من قال في القران برايه فاصاب فقد اخطاء ...
فاجبتهم الى ذلك للاقتداء بالسلف في تدوين العلم ابقاء
للخلق، وليسى على فعلى مزيد ولكن لكل زمام تجديد وليكون
عوناً لى وللقاصرين مثلى فاخذته من الفتوحات الالهيات ومن
مفاتيح الغيب ومن السراج المنير ومن تنوير المقباس ومن تفسير
ابى السعود

*qad amaranī ba‘du l-a‘izzati ‘indī an aktuba tafsīran
lil-qur‘ani l-majīdi, fataraddadtu fī dzālika zamānan
ṭawīlan khaufan mina d-dukhūli fī qawlihi ṣallallāhu
‘alaihi wa-sallam man qāla fī l-qur‘āni bi-ra‘yihi fa-
aṣāba fa-qad akhṭa’a...*

*fa-ajabtuhum ilā dzālika lil-iqtidā‘i bis-salafi fī
tadwīni l-‘ilmi ibqā’an li l-khalqi, wa-laysa ‘alā*

fi'lī mazīdun wa-lākin li-kulli zamānin tajdīdun wa-liyakūna 'aunan lī wa-lil-qāṣirīna mitslī fa-akhadztuhu min al-Futuhāt al-Ilāhiyati wa-min Mafātih al-Ghaib wa min al-Sirāj al-Munir wa-min Tanwīr al-Miqbāsi wa-min Tafsīr Abi s-Su'ūdi
[sebagian orang mulia di sekelilingku memintaku untuk menulis tafsir al-Qur'an, aku bimbang dalam waktu yang cukup lama, akankah permintaan tersebut aku penuhi atau tidak karena ada hadis Nabi: "barangsiapa menafsirkan al-Qur'an dengan ra'yu-nya dan benar, tetap saja tafsir itu salah"... (lanjutan) Akhirnya aku penuhi permintaan untuk menulis tafsir dengan pertimbangan mengikuti tradisi tulis para ulama terdahulu dan agar bisa memberi manfaat. Apa yang saya tulis sebenarnya tidak ada yang baru, hanya perlu diingat, setiap masa pasti ada pembaharuan. Agar memudahkan pembaca dan orang yang pengetahuannya terbatas seperti-ku, maka rujukan buku ini adalah al-Futuhāt al-Ilāhiyyah, Mafātih al-Ghaib, al-Sirāj al-Munīr, Tanwīr al-Miqbās dan Tafsir abu Su'ud].

Kalimat al-Bantani ini menjadi legitimator karakter kedua, mengedepankan nalar dan rasionalitas sekaligus karakter **ketiga**, sadar akan keterbatasan diri. Pertimbangan rasionalitas dalam karir keilmuan diambil dari kalimat al-Bantani dengan pertimbangan mengikuti tradisi tulis ulama terdahulu. Meski

ada *warning* dari hadis Nabi seperti dikatakan al-Bantani, pertimbangan rasional untuk mengikuti tradisi tulis ulama terdahulu dan agar bisa memberi manfaat, al-Bantani akhirnya memutuskan untuk menulis karya tafsir.

Sadar akan keterbatasan diri ditunjukkan dengan elegan oleh al-Bantani, dengan kalimat “untuk memudahkan pembaca dan orang yang pengetahuannya terbatas sepertiku”. Al-Bantani tahu persis bahwa pembaca biasanya memiliki ekspektasi berlebih ketika membaca buku. Seolah, tafsir adalah tafsir atas semua ayat dengan penjelasan sangat komprehensif. Dengan kalimat yang tadi disebutkan, al-Bantani memberi informasi kepada pembaca bahwa karya tafsirnya hanya memiliki 5 rujukan tafsir yang mewakili *genre*-nya masing-masing.

Sadar akan keterbatasan diri bukan berarti pengetahuannya tidak mumpuni, sebaliknya, sebagai penulis dan ilmuwan produktif, al-Bantani menunjukkan kepada pembaca untuk selalu kritis ketika membaca karyanya. Sikap terbuka, mengedepankan akal sehat dan nalar serta dibarengi dengan sadar akan keterbatasan diri merupakan kombinasi sikap mulia yang menjadi indikator seseorang beragama secara moderat.

Keempat, rendah hati [*tawadlu'*], makin dalam ilmu seseorang, makin banyak amal perbuatan seseorang, mestinya makin rendah hati. Orang moderat pantang untuk menyombongkan diri, hobi menyalahkan orang lain yang berbeda. Al-Bantani dalam kutipan di atas, meski karyanya luar biasa, dengan rendah hati mengatakan “tidak ada yang baru

dalam kitab yang saya tulis ini”, tentu sama sekali tidak benar kalau karya tafsir tersebut tidak memuat hal baru.

Justru sebaliknya, tafsir al-Bantani merupakan tafsir komprehensif di abad ke-20 yang ditulis secara ringkas dan padat. Komentar al-Bantani hanyalah satu dari sekian banyak kerendah-hatian para tokoh besar, ulama dan ilmuwan muslim bereputasi internasional.

Untuk itu, ber-Islam secara moderat sebenarnya mudah, tinggal mencontoh figur-figur saleh yang layak dijadikan sebagai teladan. Ulama yang rendah hati, padahal dirinya adalah lautan ilmu, merupakan teladan yang bisa dipegangi.

Kelima, berfikir untuk keumatan. Masih menggunakan kalimat Nawawi al-Bantani di atas, pertimbangan “agar memberi manfaat” dari karya tafsir yang beliau tulis, merupakan basis legitimasi seseorang yang memikirkan manfaat untuk orang lain. Sikap sederhana sebagai indikator kelima orang beragama secara moderat adalah menjauhi sikap egois.

Acapkali orang beragama mendapatkan pilihan antara kesalehan ritual versus kesalehan sosial. Banyak orang beragama asik dengan ritual ibadah, sementara kurang peka terhadap lingkungan yang membutuhkan uluran tangan. Mestinya, semakin orang asik dengan kesalehan *vertikal*, dirinya makin memiliki kepekaan terhadap lingkungan sosialnya.

Berfikir untuk kemanfaatan, jika berkaca kepada figur Nawawi al-Bantani, orang moderat banyak memiliki peluang untuk mengamalkan ajaran agama untuk kemanfaatan lingkungan sekitar. Makin beragama, seseorang makin altruis,

atau makin bisa memikirkan bagaimana bisa membantu orang lain yang membutuhkan.

Peran PTAI

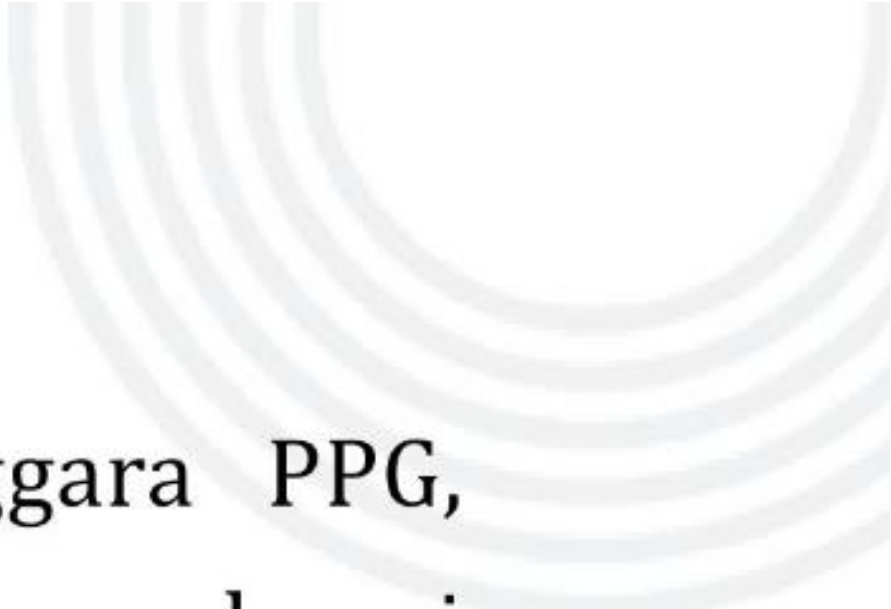
Khusus untuk negeri, sebanyak 57 PTKIN, Sekolah Tinggi, Institut Agama Islam Negeri dan Universitas Islam Negeri sudah semestinya menjadi tempat melakukan riset, pengembangan dan implementasi moderasi beragama yang sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024.

Ada beberapa pertimbangan strategis PTKIN menjadi tempat penyemai moderasi ber-Islam dalam konteks keindonesiaan. **Pertama**, PTKIN mampu melakukan riset-riset, baik individu maupun kolaboratif untuk membuat modul-modul pembelajaran bermuatan moderasi beragama. Insan Perguruan tinggi mestinya tidak apatis dan hanya asyik dengan dunia tatap muka, mengajar mahasiswa.

Semestinya insan PTKIN mampu menjadi motor dalam berkreasi bagaimana memperbaharui modul, metode mengajar, maupun hal lain terkait dengan penguatan moderasi beragama.

Jajaran pimpinan PTKIN juga bisa mendorong agar para dosen banyak melakukan penelitian dan uji coba penelitian, bagaimana konten moderasi beragama bisa dirumuskan, sekaligus cara seperti apa yang dianggap efektif agar kampus menjadi rujukan bukan hanya kajian tetapi juga implementasi penguatan moderasi beragama.

Kedua, PTKIN mampu melakukan uji cobanya baik di internal kampus, maupun di satuan-satuan pendidikan dasar



dan menengah. Ketiga, Bagi kampus penyelenggara PPG, kurikulum PPG memungkinkan berisi penguatan moderasi beragama. Program seperti ini tentu lebih mudah untuk dilakukan karena Pendidikan Profesi Guru merupakan program wajib bagi para guru di satuan pendidikan dasar dan menengah.

Ketiga, kampus diharapkan mewujudkan rumah moderasi beragama sebagai semacam laboratoriumnya. Dari mulai menyusun konten mata kuliah yang diperkuat dengan muatan moderasi beragama, modul pembelajaran sampai dengan praktek lapangan bisa difasilitasi dan dievaluasi melalui keberadaan rumah moderasi.

Dengan demikian, kebijakan Kementerian Agama tentang moderasi beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama yang lebih baik akan berjalan dengan baik karena PTAI berkontribusi riil terhadapnya.

Dengungkan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Kristen

Dalam acara pertemuan nasional Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia [BMPTKKI] akhir Agustus 2019, saya sebagai Sekretaris Jenderal Kemenag meminta kepada seluruh civitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) untuk terus menggelorakan moderasi beragama, seiring dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Kementerian Agama sejak Januari 2019.

Moderat dalam beragama erat kaitannya dengan sikap umat beragama terhadap keragaman pemahaman terhadap teks keagamaan. Tanpa bermaksud memasuki wilayah Teologi Kristiani dan keilmuannya, saya berbagi pengalaman ketika menjadi bagian dari 10 ilmuwan yang tergabung dalam proyek riset internasional bertema: *Europa im Nahe Osten der Nahe Osten im Europa* [Eropa di Timur Tengah dan Timur Tengah di Eropa], di *Wissenschaftskollege zu Berlin* [Pusat Riset Antar Universitas di Berlin] beberapa tahun lalu sebelum ditugasi menjadi birokrat Kemenag.

Secara khusus, sub tema dari riset tersebut adalah *Islamische und jüdische Hermeneutik als Kulturkritik* [Hermeneutika Islam dan Yahudi sebagai Tradisi Kritis]. Dalam proyek riset ini, *jüdische Hermeneutik* merepresentasikan dua tradisi besar penafsiran teks suci, yakni Yahudi dan Kristiani. Terminologi keilmuan yang dipakai dalam riset tersebut sebagai kata kunci adalah: *tafsīr/ta'wīl* dalam Islam, *Midrash*

dalam Yahudi, dan *Exegesis* dalam Kristiani. Tiga kosa kata yang memiliki arti berdekatan, yakni penafsiran teks suci di masing-masing agama tersebut. Tentu saya tidak bermaksud mengulas lebih dalam terkait dengan wacana keilmuan yang berkembang dalam tradisi penafsiran kitab suci tiga agama besar di atas. Poinnya, dalam tradisi penafsiran terhadap kitab suci dikenal dua kosa kata, yaitu: tetap dan berubah. Tetap mewakili kuantitas teks suci, dalam konteks Islam, misalnya, teks suci secara kuantitas tetap, 30 juz, 114 surat dan 6666 ayat versi madzhab ahli al-Qur'an yang mu'tabar. Sementara, yang berubah adalah tafsirannya, atau hasil penafsirannya, karena metode penafsirannya tidak statis, melainkan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban.

Sedikit memasuki *teori Hermeneutika* yang dikembangkan dalam tradisi penafsiran di Yahudi maupun Kristiani, saya cukup memahami teori yang dikembangkan oleh *Hans George Gadamer* dalam bukunya yang diberi judul *Wahrheit und Methode: Grundzüge Einer Philosophischen Hermeneutik* [Kebenaran dan Metode: Dasar-Dasar Hermeneutika Filosofis]. Buku ini mengurai duapihak yang saling berhubungan terkait penafsiran teks, yaitu teks itu sendiri dan pembaca.

Relasi antara teks yang telah memiliki makna, karena teks suci adalah wahyu Tuhan, dan pembaca yang mendalami maksud dan makna yang dimiliki oleh teks. Gadamer menyebutnya dengan relasi antara teks dan pembaca. Kemudian Gadamer menjelaskan bahwa masing-masing teks

maupun pembaca memiliki horizon. Terjadinya pemahaman terhadap teks, menurut Gadamer, setelah terjadi empat proses yang berjalan secara simultan, yaitu; *i] horizon teks; ii] horizon pembaca; iii] perjumpaan dan penyatuan horizon; iv] pengaruh kesadaran sejarah.*

Teks telah memiliki kandungan makna, sebelum dibaca oleh pembaca, bahkan maknanya sangat luas. Karena telah memiliki kandungan makna, maka menurut Gadamer teks memiliki horizonnya sendiri. Demikian pula pembaca, untuk itu, ketika pembaca menghampiri teks, terjadi perjumpaan antara horizon teks dengan horizon pembaca. Perjumpaan ini menghasilkan percampuran horizon antara teks dengan pembaca, Gadamer menyebutkan dengan *Horizonsverschmelzung*.

Pembaca akhirnya mampu memahami teks, setelah terjadi percampuran horizon, dan pemahaman pembaca akan teks dipengaruhi oleh pengaruh kesadaran sejarah, *Wirkungsgeschichtlichesbeweusstein*.

Seorang yang membaca teks akan sangat dipengaruhi oleh wawasan keilmuan sebelumnya yang dimiliki, makin linear keilmuan yang dimiliki dengan substansi teks yang dibaca akan makin mudah si pembaca memahami, sebaliknya makin jauh keilmuan sebelumnya yang dimiliki akan makin sulit memahami.

Contoh sederhana, seorang anak MTs disuruh membaca teks filsafat karya filsuf, tentu akan sangat kesulitan memahami dibandingkan pembaca lain yang merupakan mahasiswa filsafat semester akhir. Intinya, penafsiran terhadap teks suci

dalam tradisi agama memiliki logika senada dengan penjelasan teori penafsiran yang disampaikan oleh Hans George Gadamer.

Lalu, apa kaitan teori Gadamer dengan pemahaman moderat dalam tradisi Kristiani? Setidaknya, Perguruan Tinggi Kristen memiliki tanggung jawab mendekatkan “pengaruh kesadaran sejarah” para pengkaji dan pembaca kitab suci Kristiani untuk mampu mendapatkan pemahaman teks sucinya secara proporsional.

Bahaya yang bisa timbul adalah, ketika kitab suci dibaca oleh semua pengimannya, tanpa dibarengi dengan ilmu-ilmu bantu terkait kitab suci, munculnya faham-faham ekstrem tekstualis sulit dihindari. Literalisme faham keagamaan merupakan salah satu akar persoalan munculnya faham radikal dalam arti negatif. Untuk itu, BMPPTKI, di mana para pimpinan Perguruan Tinggi Kristen berkumpul, menjadi sangat strategis untuk mengembangkan faham keagamaan yang moderat untuk digelorakan di tengah-tengah umat Kristiani.

Kemenag sudah memiliki platform, terkait moderasi beragama. Bahkan, moderasi beragama sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024. Ini adalah kerja kita semua. Kemenag yang memiliki tusi sangat besar, mengurus manusia sejak lahir sampai meninggal. Untuk itu, seluruh keluarga besar Kemenag agar terus dengungkan moderasi beragama khususnya pada lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen.

Surat Edaran Nomor B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Rumah Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

(PTKIN) telah dikeluarkan untuk menjadi pedoman pendirian rumah moderasi beragama. Rumah tersebut akan menjadi tempat penyemaian, edukasi, pendampingan, pengaduan, dan penguatan atas wacana dan gerakan moderasi beragama di lingkungan kampus PTKIN Kementerian Agama.

Ditjen Bimas Kristen bisa melakukan hal senada untuk Perguruan Tinggi Kristen di bawah binaannya. Bersama dengan Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia [BMPTKKI], Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sudah semestinya memainkan peran yang strategis dalam menebarkan moderasi beragama. Badan musyawarah ini juga sekaligus melakukan kritik internal, dalam melakukan transformasi, serta merespon tantangan zaman dalam membawa spirit moderasi beragama.

Nasihat Sufi dalam Pendidikan untuk Kehidupan

Dalam sebuah acara wisuda sarjana PTKIN, saya memberi orasi ilmiah, memberi bekal kepada para wisudawan/wati. Saya merujuk kepada kitab *Syarah Fath al-Mu'in*, karya Abu Bakar Syato dan *Nahju al-Balāghah* terkait Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah untuk memberi keyakinan kepada mereka akan perjalanan hidup, optimisme dan masa depan yang lebih gemilang.

Prosesi wisuda adalah giat akhir administratif bagi seorang mahasiswa, karena mereka belajar secara formal di kampus dibatasi dengan waktu. Dengan berakhirnya wisuda, bukan berarti proses belajar mereka terhenti, melainkan belajar formalnya sebagai mahasiswa yang tercatat secara administratif telah usai.

Para wisudawan/wati memiliki kesempatan lebih luas untuk melakukan perjalanan hidup di step atau etape selanjutnya. Dalam muqaddimah *Syarḥ Fath al-Mu'in*, diberi judul *I'ānatut Ṭālibin fī Hilli Alfāzi Fath al-Mu'in*, Abu Bakar Syato' mengatakan sebagai berikut:

الحمد لله الذى اوضح الطريق للطالبين وسهل منهج السعادة
للمتقين وبصر بصائر المتصدقين بسائر الحكم والاحكام فى
الدين ومنحهم اسرار الايمان وانوار الاحسان واليقين

alhamdu lillāhi lladzī auḍaḥa aṭ-ṭarīqa li ṭ-ṭālibīn

wa-sahhala manhaja s-sa'ādati li l-muttaqīn wa-baṣṣara baṣā'ira l-mutaṣaddiqīna bi-sā'iril ḥukmi wal-aḥkāmi fid-dīn wa-manahāhum asrāra l-īmāni wal-iḥsāni wal-yaqīn.

[Segala puji bagi Allah yang mempermudah jalan bagi pencari pengetahuan, yang mempermudah jalan kebahagiaan bagi orang yang bertakwa, yang mempertajam mata batin untuk kebaikan dalam urusan agama, serta yang menganugerahkan rahasia rahasia nur keyakinan dan keimanan].

Kalimat di atas sebenarnya merupakan uraian tentang perjalanan hidup, sebanyak empat fase, yakni: *i] pencarian pengetahuan; ii] pencarian kebahagiaan; iii] pencarian kearifan; dan iv] pencarian jati diri yang sejati.* Semua orang, siapapun yang dianugerahi usia sampai dewasa dan tua, hidupnya akan mengalami empat fase tersebut.

Pertama adalah pencarian pengetahuan untuk mendapatkan dan meningkatkan kompetensi [*searching for knowledge*]. Dengan berbekal ilmu pengetahuan, para mahasiswa/i baik strata 1 dan 2, mereka memiliki keahlian atau keunggulan kompetitif dibandingkan dengan orang kebanyakan yang tidak mengenyam pendidikan tinggi.

Keunggulan kompetitif selaras dengan keseriusan para wisudawan ketika menjadi mahasiswa, baik dalam pencapaian mata kuliah yang diukur dengan nilai, maupun keseriusan aktualisasi diri. Era kini jauh lebih maju dan mudah

mengaktualisasi diri dibanding lima belas dua puluh tahun yang lalu. Publikasi karya, hasil pikiran-pikiran cerdas cukup di media sosial cepat direspon oleh masyarakat yang memiliki interest. Makin rajin aktualisasi diri, makin besar peluang untuk dikenal sebagai ahli dalam bidang yang digeluti.

Fase pencarian pengetahuan juga tidak mengenal henti. Berbagai cara di era teknologi informasi untuk senantiasa menambah dan memperdalam pengetahuan untuk bisa diakui sebagai orang yang memiliki keunggulan kompetitif.

Kedua, pencarian kebahagiaan. Kompetensi dan keunggulan kompetitif menjadi wasilah terbukanya pintu rezeki. Orang bijak dan para ahli psikologi mendefenisikan bahagia itu sederhana, senyum itu sudah menunjukkan kebahagiaan, Meski demikian, untuk bisa senyum, kebutuhan *primer* dalam hidup mesti tercukupi.

Kompetensi dan keunggulan kompetitif itulah yang menjadi wasilah mendapatkan anugerah rezeki untuk memenuhi kebutuhannya. Rezeki, kata orang bijak tidak identik dengan gaji atau penghasilan. Ia menjadi sangat relatif, tergantung bagaimana mensikapinya. Meski kelihatan banyak, jika tidak disyukuri, bisa jadi penghasilan banyak tersebut membuat hidup susah. Sebaliknya, pendapatan sedikit, akan tetapi karena selalu disyukuri, yang sedikit tersebut menjadi berkah.

Tentang rezeki, ada nasihat penting dari Sayyidina Ali, menantu Rasulullāh, dalam *Nahj al-Balāghah*, sebagai berikut:

الرزق نوعان رزق تطلبه ورزق يطلبك

*al-rizqu nau'āni rizqun taṭlubuhu wa-rizqun
yaṭlubuka*

*[rezeki itu ada dua, rezeki yang kalian perebutkan,
dan rezeki memperebutkan kalian]*

Nasihat ini sangat penting, karena perjalanan seseorang bisa dipastikan melewati fase ini. Pertama seseorang pastilah akan berebut rezeki. Sebagai wisudawan/wati baru, ketika ada lowongan pekerjaan, apakah di swasta maupun di instansi pemerintah, pastilah akan berebut untuk bisa bekerja di tempat tersebut.

Setelah menekuni suatu profesi, karena terus mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya, keahlian kompetitifnya makin diakui maka, seseorang ini akan sampai pada fase dicari oleh rezeki.

Contoh, seorang guru, semula ia sama dengan guru-guru yang lain. Karena terus produktif, aktualisasi diri selalu dilakukan, aktif mempromosikan pikiran-pikiran cerdasnya, apapun kreativitas dan keberhasilannya dishare via media sosial, akhirnya dia menjadi guru yang dikenal publik, dikenal sebagai guru kreatif, tulisan-tulisannya banyak dirujuk oleh komunitas maya di media sosial, akhirnya dia akan sibuk memenuhi undangan sana sini sebagai nara sumber, fasilitator, motivator dan berbagai aktivitas lainnya, yang menjadikan dia sebagai sosok guru yang dicari oleh rezeki.

Ketiga, mendapatkan kearifan. Seseorang yang telah mapan hidupnya, menikmati hidup dengan rasa cukup dan

pandai bersyukur, ia akan menjadi sosok yang arif dan bijak. Kehidupannya teratur, emosinya tertata, arif dalam bersikap sekaligus bijak dalam bertindak, termasuk juga hati-hati dalam bertutur kata.

Kearifan, jika merujuk kepada literatur sufi, memang tidak hadir begitu saja tanpa pra-kondisi seseorang yang secara emosional tertata, dan kepasrahan yang tinggi kepada sang pencipta. Intinya, fase ketiga ini menjadi tangga perjalanan hidup seseorang untuk bisa menikmati hidup dengan penuh rasa syukur, apapun yang dianugerahkan Allah kepada dirinya. Sedikit rezeki bisa cukup, banyak rezeki, menambah berkah.

Keempat adalah mendapatkan anugerah *ma'rifat, musyahadah*. Fase ini merupakan fase tertinggi bagi perjalanan hidup seseorang. Tidak banyak yang mampu menaiki anak tangga keempat ini, mendapatkan anugerah *ma'rifat* dari Allah. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan anugerah level keempat ini.

Yang terpenting, meski tidak sampai pada level keempat, setidaknya perjalanan hidup bisa mencapai level ketiga, menjadi orang-orang yang arif, karena kehidupannya bisa ditata dengan kesadaran penuh bagaimana bisa menindaklanjuti uraian di atas, baik nasihat dari Abu Bakar Syato' maupun Sayyidina Ali Karamallāhu Wajhah.

Menjaga Kitab Suci

Sebagai institusi yang diberikan tugas untuk mengawal kehidupan keagamaan dan pendidikan keagamaan di Indonesia, Kementerian Agama memiliki program untuk menjaga kitab suci sekaligus mendekatkan kepada para pengimannya, salah satunya al-Quran, sebagai kegiatan prioritas.

Selama ini, Kementerian Agama sekurang-kurangnya telah melakukan empat ikhtiar untuk menjaga kitab suci al-Quran dan mendekatkan kepada para pengimannya. Ikhtiar tersebut adalah: *i] mencetak; ii] mentashih; iii] menterjemahkan; iv] mentafsirkan.*

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memiliki tugas untuk mencetak mushaf al-Qur'an dalam setiap tahun anggaran. Untuk kebutuhan umat Islam se Indonesia, tentu yang dilakukan oleh Kemenag melalui Ditjen Bimas Islam tidak mampu mencukupi secara keseluruhan. Ditjen Bimas Islam sedang mengembangkan UPQ [Unit Percetakan al-Qur'an] agar layanan kebutuhan mushaf masyarakat semakin baik dilakukan.

Di bawah Badan Litbang dan Diklat, terdapat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran (LPMQ), lembaga yang bertugas menjaga kemurnian mushaf al-Qur'an. Mushaf-mushaf yang diterbitkan penerbit swasta, karena keterbatasan pemerintah, turut dipasarkan ke masyarakat.

Sebelum dicetak, naskah mushaf penerbit harus lolos uji tashih dari LPMQ ini. Tashih meliputi banyak hal, diantaranya

konsistensi *khot*/tulisan, tanda-tanda baca, tanda *tajwid*, *mad* [panjang pendek bacaan] dan berbagai hal terkait dengan keberadaan mushaf yang dijadikan sebagai standar untuk diedarkan di wilayah hukum Indonesia.

Selanjutnya, penterjemahan al-Qur'an dilakukan oleh Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi [Puslitbang LKKMO]. Penterjemahan al-Qur'an bukan hanya ke dalam bahasa Indonesia, melainkan juga ke dalam bahasa daerah. Lebih dari 20 terjemahan al-Quran berbahasa daerah yang telah diterbitkan, diantaranya bahasa Jawa Banyumasan, Bugis, Aceh, Madura, Banjar, dan masih banyak lagi.

Setelah itu, melakukan pemaknaan ayat-ayat Alquran dengan mengeluarkan dua seri tafsir. Yaitu, tafsir ilmi dan tafsir tematik Alquran. Tafsir Ilmi ini mencoba menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan mengaitkan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Dengan melakukan pendekatan saintifik, para ahli dari berbagai unsur, akademisi, ulama, fisikawan, biolog menyusun tafsir ini.

Sementara tafsir tematik Alquran merupakan pengembangan tafsir dengan melihat fenomena yang berkembang di masyarakat. Tafsir ini disusun oleh para ahli tafsir dari seluruh Indonesia bukan sekedar melihat teks, tapi juga konteks yang berkembang dalam masyarakat.

Keempat ikhtiar Kemenag yang telah diuraikan merupakan program prioritas tidak saja menjaga kitab suci, tetapi juga mendekatkannya kepada mereka yang mengimani. Kedekatan

umat terhadap kitab sucinya akan mampu mendekatkan pemahaman mereka untuk bisa menjalankan ajaran-ajaran mulia dari kitab suci tersebut.

Jika dikaitkan dengan RPJMN 2020-2024 di mana di sana ada tugas pemerintah yang baru, yaitu tentang penguatan moderasi beragama, maka empat hal yang dilakukan Kemenag mendapatkan signifikansinya. Pemahaman yang benar terhadap kitab suci akan mengantarkan agama menjadi unsur perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bersikap Proporsional dan Wajar Apa Adanya

Dunia pendidikan makin menghadapi tantangan yang kompleks seiring dengan perubahan tata dunia akibat masuknya peradaban manusia dalam era disrupsi. Era di mana kemapanan, nyaman dan dominasi kelompok tertentu runtuh akibat kemajuan teknologi informasi.

Aplikasi-aplikasi sederhana dalam segenggam alat komunikasi, mampu meruntuhkan swalayan, pusat-pusat perbelanjaan, layanan taksi konvensional dan alat transportasi lainnya. Dunia menjadi makin kecil, makin sempit, dan batas-batas geografis serta perbedaan waktu antar wilayah, negara dan benua, menjadi tidak signifikan.

Gelaran seminar dan konferensi sudah banyak yang beralih dari cara-cara konvensional: berkumpul, tatap muka, presentasi dan tanya jawab, beralih ke gelaran seminar *online* via kanal-kanal media sosial.

Kondisi seperti ini tak pelak memberikan pengaruh sangat signifikan terhadap tatanan, sistem, metode dan berbagai hal terkait dengan dunia pendidikan.

Pertanyaannya bagaimana kita para pemangku, pelaku dan aktivis pendidikan mensikapi dan mengantisipasi dampak lebih jauhnya lagi?

Sebagai seorang Muslim yang menekuni dunia intelektual keislaman, situasi seperti dipaparkan di atas tidak perlu disikapi dengan galau, khawatir berlebihan, apalagi gagap. Secara filosofis perubahan itu memang tidak bisa dielakkan

sebagai proses alamiah lompatan peradaban umat manusia. Untuk itu, sikapilah dengan nilai-nilai sufistik.

Imam al-Ghazali dalam *Ihyā' Ulūmuddin* menjelaskan sebagai berikut:

ان من خيار امتي قوما يضحكون جهرا من سعة رحمة الله
وييكون سرا من خوف عذاب الله

*inna min khiyāri ummatī qauman yaḍhakūna jahran
min sa'ati rahmati llāhi wa-yabkūna sirran min
khaufi 'adzābillāh*

[bahwa ada bagian dari ummatku yang selalu optimis, karena yakin akan luasnya kasih sayang dan rahmat Allah. Namun, di saat yang lain juga suka menangis tersedu, karena khawatir akan azab dari Tuhan].

Saran dari al-Ghazali dalam kalimat di atas adalah, kita tetap harus selalu optimis, karena optimisme merupakan modal dasar menghadapi segala tantangan dan dinamika kehidupan. Setelah optimis, sikap yang perlu dikedepankan adalah wajar, proporsional dan apa adanya.

Wajar akan membuat seseorang tidak kagetan dan tidak gagap, proporsional membuat seseorang mampu berfikir jernih dan menyusun langkah-langkah strategis-antisipatif, sedangkan apa adanya membuat seseorang tidak mudah berharap terlalu banyak sekaligus tidak mudah untk

dikecewakan dengan kenyataan yang harus dihadapi.

Optimisme membawa seseorang untuk istiqamah membangun masa depan. Dengan optimis, sikap batin yang dimiliki seseorang akan selalu berfikir positif dan dalam perspektif tasawuf akan selalu berprasangka baik kepada Tuhan, atas apapun yang sedang dihadapi. Demikian pula, optimisme membantu orang untuk tidak mudah lupa diri ketika meraih kesuksesan yang dicita-citakan, demikian pula tidak mudah galau atau jatuh bahkan stress ketika mengalami kegagalan.

Pendidikan di Kementerian Agama sudah *on the track*, karena memperjumpakan antara intelektual dan moral. Keduanya ibarat kaki yang sama-sama kokoh dan saling melengkapi dan menguatkan. Pendidikan tidak boleh mengabaikan satu dari kedua kaki tersebut.

Di tengah arus perubahan dan dinamika era disruptif, dimensi nalar dalam dunia pendidikan harus dikembangkan secara optimal. Filosofi pendidikan dan pengajaran tidak boleh terbelenggu dengan teks buku pelajaran saja, akan tetapi peserta didik diberi tantangan untuk bisa mengembangkan nalar berfikirnya secara optimal. Hanya nalar berfikir yang mampu membekali mereka menjadi orang yang selalu optimis dan siap menghadapi semua tatanan zamannya.

Lingkungan pembelajaran yang dalam paradigma konvensional diwujudkan dalam ruangan pembelajaran, waktu pembelajaran dan guru sebagai pembelajar, perlu dilakukan sofistikasi yang lebih dinamis. Peserta didik era

kini membutuhkan ruang ekspresi yang lebih leluasa untuk bisa mengembangkan dirinya. Guru sebagai pembelajar menempatkan diri sebagai fasilitator, mitra dialog aktif serta pemancing tumbuhnya nalar kritis peserta didik. Sementara, untuk waktu tentu lebih mudah untuk disesuaikan.

Pengembangan nalar kritis juga diimbangi dengan penekanan moral yang kuat yang diambil dari nilai-nilai keislaman. Peradaban Islam mengajarkan keseimbangan antara fikir [nalar] dan zikir [moral spiritual]. Para ilmuwan yang menorehkan prestasi gemilang dalam peradaban Islam adalah mereka yang selalu mengembangkan nalar kritis dan menjaga moral religiusnya.

Dengan keseimbangan dua kaki, nalar dan moral, peserta didik akan menjadi orang yang proporsional di masa mendatang, apapun keahlian, profesi, maupun jalan hidup yang dilalui. Orang yang proporsional, tidak akan lupa diri karena prestasi gemilang, karena disikapi dengan rasa syukur, juga tidak mudah tersungkur karena kegagalan yang dialami dalam hidupnya. Kegagalan bagi orang seperti ini adalah pelajaran berharga untuk meraih sukses di masa yang akan datang.

“

Ketika kamu ingin mendapatkan anugerah makrifatullah dengan basirah keimanan dan keyakinan, jadilah orang yang senantiasa mensyukuri apapun nikmat Allah dan ridlo atas semua peristiwa yang dialami



“

Cinta yang diekspresikan akan memberikan warna positif di tengah-tengah masyarakat. Bangsa ini butuh rasa cinta. Cinta yang tulus, bukan cinta yang tendensius. Cinta yang memberi, bukan cinta yang meminta. Cinta yang membangun, bukan cinta yang menghancurkan



BAB IV

Agama sebagai Perekat Bangsa

Manifestasi Syukur

Nikmat merupakan anugerah Allah SWT. Seorang hamba Allah yang taat tiada hentinya bersyukur atas karunia nikmat-Nya dengan berbagai cara. Penting bagi seorang muslim memahami apa itu syukur yang sebenarnya.

Para sufi memberikan definisi dan penjelasan yang beragam, pada intinya bisa diambil benang merah bahwa syukur adalah pengakuan seorang hamba atas nikmat yang telah diberikan Allah dan membuktikan dengan ketundukan kepada-Nya.

Arti penting syukur, membuat Abu Hasan al-Syādzili menjadikannya sebagai salah satu piranti utama menapaki jalan kema'rifatan. Tentu pengertian syukur dalam pandangan al-Syadzili adalah syukur secara paripurna.

Pengakuan akan sumber nikmat adalah Allah dan ditindaklanjuti dengan kepasrahan total untuk menghamba kepadanya merupakan bentuk totalitas. Hanya saja, acapkali untaian kalimat tidak mampu menjelaskan secara detail bagaimana manifestasi syukur dalam kehidupan sehari-hari seorang hamba.

Mungkin untaian berikut bisa memberi ilustrasi bagaimana sebaiknya manifestasi syukur ala para sufi. Dalam pandangan tasawuf, rajin beribadah bukan karena ingin mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, melainkan diniati sebagai rasa syukur atas semua anugerah yang diberikan Allah, tanpa siapapun yang bisa menghitung nikmat yang dianugerahkan.

Penjelasan tasawuf seperti di atas belum bisa dilakukan oleh orang kebanyakan, karena mayoritas beribadah ingin mendapatkan pahala. Untuk itu, perspektif tasawuf sejatinya memberikan pengkayaan wawasan, bahwa relasi antara hamba dengan Tuhan semestinya tidak kalkulatif, sebaliknya, apapun ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, semata-mata diniati dan dimaksudkan untuk mendapatkan ridlo Tuhan.

Sebagai ASN, disamping taat dan rajin beribadah kepada Tuhan YME, juga memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi untuk menjalankan tugas yang diemban secara tuntas. Terlebih ketika terkait dengan tugas pelayanan. Kesalehan secara ritual merupakan penghubung kita dengan Tuhan untuk mendapatkan ketenangan batin.

Disamping melaksanakan ibadah yang sifatnya wajib, juga rajin melaksanakan ibadah sunnah untuk menyempurkan

diri. Sementara, kesalehan sosial, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, komitmen dan dedikasi yang baik, serta tuntas dalam menjalankan tugas adalah dimensi penyempurna ketaatan kepada Tuhan.

Dalam konteks organisasi, apakah itu pejabat struktural, fungsional, pramubakti hingga petugas kebersihan, mereka memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing sebagai bentuk implementatif rasa syukur.

Seorang pramubakti bersyukur, karena dengan kesehatan yang dianugerahkan Allah, ia bisa menjalankan tugasnya dengan baik, demikian pula pejabat fungsional umum maupun pejabat fungsional tertentu. Semua memiliki peran untuk berkiprah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Bekal yang mestinya disiapkan adalah ketenangan batin.

Terlebih para pejabat struktural. Mereka memiliki tanggung jawab ekstra, disamping sebagai penanggungjawab program dan kegiatan sekaligus keuangan, mereka juga para pemimpin di masing-masing unit kerjanya.

Semua tanggung jawab yang dipikul, jika disikapi dengan rasa syukur dengan baik dan benar, maka tidak ada rasa berat ataupun beban untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Para pejabat struktural seharusnya selalu memiliki rasa syukur, karena negara sampai dengan saat ini memperlakukan pejabat struktural lebih di atas yang lainnya. Manifestasi syukurnya adalah menjalankan tugas penuh dedikatif dan amanah.

Dalam konteks Kemenag, instansi dengan jabatan

struktural yang besar [11 eselon 1 A, 3 eselon I B, 87 eselon II A, 2 eselon II B, 1534 eselon III, dan 6309 eselon IV] memiliki hirarki dan garis komando yang sangat efektif. Manifestasi syukur yang dimiliki oleh semua pejabat ini, memiliki dampak yang sangat serius terhadap performa kinerja Kemenag yang lebih baik di masa sekarang dan masa datang.

Seperti telah diuraikan, manifestasi rasa syukur dalam konteks pemimpin diwujudkan dalam kepemimpinan yang menginspirasi dan mencerahkan. Meminjam istilah ilmu tajwid, *izhar*, *idghom*, *iqlab* dan *ikhfa*, kepemimpinan bisa mengambil filosofi dari empat kategori cara membaca al-Qur'an yang baik dan benar.

Izhar pengertiannya adalah tegas. Sosok pemimpin harus memiliki ketegasan dalam bersikap, mengambil keputusan sekaligus mengawal keputusan yang telah diambil plus konsekuensi bagi siapa-pun yang tidak mengindahkan keputusan tersebut. Pemimpin dituntut memiliki ketegasan dalam memberikan *reward* dan *punishment* terhadap diri dan para anggota yang dipimpin.

Idghom, arti dalam ilmu tajwid berbaur antara dua konsonan. Dalam kepemimpinan, pemimpin dituntut untuk mampu berbaur, membangun sinergi, menyatukan potensi beragam unit organisasi yang dipimpin. Sinergitas menjadi salah satu kunci keberhasilan roda organisasi. Pemimpin juga memiliki kemampuan akomodatif atas saran, masukan dan ide konstruktif yang disampaikan bawahannya.

Iqlab, arti dalam tajwid mengganti dalam bentuk baru.

Seorang pemimpin juga dituntut untuk berkemauan dan berkemampuan melakukan terobosan dan inovasi. Oleh karenanya, peningkatan kompetensi diri dalam mengemban tugas dan fungsi menjadi niscaya.

Ikhfa', arti dalam tajwid adalah samar. Pemimpin harus men-samar-kan [menyembuyikan] atau meminimalisir kegaduhan yang timbul akibat kebijakan yang diambil. Suasana kondusif menjadi piranti penting kesuksesan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Menurut para kaum sufi, syukur yang telah termanifestasikan dalam kehidupan dengan baik juga memiliki dampak signifikan terhadap sikap batin lainnya. Orang yang selalu bersyukur dengan sepenuhnya dan juga termanifestasikan, menurut para ahli tasawuf, orang tersebut juga akan ridlo dan berprasangka baik kepada Allah atas segala peristiwa dalam kehidupan yang dialami.

Peristiwa dalam kehidupan tentu beragam, menyenangkan, membahagiakan, menyedihkan, menyedihkan bahkan mungkin membuat galau dan marah. Seseorang yang sudah termanifestasikan dengan baik rasa syukurnya kepada Allah, dia akan proporsional menghadapi semua peristiwa yang dihadapi, dan selalu husnudzon kepada Allah, tidak sebaliknya.

Agama Adalah Spiritualitas Bukan Sekadar Syariat

Substansi agama sejatinya adalah spiritual, sementara ritual dan tata cara peribadatan serta berbagai pranata sosial yang digali dari ajaran agama merupakan piranti atau wasilah. Spiritualitas yang dimaksud adalah dimensi batin dan jiwa orang beragama.

Seseorang makin yakin dengan keimanan serta menjalankan ritual yang diajarkan akan semakin menjadi manusia yang utuh. Sikap mentalnya makin kokoh, berpendirian, kepasrahan dan tawakalnya tinggi serta memiliki sifat-sifat mulia selaras dengan kemuliaan ajaran agama.

Dalam konteks ajaran Islam, memang antara syariat tarekat dan hakikat tidak boleh dipisahkan, ketiganya memiliki peran dan fungsi dalam jalan kesempurnaan hidup manusia untuk mendapatkan ridlo Allah. Syariat terkait dengan ajaran *dhohir* dari Islam meliputi bagaimana ber-tauhid, menyembah dan beribadah kepada Allah, sementara tarekat adalah laku atau perjalanan dan ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah, dan hakikat adalah esensi dari ber-Islam itu sendiri, yakni manusia yang utuh karena mendapat ridlo dari Allah SWT.

Memang ada pembahasan tentang masing-masing secara lebih komprehensif, misal yang disampaikan oleh Abu Hasan al-Syadzili dalam *al-Mafākhir al-Āliyah fi l-Ma'ātsir al-Syādziliyyah*, halaman 143, sebagai berikut:

إذا قيل ما الفرق بين الشريعة والحقيقة، الجواب الشريعة ما
ورد به التكليف والحقيقة ما ورد به التعريف، فإذا الشريعة
مؤيدة بالحقيقة والحقيقة مؤيدة بالشريعة

*idzā qīla mā l-farqu baina al-syarī'ati wa l-haqīqati,
al-jawābu al-syarī'atu mā warada bihī al-taklīfu
wa l-haqīqatu mā warada bihī al-ta'rīfu, fa-idzā al-
syarī'atu mu'ayyadatun bi l-haqīqati wa l-haqīqatu
mu'ayyadatun bi -syarī'ati*

*[ketika ditanyakan, apa perbedaan antara syariat
dengan hakekat, jawabannya, syariat berisi beban
tanggung jawab sedangkan hakikat berisi ma'rifat,
hanya saja keduanya saling mengikat, syari'at diikat
dengan hakekat, demikian pula, hakekatpun terikat
dengan syari'at]*

Penjelasan dari Abu Hasan al-Syadzili menunjukkan bahwa syariat lebih merupakan baju dalam beragama, alias orientasinya adalah bentuk dan formula ajaran agama, seperti ritual ibadah, hukum-hukum keagamaan, sementara hakikat mewakili substansi dari adanya formula dan bentuk ajaran tersebut.

Sebagai ilustrasi untuk mempermudah, salat lima waktu, puasa di bulan suci Ramadhan, menunaikan ibadah haji, tata cara, syarat rukun dan segala yang terkait dengan pelaksanaan ketiganya adalah syari'at, sementara hakikatnya adalah menjadi manusia ideal, saleh karena dilatih dengan aktivitas

salat, puasa dan ritual haji.

Salat mengajarkan senantiasa ingat kepada sang pencipta. Bacaan-bacaan salat secara filosofis menggambar ritmik seluruh anggota tubuh untuk selalu bersujud kepada Allah. Pengakuan akan segala kebesaran Allah, dan tidak ada yang pantas disombongkan dari makhluk yang bernama manusia di hadapan Allah. Salat secara syari'at adalah aktivitas dan bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, secara hakikat, ia mengajarkan segala bentuk ketertundukkan, kepasrahan, kekerdilan, keterbatasan, serta ketidak-berdayaan makhluk bernama manusia di hadapan Allah SWT.

Puasa yang didefinisikan sebagai menahan lapar dan haus serta yang membatalkannya semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, juga bukan semata aktivitas fisik. Hakikat puasa lebih pada melatih batin dan jiwa untuk bisa memenej hawa nafsu. Kunci keberhasilan seseorang untuk menjadi orang arif dan bijak adalah kemampuannya memenej nafsu, karena nafsu tidak mungkin dihilangkan.

Ketika Islam hanya dilihat dari perspektif syariat, maka akan dijumpai banyak keragaman, karena tata cara ibadah yang dilakukan, meskipun sumbernya adalah al-Qur'an dan praktek Nabi, tetapi karena rentang waktu yang sedemikian lama, perbedaan madzhab tidak bisa dielakkan. Berbagai ritual ibadah yang dipraktekkan oleh Rasulullah, seiring dengan rentang waktu yang lama, memunculkan tafsir yang beragam di kalangan ahli fikih dan ushul fikih.

Contoh kongkrit adalah ibadah haji. Dalam literatur sejarah, Rasulullah melaksanakan ibadah haji hanya sekali yang dikenal sebagai haji wada'. Akan tetapi, dalam pandangan ulama fikih, peristiwa yang terjadi hanya sekali itupun memunculkan berbagai macam pendapat, diantaranya tentang waktu-waktu utama melempar jumrah.

Untuk itu, agar bisa menggali keislaman dengan lebih dalam, memang sangat dianjurkan untuk memasuki wilayah hakekat seperti juga diajarkan oleh para ulama saleh terdahulu.

Lantas, bagaimana memperkuat spiritualitas? Sebagaimana disebutkan sebelumnya, banyaklah melihat teladan para ulama saleh di masa lalu, yang memang hidupnya telah teruji. Al-Ghazalī menyarankan untuk banyak membaca biografi dan perjalanan hidup para kekasih Allah untuk dijadikan teladan dalam kehidupan kini.

Selengkapnya, al-Ghazalī mengatakan sebagai berikut:

ان اردت مزيدا فعليك بالمواربة على مطالعة حلية الاولياء
وطبقات الاصفياء فهو مشتمل على شرح احوال الصحابة
والتابعين ومن بعدهم

*in aradta mazīdan fa-'alaika bi l-muwādzabati 'alā
muṭāla'ati ḥilyati l-awliyā' wa-ṭabaqāt al-aṣfiyā'
fahuwa musytamillun 'alā syarḥ aḥwāli ṣ-ṣaḥābati
wa t-tābi'īna wa-man ba'dahum.*

[jika kalian ingin mendapatkan informasi tambahan

bacalah selalu buku berjudul Hilyatul Auliya wa-Tabaqatul Asfiya, karena buku ini memuat penjelasan tentang kehidupan para sahabat, tabi'in dan orang-orang setelahnya yang saleh]

Sebagaimana tujuan Kementerian Agama mengajarkan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kepada peserta didik di Madrasah untuk mendapatkan teladan para tokoh yang menorehkan tinta emas dalam peradaban, ASN Kemenag mestinya bisa melakukan hal yang sama.

Para tokoh yang telah teruji kesalehannya oleh sejarah, baik kalangan ulama, pemimpin ormas, birokrat perlu diteladani sebagai figur inspiratif ASN Kemenag. Diharapkan para ASN yang tengah berkiprah kini, dengan memanifestasikan rasa syukur kepada Allah atas semua anugerah yang telah diberikan, diharapkan akan memberi dampak sangat positif bagi peningkatan kinerja dan marwah Kemenag itu sendiri.

Tokoh Agama dan Konflik Sosial

Masyarakat menjadikan seseorang sebagai tokoh tidak tanpa sebab, melainkan berdasarkan berbagai pertimbangan, diantaranya pengetahuan, pergaulan dan jejaring, kedermawan, kebaikan, dan kearifan. Begitu pula dengan tokoh agama. Mereka yang dianggap sebagai tokoh agama biasanya karena keilmuan agamanya, menjadi rujukan persoalan keagamaan, bahkan kearifan dan spiritualitasnya.

Dalam struktur masyarakat Indonesia yang masih menghargai keberadaan tokoh, para agamawan memainkan peran penting dalam mengawal agama sebagai fungsi kohesi atau ikatan sosial. Agama dibawa sebagai unsur perekat sesama anggota masyarakat yang beragam, sehingga konflik yang diatas-namakan agama bisa dihindari.

Konflik sosial yang terjadi di masyarakat, dalam pandangan sosiologi, lebih diakibatkan oleh kesenjangan dalam berebut sumber daya. Bagi masyarakat perdesaan akses konflik sosial bisa diminimalisir karena masih efektifnya kearifan-kearifan lokal sebagai jembatan penyelesaian konflik. Akan tetapi, bagi masyarakat perkotaan, konflik sosial akan lebih rumit, terlebih jika diampifikasi dengan latar belakang etnik-budaya. Bahkan yang lebih berbahaya apabila digoreng dengan isu agama.

Oleh karena itu, peran para tokoh panutan, khususnya tokoh agama masih sangat signifikan, jangan sampai agama dibawa ke ranah konflik oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Konflik-konflik sosial yang melanda sebagian wilayah,

menurut filsafat sosial, dipengaruhi oleh setidaknya 4 faktor; yaitu: i] *deprivasi relatif*; ii] *dislokasi*; iii] *disorientasi*; dan iv] *negativisme*.

Hannah Arendt, seorang filsuf sosial menyatakan bahwa salah satu sumber konflik adalah perasaan ditinggalkan oleh orang lain, *Gefühl der Verlassenheit*. Ketika distribusi kesejahteraan tidak merata, khususnya di masyarakat perkotaan, ada sebagian kelompok yang tidak ikut menikmati kemajuan ekonomi, maka dipastikan akan muncul perasaan ditinggalkan tersebut.

Deprivasi relatif adalah perasaan ditinggalkan oleh komunitas lainnya. Ketika masyarakat asli dan pendatang berbaur, lalu kesejahteraan ekonomi lebih berpihak kepada pendatang, sementara masyarakat asli tidak ikut mendapatkan, maka, akan muncul deprivasi relatif sebagai sumber paling awal munculnya konflik sosial.

Tahapan berikutnya adalah munculnya dislokasi. Komunitas tertentu yang tadinya mudah untuk akses ekonomi, pekerjaan dan mencari nafkah relatif lebih mudah, lalu akibat industrialisasi, lahan makin sempit karena dikuasai oleh para pemodal, mereka menjadi kelompok yang terpinggirkan.

Komunitas yang terpinggirkan ini akan semakin merasa tidak nyaman, padahal hidup di daerahnya sendiri. Akses dari pembangunan ekonomi, investasi semestinya diperhatikan agar tidak menciptakan benih-benih potensi konflik.

Perasaan ditinggalkan, tidak mendapatkan akses kesejahteraan ekonomi, penghidupan yang dirasa makin susah

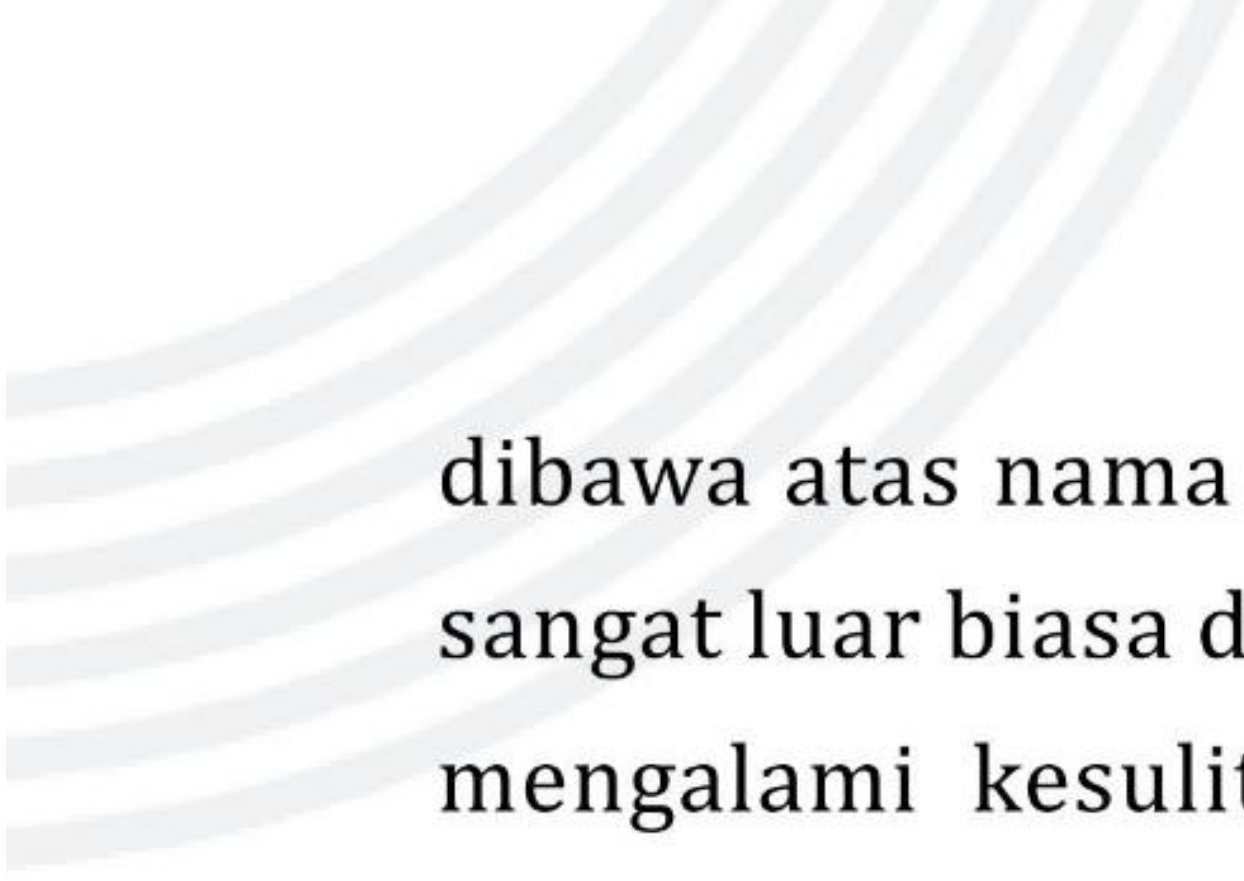
akan mempermudah seseorang untuk berbuat yang tidak baik. Merasa tidak nyaman di daerahnya sendiri mendorong seseorang untuk mencari siapa yang bisa disalahkan. Oleh karenanya, diperlukan kearifan para pemimpin daerah untuk memfikirkan dan mencarikan jalan keluar, jangan sampai di masyarakat muncul rasa tertinggal dan tidak nyaman di daerahnya sendiri.

Jika tidak diantisipasi, deprivasi relatif dan dislokasi akan memunculkan disorientasi. Seseorang atau sekelompok akan mengalami tidak punya harapan banyak dalam hidup. Dengan kata lain, akibat yang akan dirasakan oleh masyarakat seperti ini adalah tidak punya optimisme di masa depan.

Secara psikologis sekelompok masyarakat yang mengalami disorientasi di daerahnya sendiri, jika tidak diantisipasi dan dicarikan alternatif keluarnya akan menjelma menjadi kelompok yang tidak lagi mengindahkan sendi kearifan lokal

Akibat serius yang ditimbulkan setelah mengalami disorientasi adalah negativisme. Semua yang datang dari luar daerahnya dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Apapun dan siapapun akan dipersepsikan negatif. Empat sebab yang disebutkan tadi menjadi sangat berbahaya apabila dalam struktur masyarakat tidak ada lagi unsur-unsur yang menjadi perekat kebersamaan.

Dalam konteks ini, tokoh agama yang masih dijadikan panutan mampu meredam akar-akar atau potensi konflik tadi. Demikian pula, para tokoh agama bisa menghindarkan agama dari instrumentalisasi konflik, mengingat jika konflik



dibawa atas nama agama, biaya sosial yang akan ditimbulkan sangat luar biasa dan proses rekonsiliasi-nya pun akan banyak mengalami kesulitan. Para tokoh agama memainkan peran yang sangat penting, membawa agama sebagai unsur perekat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menebar Cinta Kepada Sesama

Sebesar dan sekuat apapun tubuh manusia, pasti akan kembali kepada sang Pencipta. Setinggi apapun pangkat dan jabatannya, pasti akan berakhir juga. Tak ada yang abadi. Semua akan kembali menghadap Ilahi.

Duniawi perlu disikapi secara wajar, tidak berlebihan. Jadikan hal-hal yang bersifat duniawi menjadi wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan *ukhrawi* yang hakiki.

Untuk mendapatkan kebahagiaan, para ulama sufi menyarankan, dengan ketenangan hati. Doa dan munajat adalah piranti. Karena dengan doa dan munajat, keridlaan, ampunan, hidayah, dan rahmat-Nya insya Allah dapat diraih.

Munajat adalah ekspresi cinta hamba kepada Allah SWT. Kecintaan kepada Allah, dalam konsepsi tasawuf juga diwujudkan melalui kecintaan kepada ciptaan-Nya. Seorang yang dengan istiqamah bermunajat untuk mendapatkan ridla dari-Nya, ekspresi kecintaannya kepada Pencipta diwujudkan dengan cinta terhadap sesama, dalam perspektif tasawuf layak mendapatkan pintu-pintu *ma'rifat*.

Kecintaan terhadap sesama tentu memiliki arti dan dimensi yang luas. Cara sederhana bisa dilakukan oleh ASN yang sedang melaksanakan tugas. Cinta terhadap tugas yang sedang diemban bisa dikategorikan sebagai bagian dari cinta terhadap sesama.

Mencintai pekerjaan memiliki implikasi terhadap sikap totalitas dalam mengemban amanah. Penunaian tugas dengan

penyuh rasa cinta akan mampu menjadi piranti efektif seseorang menghindari diri dari perbuatan yang tidak dibenarkan.

Kecintaan terhadap pekerjaan bukan berarti seseorang tidak memiliki cita-cita untuk mengembangkan dirinya dalam tugas dan pangkat serta derajat yang lebih tinggi. Kecintaan terhadap pekerjaan justru mewakili dedikasi sekaligus ridla dengan skenario Tuhan atas dirinya untuk amanah yang lebih besar.

Seseorang dengan sikap batin yang demikian akan merasa ringan dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang diemban serta tidak mudah berputus asa ketika luput dari promosi ataupun amanah yang lebih tinggi. Keberhasilan dan tertundanya keberhasilan disikapi sama, santai dan tetap *enjoy*.

Ibn Atho'illah al-Sakandari memberikan nasihat yang relevan terkait dengan pengembangan karir seseorang, termasuk karir sebagai ASN. Ajaran tasawuf juga relevan dikaitkan dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP 11/2017 tentang Manajemen ASN, khususnya terkait dengan mekanisme promosi jabatan.

Selengkapnya ibn Atho'illah dalam *al-Hikam* mengatakan sebagai berikut :

لا يكن تاخر امد العطاء مع الالحاح في الدعاء موجبا لياسك
فهو ضمن لك الاجابة فيما يختاره لا فيما تختار لنفسك وفي
الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد

*lā yakun ta'akhkhuru amadi l-'atā'i ma'a l-ilhāhi
fid-du'āi mūjiban li-ya'sika fa-huwa ḍamina laka
al-ijābata fī-mā yakhtāruhu lā fī-mā takhtāru li-
nafsika wa fi l-waqtī alladzī yurīdu lā fi l-waqtī
alladzī turīdu*

*[tertundanya anugerah pada saat kamu telah
mengupayakannya dengan sungguh-sungguh dan
juga terus berdoa janganlah membuatmu sampai
putus asa. Tuhan menggaransi akan memberikan
anugerah itu, dalam bentuk yang Allah kehendaki
dan waktu yang Allah pilih untuk kamu]*

Undang-Undang ASN dan PP Manajemen ASN meniscayakan Pejabat Pimpinan Tinggi, baik Pratama, Madya maupun Utama menggunakan pola lelang terbuka. Semua yang memenuhi persyaratan administratif punya hak yang sama untuk mengikuti seleksi. Layaknya sebuah seleksi terbuka, formasi yang diperlukan pasti lebih sedikit dibanding yang berminat. Bahkan untuk sampai akhir hanya terpilih tiga terbaik, lalu hanya akan dipilih satu dari tiga yang diajukan oleh panitia seleksi untuk JPT Pratama, atau oleh pimpinan K/L untuk Madya dan Utama.

Bekal tasawuf menjadi sangat penting, karena keinginan dan garis tangan adalah dua hal yang berbeda. Berusaha untuk mendapatkan sesuatu merupakan kewajiban, akan tetapi berusaha dengan mentargetkan untuk meraih sesuatu akan berakibat tidak positif. Resep tasawuf digunakan untuk

berusaha secara maksimal, hasil akhirnya, serahkan kepada Allah, Dzat Yang Maha Tahu atas anugerah jabatan kepada yang berusaha.

Apabila dianugerahi, laksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab, sebaliknya jika belum terpilih, anggap-lah jabatan tersebut belum pas dan belum saatnya. Allah Maha Tahu akan hikmah di belakang kegagalan dalam seleksi tersebut.

Kesuksesan atau kegagalan dalam seleksi jabatan tidak mengurangi cinta seseorang kepada tugas yang sedang diemban. Tugas sejatinya adalah lahan ibadah jika diniati dengan baik dan tulus. Oleh karenanya, tebarkan selalu rasa cinta kepada siapapun dalam konteks mengejawantahkan rasa cinta kepada Allah SWT dalam pengertian tasawuf.

Akhir kata, cinta yang diekspresikan akan memberikan warna positif di tengah-tengah masyarakat. Tanpa bermaksud hiperbola [*lebay*], bangsa ini memang butuh rasa cinta. Cinta yang tulus, bukan cinta yang tendensius. Cinta yang memberi, bukan cinta yang meminta. Cinta yang membangun, bukan cinta yang menghancurkan. Karena bagaimanapun, persatuan dan persaudaraan antar warga bangsa saat-saat ini berada di atas segalanya.

Ormas Islam Perekat Bangsa

Dalam kesempatan Rapat Koordinasi Ormas-Ormas Islam yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sebagai Sekjen Kemenag, saya menyampaikan beberapa pokok pikiran untuk menjadi bahan kajian tindak lanjut kebijakan di Ditjen Bimas Islam maupun ormas-ormas Islam.

Ormas-ormas Islam memiliki kontribusi signifikan di dalam mengemban dan mewujudkan masyarakat muslim moderat. Pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendiri, karena umat Islam banyak terwadahi di berbagai ormas. Cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah menjadikan ormas keislaman sebagai mitra strategis pemerintah.

Kebijakan pemerintah dalam bidang agama dan keagamaan adalah menjadi agama sebagai salah satu perekat kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan keniscayaan, disamping bangsa Indonesia adalah bangsa religius, juga terdiri dari berbagai umat beragama. Oleh karenanya, ormas keislaman memiliki tanggung jawab untuk mencerahkan umatnya terkait kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tantangan Ormas Islam sekarang adalah banyaknya faham keislaman yang dianut umat, sekaligus banyaknya varian madzhab. Meski keragaman madzhab tidak perlu dikhawatirkan karena telah berjalan beratus tahun yang membuat Islam di Indonesia selalu dinamis.

Yang perlu menjadi perhatian adalah faham keislaman

yang cenderung menegasikan kelompok lain yang berbeda. Kelompok yang memiliki paham seperti ini, dalam literatur sejarah Islam dikenal dengan *khawārij*, memiliki pengaruh, mengingat sebaran paham di era kini jauh lebih efektif karena menggunakan media-media sosial sebagai basis diseminasinya.

Oleh karena itu, apa peran dan kontribusi ormas Islam untuk memperkuat moderasi beragama, atau moderasi ber-Islam dalam konteks keindonesiaan. Sekaligus apa peran yang semestinya diambil oleh ormas Islam dalam mewujudkan agama sebagai dimensi perekat kehidupan berbangsa dan bernegara?

Tantangan lain ormas Islam, terkait pola pikir anak muda khususnya dalam cara beragama tentu berbeda jauh dengan cara beragama yang dianut oleh orang tuanya sehingga akan sangat bermakna bila Ormas Islam mau membuka diri, terhadap kenyataan sosial sekarang yang jauh berbeda.

Setidaknya ada tiga hal besar yang perlu dilakukan oleh ormas-ormas Islam, yakni: *i] memperbaiki dan meng-update konten pesan-pesan keislaman; ii] memperbarui metode dan strategi komunikasi publik, iii] perubahan target group pesan-pesan keislaman.*

Pertama, di era seperti sekarang, konten keislaman perlu dilakukan revitalisasi berbasis sumber-sumber yang otoritatif. Banyaknya kanal media sosial dan mudahnya orang menyampaikan ceramah keislaman tanpa garansi keilmuan keislaman yang memadai menjadi tantangan tersendiri. Jika tidak ada gerakan masif dari ormas untuk merevitalisasi

bahan-bahan dakwah dikhawatirkan masyarakat akan sangat mudah terbawa faham-faham keislaman ekstrem yang justru jauh dari teladan-teladan Rasulullah para sahabat dan ulama-ulama saleh terdahulu.

Dalam sebuah hadits riwayat imam Muslim dari Jābir ibn Abdillah, disebutkan suatu ketika, selesai perang Hunain [daerah antara Taif dan Mekkah] Nabi membagi rampasan perang kepada para kaum Muslim. Para sahabat senior tidak mendapatkan harta tersebut, justru orang-orang [sahabat] baru yang mendapatkannya.

Timbullah protes dari seseorang agar Rasulullah berbuat adil, direspon oleh Rasulullah, adakah orang yang lebih adil dibanding Rasulullah saat itu. Protes seseorang tersebut membuat Umar ibn al-Khatab marah dan meminta izin untuk menghukumnya, tetapi dilarang oleh Rasulullah, sambil beliau menyabdakan sebagai berikut:

ان هذا واصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون
منه كما يمرق السهم من الرمية

inna hādzā wa-aṣḥabahu yaqra'ūna l-qur'āna lā yujāwizu ḥanājirahum yamruqūna minhu kamā yamruqu s-sahmu min al-ramiyyati

[sesungguhnya orang ini dan anak keturunannya nanti, membaca al-Qur'an, akan tetapi bacaan mereka tidak mampu melampaui tenggorokannya, mereka terlepas dari pesan kandungan al-Qur'an seperti lepasnya anak panah dari busurnya]

Friksi faham keislaman telah diprediksi oleh Rasulullah berdasar hadis di atas. Artinya kelompok yang mengaku dirinya Muslim, akan tetapi memiliki pandangan yang ekstrem eksis dalam sejarah peradaban Islam. Hal ini jika tidak diwaspadai akan memiliki pengaruh terhadap masyarakat Muslim, berfaham yang justru ekstrem.

Kedua, disamping konten keislaman yang harus direvitalisasi agar bisa memperkuat dan memperbanyak pengikut faham keislaman yang moderat, cara, metode dan strategi penyampaian juga harus di-*update*.

Para ulama saleh telah memberikan contoh tradisi tulis yang amat produktif. Tradisi lisan, seperti ceramah, *tabligh* maupun lainnya memang penting, akan tetapi jangan sampai meninggalkan tradisi tulis. Metode penyampaian lisan dan tertulis perlu dilakukan simultan oleh ormas-ormas Islam, sehingga sumber-sumber keislaman yang dipakai bisa dipertanggungjawabkan.

Yang juga tidak kalah penting adalah saluran untuk menyampaikan ke publik, atau strategi komunikasi publiknya. Era sekarang serba digital. Kanal-kanal media sosial sudah semestinya dipenuhi oleh ormas Islam dengan materi-materi keislaman yang mencerahkan dan menyejukkan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat umum mendapatkan kemudahan memperoleh materi-materi keislaman yang menyejukkan melalui kanal media-media sosial.

Ketiga, target sasaran pembaca, pendengar maupun pengakses haruslah generasi remaja dan generasi muda. Kaum kaum

terpelajar perkotaan, para eksekutif muda di berbagai profesi sangat membutuhkan ajaran-ajaran Islam yang *up to date* di mata mereka. Mudah dicerna, mudah dipraktikkan sekaligus rasional. Generasi *zennial* dan *millenial* di Republik ini sekarang prosentasenya tentu lebih besar dibandingkan dengan generasi usia 40 tahun ke atas.

Oleh karena itu, ormas-ormas Islam diminta melakukan tiga terobosan untuk bisa menghadirkan konten ajaran Islam yang moderat, kosmopolit, modern sekaligus mencerahkan.

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dituntut untuk sadar kenyataan akan dinamika masyarakat Muslim yang luar biasa. Paradigma sekedar menjalankan program, menghabiskan anggaran harus dibuang jauh, karena dituntut untuk bisa sinergi dan bermitra seiring dengan ormas-ormas Islam untuk mencerahkan umat.

Jika sinergitas bisa diwujudkan, maka penguatan moderasi beragama, dalam konteks Islam, moderasi ber-Islam bukanlah utopi. Sebaliknya akan terwujud, pelan tapi pasti. Insya Allah.

Situasional Dalam Dakwah Islam

Dalam kesempatan Rapat Koordinasi bidang Penais [Penerangan Agama Islam] se-Indonesia akhir tahun 2019 lalu, yang mengambil tema Peran Dai terhadap Masyarakat dan Kondisi Kekinian, sebagai Sekretaris Jenderal, saya menyampaikan beberapa pesan untuk direnungkan Direktorat Penais Kemenag dan jajarannya. Bahan renungan untuk pertimbangan Direktorat Penais adalah; *i] revitalisasi dakwah; ii] dakwah dalam sejarah peradaban Islam; iii] perlunya kebijakan berorientasi kekinian dan masa depan.*

Bagi saya, dakwah yang disampaikan para dai atau *mubaligh* adalah perintah agama, seperti disinyalir dalam hadis, “sampaikanlah dariku meski cuma satu ayat.” Kewajiban untuk menyampaikan ilmu tentunya seiring dengan kewajiban untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Sehingga seseorang yang menyampaikan pesan keislaman kepada masyarakat betul-betul mumpuni dari sisi kedalaman keilmuan keislamannya.

Revitalisasi Dakwah

Dalam peradaban Islam, dakwah tidak sekedar menyampaikan secara lisan dengan berceramah, melainkan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan metode yang dimiliki. Para ulama yang produktif menulis, dakwah mereka dengan tulisan, yang berbakat seni, dakwahnya dilakukan dengan media seni, demikian pula yang ahli ceramah, dakwahnya dengan ceramah.

Ada lagi dakwah dengan tindakan nyata, yang kemudian dalam literatur pesantren dikenal dengan dakwah bi l-hal, seperti kata pepatah *lisān al-ḥāl afṣaḥu min lisān al-maqāl* [media perbuatan lebih efektif ketimbang media ceramah lisan].

Praktek keseharian yang menjadi rujukan dakwah dalam arti menyampaikan kebaikan adalah Rasulullah saw sendiri. Dalam literatur hadis maupun sirah, Nabi dikenal sangat situasional ketika menjawab pertanyaan sahabat yang menjadi murid pengajian beliau.

Jawaban atas pertanyaan yang sama bisa beragam, tergantung siapa yang mengajukan pertanyaan. Misal, suatu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, “wahai Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling utama” [redaksi hadis banyak menggunakan kalimat “*ayyu l-a‘māli afḍalu*”]. Karena yang bertanya adalah orang yang berkecukupan, maka jawaban Nabi adalah sedekah. Di kesempatan lain, karena yang bertanya adalah orang yang tidak mampu, maka sedekah diberi penjelasan, bahwa senyum adalah sedekah, *al-tabassum ṣadaqatun*.

Dakwah dalam Sejarah

Rasulullah sebagai rujukan dakwah memberikan teladan yang situasional, terukur dan dengan cara yang fleksibel. Banyak riwayat hadis yang menyebutkan Rasulullah memancing para sahabat dengan pertanyaan, yang lalu menjawab pertanyaan tersebut setelah respon para sahabat tidak ada yang tepat.

Di kesempatan lain beliau menjelaskan sesuatu dengan ilustrasi atau analog, sementara di kesempatan lain lagi beliau memberikan penjelasan dan uraian tanpa pertanyaan sahabat.

Seiring dengan perkembangan peradaban Islam, para ulama mengembangkan syiar dan dakwah sesuai dengan spesialisasi keilmuan dan berbagai metode yang dipilih.

Literatur-literatur keilmuan keislaman menunjukkan syiar keilmuan yang tidak pernah redup. Disiplin keilmuan, seperti tauhid, fikih, ushul fikih, tasawuf, tafsir berkembang sedemikian pesat sekaligus menjadi bagian dari dakwah keilmuan para ulama.

Mereka yang berkecimpung dalam keilmuan keislaman selalu menghadirkan sesuatu yang baru, hasil pengambilan posisi di tengah-tengah karya-karya keilmuan ulama sebelumnya.

Salah satu contoh yang bisa dikemukakan adalah tokoh dalam tafsir dan ilmu tafsir, al-Syaukani [1759-1834] yang menulis tafsir diberi judul *Fatḥ al-Qadīr*, tafsir yang otoritatif di masanya. Beberapa kalimat penting al-Syaukani dalam melakukan positioning karya tafsirnya sebagai dakwah keilmuan adalah sebagai berikut:

ان غالب المفسرين تفرقوا فريقين وسلکوا طريقين، الفريق
الاول اقتصروا في تفاسيرهم على مجرد الرواية وقنوا بهذه
الرواية، والفريق الاخر جردوا انظارهم الى ما تقتضيه اللغة
العربية وما تفيده العلوم الالوية ولم يرفعوا الى الرواية راسا
وبهذا يعرف انه لا بد من الجمع بين الامرين وعدم الاقتصار

inna ghāliba l-mufassirīna tafarraqu farīqaini wa-salakū ṭarīqaini; al-farīq al-awwalu iqtaṣarū fī tafāsīrihim ‘alā mujarradi l-riwāyati wa-qana‘ū bi-hādzihi r-riwāyah wa l-farīq al-ākharu jarradū anṣarahum ilā mā taqtaḍīhi al-lughatu al-‘arabiyyatu wa-mā tufiduhu al-‘ulūm al-āliyatū wa-lam yarfa‘ū ila l-riwāyati ra’san...

wa-bihādzā yu’rafu annahū lā budda min al-jam‘i baina l-amraini wa-‘adami l-iqtiṣāri ‘alā maslaki aḥadi l-farīqaini.

[umumnya para mufassir terpilah menjadi dua kelompok dan menempuh dua metode penafsiran. Kelompok pertama mengandalkan dan mencukupkan diri pada metode riwayat dalam menafsirkan al-Qur’an, sedangkan kelompok yang kedua mendasarkan metode tafsirnya pada aspek bahasa Arab dan ilmu-ilmu terkait lainnya serta mengabaikan riwayat

Bagi saya, perlu diketahui, penafsiran al-Qur’an meniscayakan dua jalur metodologis secara simultan tidak dipisahkan seperti mereka para mufassir yang sudah lalu].

Al-Syaukani memberikan uraian dalam mempertemukan dua kutub ekstrem dalam madzhab penafsiran. Keduanya

tentu memiliki kelebihan masing-masing. Akan tetapi, menurutnya, juga memiliki kelemahan masing-masing yang cukup mendasar.

Bagi kelompok pertama, tafsir berdasarkan riwayat, kelebihannya otentik seperti yang dilakukan oleh para generasi awal Islam. Tafsir bukanlah ilmu yang dipaksakan, tetapi ilmu yang mendasarkan diri para praktek-praktek generasi awal Islam. Tetapi, dalam konteks kekinian, metode tafsir kelompok pertama tidak mungkin bisa dijalankan karena tafsir terhadap teks membutuhkan ilmu bantu yang senantiasa terus berkembang.

Sementara, kelompok kedua memiliki kelebihan dalam hal kreativitas berfikir, memberikan pemaknaan terhadap kitab suci dengan alat bantu ilmu pengetahuan. Namun, kelemahannya, kehilangan sisi historisnya karena mengabaikan tradisi periwayatan.

Al-Syaukani hadir untuk mendakwahkan ilmu tafsir yang memperjumpakan dua kelompok ekstrem tersebut. Apa yang dilakukan al-Syaukani adalah ikhtiar memperbaiki konten dakwah keilmuan, agar ilmu bisa terus berkembang dan dirujuk oleh para ilmuwan serumpun sehingga peradaban keilmuan menjadi semakin maju seiring perkembangan zaman.

Dit Penais dan Dakwah Kekinian

Dalam konteks pemangku kebijakan di Kemenag, dakwah memang seharusnya disesuaikan dengan kondisi, kemampuan masyarakat untuk menyerap, sekaligus diperkaya dengan

pesan-pesan membangun kebersamaan. Jangan sampai dakwah kemudian dibawa dan diinstrumentalisasi untuk kepentingan politik sesaat.

Untuk itu, Kemenag harus selalu *update* dengan tantangan kekinian. Cara yang dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi nasional tentu sudah tepat, yakni menggali keragaman tantangan dakwah di masing-masing Provinsi dan Kabupaten Kota.

Karena sebagai pemangku kebijakan, Kemenag memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan tentang dakwah Islam yang menjadi panduan bagi ormas Islam sebagai mitra, utamanya juga para dai/*mubaligh*.

Kemenag juga terus dituntut untuk peka dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, agar kebijakan yang dikeluarkan senantiasa sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.

Para dai/*mubaligh* juga diminta memiliki piranti yang lengkap, seiring dengan kebijakan pemerintah agar dakwah menjadi gerakan pencerah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“

Sebelum menunaikan tugas, bersihkan hati, kuatkan tekad, luruskan niat semata-mata untuk beribadah kepada Allah sebagai petugas haji. Jauhkan dari pikiran tentang haji gratis dan mendapatkan tambahan honor karena akan merusak nilai pengabdian dan pelayanan kepada jemaah haji





BAB V

Haji dari Sisi Tasawuf

Konsultan Ibadah Haji Perempuan Ditambah

Keberadaan jemaah haji Indonesia yang didominasi perempuan menghasilkan keputusan penambahan konsultan perempuan pada penyelenggaraan ibadah haji 2020. Pengalaman pada tahun 2019 hanya ada satu perempuan dari 25 konsultan haji di daerah kerja Mekkah.

Proporsi konsultan ibadah haji perempuan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Kuota jemaah haji Indonesia 2019 dengan tambahan mencapai 231 ribu dengan kategori 214 ribu jemaah reguler yang dikelola pemerintah dan sisanya jemaah haji khusus yang dikelola biro-biro perjalanan haji. Dari 214 ribu jemaah reguler, angka yang dominan adalah kaum perempuan. Oleh karenanya, menambah konsultan ibadah perempuan menjadi kebutuhan, karena kaum

perempuan merasa lebih leluasa ketika berkonsultasi tentang ibadah kepada konsultan perempuan.


Sebagai ilustrasi umum, berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), dari 214.000 jemaah haji Indonesia yang reguler, 56 persennya merupakan jemaah perempuan, sedangkan laki-lakinya 44 persen. Dari jumlah itu, sebanyak 73.500 berusia 51-60 tahun. Bahkan, 62.800 usianya di atas 61 tahun.

Dari sisi pendidikan, sebanyak 70.200 ribu hanya lulus SD. Sementara sebanyak 24.900 lulusan SMP. Jumlah jemaah yang lulus SLTA sebanyak 51.500. Kemudian lulusan diploma sebanyak 12.300, sarjana sebanyak 45.200, strata 2 sebanyak 700, Strata 3 sebanyak 4000 orang, dan terdapat 1.200 yang tidak masuk semua kategori.

Kegiatan konsultan ibadah merupakan etape akhir ketika pembimbing ibadah tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan jemaah yang cukup rumit dan membutuhkan rujukan fikih lebih memadai. Dalam kasus konsultan ibadah perempuan, penjelasan yang lebih detail secara fikih dan hal lain yang terkait menjadi solusi yang melegakan bagi pertanyaan jemaah.

Sebagai contoh, kebutuhan penjelasan kepada jemaah perempuan terkait membedakan antara haidh dengan istihadah/penyakit, tentu lebih nyaman jika konsultasinya kepada kaum perempuan.

Contoh lain, para jemaah perempuan, karena berhaji dengan suami atau orang tua misalnya, menjadi dilematis




ketika suaminya sakit atau orang tuanya yang sakit. Apakah lebih utama merawat suami atau orang tuanya, ataukah lebih baik beribadah sunnah sebanyak-banyaknya. Beberapa pertimbangan fikih maupun psikologis terhadap persoalan kaum perempuan akan banyak terjawab dengan lebih komprehensif oleh konsultan ibadah perempuan.

Ketika semua jemaah telah terkonsentrasi di Mekkah, maka peran dari pembimbing sampai dengan konsultan ibadah dituntut sangat maksimal. Persiapan inti ibadah haji, yang biasa disebut dengan rangkaian ritual fisik di Arafah, Mudzdalifah dan Mina peran kunci konsultan ibadah sangat diharapkan untuk memberi penjelasan terkait manasik ketika ada perbedaan madzhab fikih. Misal, beberapa menghendaki hari Tarwiyah sehari sebelum hari Arafah, keputusan untuk mengambil apakah nafar awal atau nafar tsani dalam melempar jumroh dan lain sebagainya.

Belum lagi terkait dengan apa saja yang sebaiknya dilakukan ketika jemaah sudah berada di Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, berikutnya apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh jemaah ketika di Mina dengan kondisi yang belum seperti yang diharapkan.

Bagi konsultan ibadah, khususnya konsultan perempuan, peran untuk menjadi “penenang” jemaah juga sangat diharapkan. Yang dimaksud adalah, ibadah di Arafah, Mina dengan tetap tidak mematikan telepon genggam, di satu sisi bermanfaat, namun di sini lain bisa mengurangi kekhusu’an, jika pemakaiannya tidak dikontrol dengan baik oleh jemaah



itu sendiri. Pesan untuk manajemen diri seperti ini, jika disampaikan oleh konsultan perempuan kepada jemaah perempuan biasanya lebih efektif.

Hal lain sebagai contoh sisi positif adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi saat wukuf di Arafah dan mabit di Mina. Konsultan bisa memberikan saran-saran kepada para jemaah kaum ibu agar hati-hati menggunakan telepon genggam ketika berada di dua tempat tersebut. Tahun 2019 terjadi hujan di Mina, ketika hujan pastilah banjir karena kontruksi tanah di Arab Saudi dan tidak disiapkan saluran-saluran pembuangan air, agar aman maka sebagian listrik dipadamkan. Kebiasaan menggunakan telepon genggam lalu direkam dan *dishare*, yang terjadi adalah *hoax* Mina banjir, yang menciptakan kekhawatiran bagi keluarga jemaah di tanah air.

Konsultan ibadah bisa menjadi kanal penyampai nasihat bijak dalam berkomunikasi dan ber-media sosial. Dampaknya tentu, seperti yang diharapkan bersama, para jemaah bisa menjalankan ritual haji dengan tenang dan khusu', keluarga yang ditinggalkan di tanah tidak menjadi was-was akibat *hoax* yang disebarluaskan akibat kurang bijak dalam menggunakan piranti teknologi informasi.

Media Center Haji (MCH) dan Antisipasi Hoax

Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak semata layanan transportasi, akomodasi dan konsumsi. Itu semua hanyalah wasilah atau sarana prasarana. Selain wasilah yang baik, substansi haji yang sebenarnya adalah bagaimana jemaah bisa menggapai kemabruran dalam ibadah.

Haji merupakan perjalanan ibadah, bukan semata ritual jalan-jalan. Karenanya, pemahaman jemaah terhadap manasik sangat penting.

Di sinilah tim Media Center Haji (MCH) mengemban peran profesi untuk ikut mengedukasi jemaah tentang proses ibadah haji yang baik. MCH juga diminta untuk meniatkan fungsi dan tugas MCH sebagai ibadah agar segala proses yang dilakukan juga bernilai ibadah, tidak semata kerja profesional.

Antisipasi Hoax

Petugas haji yang tergabung dalam MCH pada musim haji 2019 keseluruhan ada 30 jurnalis, terdiri dari wartawan media cetak, online, televisi, radio, serta fotografer profesional yang dipilih melalui mekanisme seleksi dalam MCH 2019.

Dalam menjalankan perannya sebagai MCH, verifikasi dan klarifikasi dalam setiap informasi menjadi hal penting. Sebab berita haji sangat ditunggu masyarakat, tidak hanya jemaah, tapi juga keluarga jemaah dan masyarakat di tanah air. Jangan sampai pemberitaan tim MCH justru meresahkan, sehingga pemberitaan harus berimbang sesuai kode etik jurnalistik


yang berlaku serta memperhatikan narasi yang mencerahkan dan mengedukasi.

Persoalan katering, pemondokan, transportasi memang tidak pernah ada yang sempurna, selalu ada kekurangan di sana sini. Akan tetapi Kementerian Agama telah berusaha sangat maksimal untuk memperbaiki sarana-sarana tersebut dari tahun ke tahun. Tidak pernah ada gading yang tak retak, peribahasa yang tepat untuk menggambarkan upaya-upaya Kemenag untuk memperbaiki layanan haji kepada jemaah.

Kasus-kasus yang muncul, seperti makanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan selera atau cita rasa Indonesia, bus solawat yang selalu penuh sesak dan lain sebagainya acapkali dikeluhkan oleh sebagian jemaah. Jurnalis mestinya tidak perlu menjadikan hal-hal ini sebagai *angle* pemberitaan, karena dampaknya akan kontra produktif, karena kasus kecil seolah merepresentasikan 214 ribu jemaah secara keseluruhan.

Tentu pemberitaan seperti ini tidaklah arif, karena menegaskan langkah-langkah perbaikan yang sudah setiap tahun dilakukan. Para jurnalis sebaliknya bisa membantu Kementerian Agama dalam hal mengedukasi masyarakat yang belum berhaji di tahun 2019.

Misal, dengan membuat ulasan tentang bagaimana situasi Arafah, berapa derajat suhunya, bagaimana situasi ketika wukuf, apa saja yang mestinya dipersiapkan oleh para calon jemaah ketika jurnalis menyaksikan prosesi wukuf di Arafah. Akan juga lebih baik, ketika secara kontinyu, disamping memberitakan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, mereka bisa memberikan



uraian-uraian pandangan mata terhadap aktivitas jemaah gelombang pertama di Madinah dan mereportasikan dinamika keseharian jemaah selama mereka melaksanakan arbain di Madinah.


Kemudian saat jemaah selesai arbain dan bergerak ke Mekkah, titik krusialnya ada di Bir Ali ketika miqat untuk yang pertama kali. Kekurangan-kekurangan apa saja yang para jurnalis lihat, diberitakan tentu menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah untuk perbaikannya.

Lagi-lagi, di era sekarang, gangguan yang serius adalah ketika ada *hoax*. Pemberitaan terkait isu haji, bukan hanya untuk jemaah haji Indonesia tetapi juga untuk keseluruhan, acapkali beredar isu-isu geo-politik di Timur Tengah yang bisa menciptakan suasana kurang nyaman.

Para jurnalis MCH juga diminta peran aktifnya untuk meluruskan sebaran-sebaran berita *hoax* tersebut agar jemaah pada khususnya, dan masyarakat Muslim Indonesia pada umumnya merasa lebih tenang pada musim haji yang sedang berjalan.

Para jurnalis MCH memang diharapkan membantu optimal, sehingga apabila benar-benar diniati ibadah dengan tulus, dalam pandangan ushul fikih, ibadah mereka memiliki nilai tambah. Karena bertugas meliput di Arab Saudi, baik Madinah, Mekkah, Arafah, Mudzdalifah dan Mina, mereka tentu berkesempatan mengerjakan ibadah murni, baik yang wajib maupun yang sunnah.

Karena profesi mereka yang ikut membantu mengedukasi



jemaah dan mencerahkan masyarakat, maka nilai tambahnya dari ibadah sosial melalui keahlian yang mereka miliki.

Petugas Haji, Ibadah Tertinggi ala Sufistik

Penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun mendapat perhatian tersendiri dari masyarakat luas. Sebagai ibadah yang menjadi rukun Islam kelima, penyelenggaraan ibadah haji sejak masih di tanah air, berangkat ke Arab Saudi, selama berada di sana, sampai dengan kembali ke tanah air tidak pernah luput dari perhatian masyarakat secara luas. Hal ini sekaligus menjadi cambuk bagi Kementerian Agama yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan ibadah tersebut.

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji [PPIH] di mana petugas haji merupakan salah satu komponen utama, menjadi kunci keberhasilan haji tiap tahunnya. Tulusnya niat dan kebersihan hati menjadi suksesnya sebuah pelayanan yang diberikan kepada tamu Allah selama di Tanah Suci.

Selain ketulusan niat dan kebersihan hati, seorang petugas haji, memerlukan ilmu pengetahuan dari perspektif tasawuf dan sufistik di samping materi lainnya tentang perhajian dan tugas sebagai petugas haji Indonesia.

Dalam rangka itulah, Kementerian Agama menggelar pembekalan petugas secara nasional sebagai persiapan tindak lanjut setelah mereka terpilih dari proses yang ketat dari mulai Kabupaten/Kota sampai dengan seleksi nasional di Provinsi seluruh Indonesia.

Yang harus digarisbawahi dari petugas haji adalah komitmen melayani jemaah. Sama sekali tidak dibenarkan, seorang petugas justru asyik dengan dirinya sendiri, beribadah

selama berada di tanah suci, dan melalaikan tugas utamanya, membantu dan melayani jemaah haji sesuai dengan kewajiban yang diemban.


Untuk menghindari kelalaian, kealpaan dari tanggung jawab sebagai petugas, di sesi akhir pembekalan petugas, para petugas membacakan komitmen dan ikrar sebagai berikut: Kami calon petugas haji Arab Saudi tahun 2019 berkomitmen :

1. Melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jemaah haji Indonesia.
2. Menjadikan integritas, profesionalitas, inovasi, tanggungjawab dan keteladanan sebagai sikap utama selama menjalankan tugas di Arab Saudi.
3. Bertekad meningkatkan indeks kepuasan seluruh layanan bagi Jemaah haji Indonesia, musim haji tahun ini.

Nilai tambah dari petugas haji yang ikhlas melayani dan membantu jemaah ada pada kerelaan dan keseriusan mereka menjadi pelayan tamu Allah. Ibn Atha'illah al-Sakandari dalam *al-Hikam* memberi nasihat sebagai berikut:

إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها ان قل عملك،
فانه ما فتح اليك الا وهو يريد ان يتعرف اليك

*idzā fataha laka wijhatan min al-ta'arrufi fa-lā tubālī
ma'ahā an qalla 'amaluka, fa-innahū mā fataha
ilaika illā wa-huwa yurīdu an-yata'arrafa ilaika*
[Ketika Allah telah membukakan satu dimensi



kema'rifatan kepadamu, jangan lagi kamu pedulikan sedikit atau banyak amal perbuatanmu. Hal ini dikarenakan Allah tidak membukakan pintu kema'rifatan kepada kamu kecuali memang Allah telah menghendaknya].

Terbukanya pintu *ma'rifatullah* dalam konsepsi tasawuf, menurut *al-Hikam* di atas, tidak semata-mata ditentukan oleh berapa banyak amal perbuatan dari seorang hamba. Sebaliknya, hal tersebut merupakan hak prerogatif Allah untuk memberikan anugerah kepada hambanya yang dikehendaki. Dalam keterangan lain dijelaskan bahwa dimensi kema'rifatan yang model anugerah seperti dijelaskan dalam *al-Hikam* tersebut erat kaitannya dengan keikhlasan dan ketulusan seorang hamba dalam ikhtiar mencari ridla Allah.

Banyak kisah sufi yang inspiratif, seorang salik mendapatkan pintu kema'rifatan melalui peristiwa-peristiwa sederhana, tidak melalui riyadlah bertahun-tahun. Ada yang mendapatkan pintu *ma'rifat* hanya karena keikhlasannya melayani guru mursyid tanpa pamrih. Kisah Syeikh Anom Sidakarsa, misalnya, terbukakan pintu *ma'rifat* kepada beliau karena ikhlas dan ridlo melayani guru, bahkan tidak mau terpisah barang sekejap-pun dari figur guru yang beliau ikuti dan taati. Masih banyak kisah-kisah serupa yang bisa ditemukan dalam literatur-literatur sufi.

Menurut penulis, ibadah haji adalah ibadah paripurna. Para jemaah adalah tamu Allah, pangkat yang sangat luar biasa disematkan kepada jemaah haji. Kemuliaan mereka sebagai


tamu Allah juga akan tertularkan kepada para pelayannya, yakni para petugas haji. Oleh karenanya tidak cukup hanya dengan bekal pengetahuan, akan tetapi yang lebih penting adalah komitmen dan kesungguhan untuk melayani para tamu Allah tersebut.

Jika sudah diniati sebagai pelayan tamu Allah, maka tidak ada kata berat atau “gengsi” ketika harus terus ringan tangan membantu jemaah yang mungkin sedang kebingungan mencari jalan kembali ke pemondokan, membantu jemaah yang lagi sakit, menerima keluhan jemaah yang mungkin tidak puas dengan layanan pemerintah dan lain sebagainya.

Untuk itu, sudah selayaknya para petugas membekali diri dengan sentuhan sufistik seperti diulas dalam *al-Hikam* tersebut di atas. Adalah keliru besar, petugas haji dimaknai sebagai sarana haji gratis bahkan mendapatkan honor tambahan dari pemerintah.

Paradigma seperti ini seandainya masih ada di benak para petugas, adalah pikiran yang sangat merugikan, karena berdampak terhadap komitmen dan keseriusan melayani dan membantu jemaah haji, sekaligus juga kemuliaan tambahan sebagai pelayan para tamu Allah.

Sesuatu yang mulia, lazimnya banyak godaan. Ujian kesabaran, ketelatenan dan berbagai ujian lainnya biasanya menghampiri para petugas. Oleh karena itu, sebelum berangkat menunaikan tugas, bersihkan hati, kuatkan tekad, luruskan niat untuk semata-mata beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah melalui statusnya sebagai petugas haji. Jauhkan pikiran



dari kalimat haji gratis dan mendapatkan tambahan honor dari pemerintah, karena akan sangat merusak kesucian niat bertugas itu sendiri dan merugikan para jemaah haji sebagai tamu-tamu Allah yang harusnya dilayani.


Jika para petugas haji mampu istiqamah dengan niat yang tulus tersebut dan memegang dimensi-dimensi sufistik dalam menjalankan tugasnya, bisa dipastikan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia melalui Kementerian Agama sebagai penanggungjawab utama akan semakin sukses di masa-masa mendatang.

Pendukung dan Pencela

Hidup seseorang, siapapun itu, tidak bisa dielakkan berada antara *lovers* dan *haters* [para pendukung dan pencela]. Ketika era medsos belum ada, keberadaan *lovers* dan *haters* tentu tidak banyak diketahui, karena memuji dan membenci biasanya tidak langsung diucapkan di depan orang yang dipuji maupun dibenci. Sebaliknya, kini, kala jagat media sosial telah mewarnai hampir semua sendi kehidupan, *lovers* dan *haters* dengan mudahnya diketahui, akibat jejak digital mereka. Dengan situasi yang seperti ini, semestinya orang-orang yang hidup di zaman sekarang tidak mengalami keterkejutan kultural apalagi gagap dan mudah galau.

Kehidupan berbangsa dan bernegara juga tidak lepas dari dua kelompok tersebut. Jagat media sosial bagi yang pro dipenuhi dengan pujian dan apresiasi, sebaliknya bagi yang kontra juga tidak kalah sengitnya dengan kritik dan hujatan. Tak pelak, Kementerian Agama sebagai pelayan bidang keagamaan dan pendidikan bagi masyarakat Indonesia juga bukan pengecualian.

Di mata kebanyakan, ASN Kemenag diasumsikan orang-orang yang tahu tentang agama sehingga dianggap memiliki tanggung jawab dan integritas yang lebih dibandingkan ASN Kementerian/Lembaga lainnya. Sedikit saja kesalahan atau kasus yang terjadi di Kementerian ini, publik akan meng-*kuya-kuya* di media sosial seolah tanpa henti. Oleh karenanya, sebagai orang yang hidup, mengabdikan dan mendapatkan penghidupan melalui Kementerian Agama, sudah sepatutnya para ASN



menjaga dengan sangat hati-hati jangan sampai berbuat yang tidak dibenarkan.

Dalam perjalanannya, Kementerian Agama sudah berbenah secara luar biasa dari tahun ke tahun. Capaian-capaian kinerja sesuai dengan tanggung jawab program yang diemban juga meningkat setiap tahun. Indeks reformasi birokrasi meningkat, predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian [WTP] tiga kali berturut-turut, pelayanan publik semakin membaik, penyelenggaraan ibadah haji yang juga terus membaik seiring terus meningkatnya Indeks Kepuasan Publik, demikian pula Indeks Kerukunan Umat Beragama yang tetap relatif tinggi. Semuanya merupakan hasil kerja keras ASN Kementerian Agama dari pusat sampai daerah.

Kekurangan yang masih dirasakan adalah kurangnya komunikasi publik atas capaian-capaian tersebut. Meski Kemenag memiliki Biro Humas Data dan Informasi, juga memiliki kanal resmi baik pusat maupun daerah, serta SDM pranata Humas yang cukup memadai, agaknya amplifikasi terhadap apa yang telah ditoreh oleh Kemenag dengungannya kurang nyaring.

Yang terjadi justru sebaliknya, kasus-kasus di beberapa daerah yang lebih disebabkan kurang intensifnya komunikasi dan kerja sama antar umat beragama, lebih muncul ke permukaan. Dalam ilmu komunikasi, sesuatu dianggap sebagai *news* [bahasa Inggris] ketika memang *mak nyus* [enak, lezat, layak konsumsi dalam bahasa Jawa]. Asalnya mungkin sesuatu yang biasa, tetapi karena dikemas, maka bisa menjadi *mak nyus*. Pemberitaan akan


cepat teramplifikasi jika memenuhi kaedah *mak nyus* tadi.

Era media sosial, di mana tidak ada satu kekuatan-pun yang mampu menghalangi, acapkali banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab untuk mengambil keuntungan. Sebagai misal, dalam penyelenggaraan ibadah haji, SOP untuk katering telah diberlakukan secara ketat, baik oleh PPIH sebagai *user*, maupun pihak mu'assasah Arab Saudi sebagai penanggungjawab.

Ketika ada pemeriksaan makanan oleh tim katering, lalu ada mungkin yang terlewat *sampling*-nya, atau karena satu dan lain hal, makanan tersebut kurang *fresh*, tiba-tiba ada yang menvideo-kan dan mengunggah-nya di media sosial, dampaknya sudah bisa dibayangkan. Satu orang yang meng-*upload*, seolah makanan untuk 214 ribu jemaah haji kurang *fresh*, padahal faktanya sama sekali tidak demikian.

Tantangan diseminasi informasi publik yang demikian hendaknya membuat Kemenag sadar, bahwa diperlukan kreativitas dan strategi-strategi baru untuk komunikasi publik. Pada ranah ini ada dua gerak ganda yang mesti dilakukan, **pertama** melibatkan *influencer*, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda lintas agama, para dosen, guru yang berpengaruh, mahasiswa-mahasiswi berprestasi di PTKN yang bisa dijadikan sebagai *influencer* di kanal-kanal media sosial, serta **kedua**, kemampuan Kemenag sendiri untuk menciptakan kebijakan dan program populis terkait tugas dan fungsi yang diemban.

Ditjen Bimbingan Masyarakat, merupakan unit yang sangat



strategis membangun kemitraan dengan para *influencer* tadi. Tentu hal ini memerlukan kreativitas ekstra para pimpinan di masing-masing Ditjen Bimas agar apapun yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui fungsi layanan umat beragama, masyarakat terinformasi dengan baik karena peran para *influencer* tersebut. Para pimpinan di Ditjen Bimas dituntut untuk lebih kreatif, tidak hanya kerja rutin dengan sekian banyak kegiatan di berbagai daerah sebagaimana kebiasaan-kebiasaan di masa yang sudah.

Langkah lain yang bisa dilakukan adalah menggerakkan secara masif dari pusat sampai dengan daerah untuk memproduksi konten-konten yang menyejukkan di media-media sosial. Kementerian Agama memiliki ASN tidak kurang dari 236 ribu di seluruh Indonesia, belum lagi ditambah dengan para guru bukan PNS di Madrasah. Ini sejatinya adalah kekuatan yang sangat luar biasa apabila Kemenag mampu men-*drive* mereka sebagai juru bicara di media sosial yang mereka terlibat aktif di dalamnya.

Teoritis, sebagai instansi *vertikal*, mestinya Kemenag mampu mendorong para ASN dan keluarga besarnya baik di fungsi agama maupun pendidikan agama dan keagamaan untuk banyak menyuarakan hal-hal positif kepada masyarakat.

Tantangan komunikasi publik, di mana hidup selalu berada diantara dua kelompok, pemuji dan pencela, tidak boleh menjadikan ASN Kemenag apatis, normatif, dan hanya bekerja rutin. *Bully*, celaan dan cercaan adalah hal yang lumrah. Saking lumrahnya ada kisah Nabi Musa yang mengadu kepada Tuhan, karena tidak tahan dengan *bully-an*.

Kisah ini ditemukan dalam buku tulisan Abu Nu'aim al-Isfahani berjudul *Hilyat al-Auliya' wa-Tabaqat al-Ashfiya*, sebagai berikut:


وقال موسى احبس عنى كلام الناس، قال: لو فعلته لاحد لعلته بى

wa-qāla mūsā ihbis 'annī kalāma n-nās, qāla law fa'altuhu li-ahadin la-fa'altuhu bī
[Musa berkata kepada Tuhan, wahai Tuhan hentikanlah bully-an orang-orang kepadaku. Tuhan merespon: jika Aku hentikan bully-an orang kepada orang, akan Aku hentikan dulu bully-an orang terhadap-Ku].

Dalam kisah tersebut, sebagai Nabi dan utusan Allah, Nabi Musa tidak tahan terhadap hardikan, celaan, hujatan dari kaum Fir'aun, lalu mengadu kepada Tuhan. Respon Tuhan justru di luar dugaan Nabi Musa sendiri. Jika perkara *bully* seseorang kepada orang lain mau dihentikan, kata Tuhan, justru orang-orang yang mem-*bully* Tuhan yang akan diberhentikan terlebih dahulu.

Pesan dari kisah tersebut, Tuhan saja tidak marah dengan *bully-an* hamba dan makhluk yang Dia ciptakan sendiri, Nabi juga disindir agar tidak galau dengan *bully-an*, apalagi kita manusia biasa yang tidak punya pangkat apa-apa. Oleh karenanya, keliru besar, kalau kita sebagai ASN Kemenag, atau kebetulan pejabat Kemenag lalu sakit hati gara-gara *bully*.

Sikap yang harus dikedepankan menghadapi *bully* adalah



melakukan introspeksi, apa yang kurang dari kita, sehingga kita akan terus dan terus berbenah untuk masa depan yang lebih baik.

Dedikasi Petugas Haji di Tanah Suci


Suksesnya penyelenggaraan haji Indonesia di setiap musim tidak lepas dari peran dan dedikasi yang luar biasa dari petugas haji. Menjadi petugas haji tidaklah mudah. Sebanyak 214 ribu orang jemaah reguler yang harus dilayani, dimobilisasi pergerakannya, hingga ikut menjaga kesehatannya. Bagi petugas haji, mengemban dan menjaga amanah selama lebih kurang 78 hari harus dijalankan penuh semangat, meski banyak kesulitan menghadang.

Tim Panitia Penyelenggara Ibadah Haji [PPIH] Arab Saudi adalah petugas resmi yang melayani jemaah haji Indonesia. Unsur yang terlibat di dalamnya adalah petugas dari Kementerian Agama [yang inti], Kementerian Kesehatan, TNI/Polri, dan institusi serta lembaga lainnya.

Total petugas non kuota yang berada di Saudi adalah 826 orang. Selain itu, ada juga tenaga musiman di Arab Saudi dan mahasiswa Indonesia yang direkrut dari 9 negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Ditambah para petugas kloter, maka total petugas haji tiap tahunnya ada sekitar 3.725 orang.

Perbandingan 214 ribu jemaah dengan petugas 3.725 orang jelas tidak seimbang. Padahal tugasnya cukup berat, mulai dari pendampingan bimbingan ibadah, memberikan bantuan kesehatan, sampai menyiapkan makanan dan layanan transportasi.

Para petugas itu terbagi di tiga Daerah Kerja, yakni Mekkah, Madinah dan Bandara Jeddah-Madinah. Semua perwakilan



Daker memiliki kantor sendiri dan struktur organisasi yang hampir sama. Ada kepala Daker, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, sampai kepala sektor. Di sektor, ada struktur organisasi lagi yang sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Khusus Daker Bandara Jeddah-Madinah, strukturnya lebih kecil karena tidak sampai mengurus pemondokan per sektor.

Petugas di semua Daker bekerja penuh hati, tidak ada hari libur. Setiap hari adalah hari kerja. Di awal kedatangan, para petugas biasanya memastikan semua persiapan untuk menyambut jemaah beres.

Ada yang sibuk di bandara mendirikan posko, lalu di pemondokan menyiapkan kamar dan fasilitas jemaah, di seksi katering memantau persiapan perusahaan katering sampai tes makanan, persiapan kesehatan seperti menyiapkan obat-obatan dan ruang perawatan, serta di transportasi memastikan kesiapan bus, tim perlindungan jemaah orientasi lokasi dan simulasi gangguan keamanan.

Saat jemaah datang, para petugas itu lebih sibuk lagi. Tim transportasi bekerja siang malam di halte untuk memastikan kelancaran bus shalawat, tim katering bergerak setiap hari untuk menjaga kualitas dan kuantitas makanan, tim pemondokan mengawasi pelayanan hotel pada jemaah, tim pengawas ibadah haji khusus juga sibuk menerima aduan pelayanan, sampai tim perlindungan jemaah yang bolak-balik mengurus masalah dan kasus jemaah.

Tak lupa, ada tim pelayanan kedatangan dan kepulangan


serta tim dari Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang wajib melaporkan data pergerakan jemaah secara *update* dan jumlah jemaah yang meninggal.

Pekerjaan jadi lebih menantang ketika puncak haji tiba. Saat periode Arafah-Muzdalifah-Mina (Armina), para petugas terkonsentrasi di Mekkah. Tim dari Daker Madinah bekerja untuk melayani jemaah di Mina, tim Daker Mekkah bekerja untuk melayani jemaah di Muzdalifah, sementara tim Daker Bandara Jeddah-Madinah terpusat di Arafah.

Tugas mereka serupa tapi tak sama, tim catering di daker masing-masing memantau pelayanan catering di Armina, tim pemondokan memastikan pelayanan tenda dan karpet serta fasilitas lainnya, tim perlindungan jemaah membantu keamanan, tim transportasi sibuk mengurus angkutan dari pemondokan ke Armina dan sebaliknya, tim kesehatan bahkan super sibuk mengurus jemaah sakit hingga yang meninggal dunia. Sebagian besar petugas tidak berhaji dan fokus menjalankan fungsinya masing-masing.

Setelah Armina, pekerjaan belum selesai. Tim masing-masing Daker kembali lagi ke tugas awal di daerahnya. Jemaah ada yang masih harus bergerak ke Madinah, sebagian lagi pulang lewat bandara Jeddah. Setelah itu, tim daker bandara bergeser ke Madinah untuk mengurus kepulangan jemaah via bandara Madinah. Artinya, tim terus bergerak sejak awal sampai akhir masa kepulangan.

Kerja keras juga dilakukan oleh tim mukimin dan tenaga mahasiswa, serta tenaga pendukung lainnya di setiap daker.



Peran mereka sangat besar dalam urusan komunikasi dengan pihak Saudi, dari urusan lobi sampai evakuasi jemaah.

Para pengemudi yang tahu jalanan Kota Makkah, Madinah serta Jeddah sangat efektif membantu urusan pekerjaan agar bisa diselesaikan dengan cepat. Mereka juga mengikuti ritme petugas lain yang bekerja siang-malam tanpa lelah. Terlebih di siang hari yang terik matahari terkadang sampai 47 derajat Celcius. Di bawah terik matahari ini, terlihat perjuangan dan dedikasi yang luar biasa bagi para petugas di terminal sekitar masjidil haram.

Jemaah haji Indonesia sebanyak 214 ribu yang sudah berada di Saudi Arabia semuanya harus dipastikan dapat terlayani dengan kesediaan transportasi yang ada. Hampir di setiap sudut Masjidil haram ada rombongan jemaah asal Indonesia.

Melaksanakan tugas tak kenal lelah di semua lini fungsi masing-masing, sangat diharapkan keikhlasan dari para petugas tersebut. Keikhlasan itulah yang insya Allah akan menjadi nilai tambah dari dedikasi yang sudah mereka berikan. Tetaplah semangat, karena yang mereka layani adalah tamu-tamu Allah. Logika keagamaan, ketika jemaah berstatus sebagai tamu Allah, maka mereka memiliki kemuliaan di sisi Allah. Kemuliaan tersebut insya Allah juga akan merembet kepada para pelayan tamunya, yakni para petugas.

Kementerian Agama sebagai penanggungjawab PPIH di Arab Saudi harus peka terhadap kritik, masukan dan saran dari para petugas haji, demikian pula dari masyarakat. Tidak dipungkiri, bahwa upaya Kemenag untuk memperbaiki layanan

haji dari tahun ke tahun sudah luar biasa hasilnya. Akan tetapi, keterbukaan untuk menerima kritik tetap harus dibudayakan. Hal ini seiring dengan nasihat dari Ibn Atha'illah al-Sakandari dalam *al-Hikam* sebagai berikut:

متى المك عدم اقبال الناس اليك او توجههم بالذم اليك فارجع
الى علم الله فيك

*matā ālamaka 'adamu iqbāli l-nāsi ilaika aw
tawajjuhuhum bi dz-dzammī ilaika farjī' ilā 'ilmi
llāhi fīka*

*[tatkala berpalingnya orang darimu menyakitkanmu,
atau mereka menghadap kamu dengan sumpah
serapah dan celaan terhadapmu, maka kembali-
lah kepada ilmu Allah yang ada dalam dirimu
(lakukanlah introspeksi)].*

Muhasabah, introspeksi, menemu-kenali kekurangan diri adalah sikap terpuji yang perlu dibiasakan. Tidak ada gading yang tak retak. Sebaik apapun upaya yang sudah dilakukan, pastilah masih ada celah untuk pembenahan berikutnya. Dan, bagi para petugas haji, apresiasi yang tinggi untuk dedikasi dan pengabdianya, mudah-mudahan menjadi amal jariyah semuanya, aamiin.

Ladang Ibadah di Terminal Syib Amir

Terminal Syib Amir berada di sekitar masjidil haram. Aktivitas di terminal ini dapat dibilang super sibuk. Pada siang hari dimana matahari diatas ubun-ubun dengan panas luar biasa tidak sedikit jemaah haji yang akan menunaikan ibadah salat di masjidil haram, yang menyebabkan terminal tersebut penuh sesak dengan para jemaah.

Meski di sekitar masjidil haram ada tiga terminal yang menjadi titik kedatangan dan kepulangan jemaah, yakni Syib Amir, Bab Ali dan Jiyad, namun karena Syib Amir yang cukup luas lahannya dibanding dengan yang lain, membuat terminal ini selalu penuh sesak menjelang dan setelah waktu salat wajib.

Terminal Syib Amir merupakan terminal paling banyak disinggahi oleh bus salawat [bus yang menghubungkan terminal-terminal sektor hotel jemaah dengan terminal sekeliling masjidil haram]. Dari 9 rute bus salawat, sebagian besar melintasi Syib Amir. Dikarenakan senantiasa dalam kondisi padat, maka jemaah haji harus ekstra sabar antre masuk ke bus di terminal Syib Amir. Begitu pula kesabaran para petugas transportasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada para jemaah.


Kemenag menyediakan bus salawat selama 24 jam. Jemaah tidak perlu khawatir kehabisan bus salawat untuk pulang pergi menuju hotel. Di terminal Syib Amir banyak petugas Indonesia yang siap mengarahkan jemaah pulang sesuai dengan nomor busnya.

Untuk kelancaran dan kemudahan bagi petugas, jemaah haji juga diimbau untuk selalu membawa kartu bus salawat yang di dalamnya tertera nomor bus, nama terminal, dan tujuan pemondokan sehingga jemaah tak kesulitan saat terpisah dari rombongan.

Waktu-waktu antrean yang paling panjang di terminal Syib Amir setelah subuh, setelah isya dan juga setelah Jumatan di tiap hari Jumat. Setelah subuh jemaah haji biasanya pergi ke masjidil haram jauh sebelum subuh untuk berbagai macam ibadah, seperti salat tahajud, membaca al-Qur'an, dzikir, bahkan tawaf sunah dan lain sebagainya. Setelah salat subuh, mereka berbondong-bondong ingin segera kembali ke hotel untuk istirahat dan sarapan. Demikian pula setelah isya. Jemaah biasanya pergi ke masjid mulai asar atau banuak pula sehabis asar untuk bisa ikut salat berjamaah magrib dan isya di masjidil haram.

Sehingga ketika usai salat isya, mereka segera dan berbondong-bondong kembali ke pemondokan untuk makan malam dan istirahat, agar sepertiga malam berikutnya mereka bisa kembali ke masjidil haram. Hal yang sama terjadi setelah salat Jumat. Para jemaah berangkat ke masjidil haram sejak mulai jam 9.30 an pagi untuk bisa salat sunah dan ibadah-ibadah lainnya sambil menunggu salat Jumat berjamaah. Karena cukup lama berada di masjid, setelah salat Jumat, mereka berbondong-bondong ingin segera bisa sampai kembali ke penginapannya untuk istirahat.

Karena kepadatan yang seperti itu, seringkali Panitia



Penyelenggara Ibadah Haji [PPIH] melalui petugas-petugas transportasi mendapatkan banyak keluhan mengenai antrean panjang jemaah haji dalam menunggu bus salawat. Di sinilah letak krusialnya, di mana para petugas dan juga PPIH harus memiliki kesabaran ekstra. Padahal, demi melayani jemaah, para petugas, khususnya di terminal Syib Amir, berjemur di tengah teriknya panas Saudi yang mencapai rata-rata 40-47 derajat Celcius, mengatur antrean jemaah naik ke bus dan sebagainya.

Suasana yang panas, jika di siang hari, kerumunan jemaah yang begitu banyak, jika tidak bisa tertib dalam antrean acapkali memancing emosi petugas. Bahkan, potensi konflik antar petugas-pun cukup besar, terlebih apabila pola komunikasi dan koordinasi di lapangan berjalan kurang optimal. Untuk itu, disamping melatih kesabaran, ketulusan dan keikhlasan, para petugas juga perlu pintar-pintar menghibur diri.

Sebab, bertugas kurang lebih dua bulan dalam kondisi yang melelahkan, apalagi jauh dari keluarga, terkadang bisa membuat gangguan emosi dan pikiran. Dalam kaca mata tasawuf, tugas dalam medan yang berat ini memiliki nilai tambah tersendiri, karena membuka kesempatan lebih untuk merenung dan bertafakur. Tafakur akan nikmat yang diberikan Allah diberi kesempatan untuk melayani tamu Allah.

Abu Hasan al-Syādzili memberikan nasihat akan pentingnya rasa syukur, menurut beliau syukur atas segala nikmat yang


diterima dan ridla atas semua peristiwa yang dialami, menjadi pintu anugrah *ma'rifatullah*. Selengkapnya kalimat al-Syādzili sebagai berikut:

إذا أردت أن تنظر إلى الله ببصيرة الإيمان واليقان دائماً فكن
لنعم الله شاكراً وبقضاءه راضياً

*idzā aradta an tanzura ila allāhi bi-baṣīrati l-īmāni
wa-l-īqāni dā'iman fa-kun li-ni'ami-llāhi syākiran
wa-bi-qaḍā'ihī rāḍiyan*

*[Ketika kamu ingin mendapatkan anugerah
makrifatullah dengan baṣirah keimanan dan
keyakinan, jadilah orang yang senantiasa
mensyukuri apapun nikmat Allah dan
ridla atas semua peristiwa yang dialami]*

Menjadi petugas haji karena terpilih secara nasional secara terbuka, haruslah disyukuri dan ditafakuri dengan seksama. Rasa syukur yang mendalam sekaligus ridlo dengan tugas apapun yang diemban selama musim haji, menjadi pintu penting peningkatan kualitas kesalehan dari para petugas haji. Karena dedikasi bahkan diistilahkan dengan “ladang ibadah” di terminal super sibuk dan super panas, Syib Amir, salah satunya, secara umum, kinerja para pelayanan haji dari tahun ke tahun semakin membaik. Ini terlihat banyaknya apresiasi yang didapatkan Kementerian Agama dari berbagai pihak seperti pengakuan pengalaman jemaah haji, testimoni dari



tim pengawas seperti DPR, BPS dan pihak-pihak lain yang semuanya memberikan penilaian positif.

Kinerja petugas haji yang mendedikasikan semua tenaga dan pikirannya untuk pelayanan jemaah patut diapresiasi. Sudah saatnya Kementerian Agama memfikirkan penghargaan seperti apa yang layak diberikan kepada mereka para petugas haji, meskipun tidak juga bisa dipungkiri, masih tetap ada satu-dua kasus jemaah yang merasa tak puas.

Merespon hal ini, Kementerian Agama sebagai PPIH tidak arif kalau kemudian menyalahkan para petugas, justru sebaliknya kekurangpuasan satu dua jemaah mestinya disadari bahwa tidak ada satupun pihak yang bisa memuaskan semuanya. Dengan hasil yang baik, pelatihan dan pembekalan para petugas secara nasional di Asrama Pondok Gede, Jakarta, dianggap berhasil dan perlu ditingkatkan untuk para petugas yang terpilih untuk musim haji tahun-tahun berikutnya.

“

Dengan keseimbangan nalar dan moral, peserta didik akan menjadi orang yang proporsional di masa mendatang, apapun keahlian, profesi, maupun jalan hidup yang dilalui. Orang yang proporsional tidak akan lupa diri karena prestasi gemilang, karena disikapi dengan rasa syukur, juga tidak mudah tersungkur karena kegagalan yang dialami dalam hidupnya



Sekilas Tentang Penulis

Prof. Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan, M.A, lahir pada tanggal 10-11-1969 di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, putra pasangan K.H. Muslihudin (alm) dan Hj. Hany.

Pendidikan dasar ditempuh di Kota kelahiran dan didikan tradisi pesantren diperoleh dari orang tuanya. Pendidikan Menengahnya di Pesantren Tebu Ireng, Jombang, menamatkan Strata Satu di IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1993, Strata Dua di Rijksuniversitaet Leiden, Belanda tahun 1996, dan Strata Tiga di Orientalisches Seminar der Rheinischen Friedrich-Wilhems-Universitaet Bonn, Jerman tahun 2003.

Karir akademiknya dirintis di almamaternya sampai menjadi Guru besar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pengalaman di bidang akademik diwujudkan dalam keanggotaan di asosiasi ilmuwan dan publikasi ilmiah baik artikel di jurnal nasional maupun internasional serta buku.

Hingga kini, penulis merupakan anggota di Asosiasi Keilmuan dan Profesi, *Deutsche Morgenlaendische Gesellschaft, Jerman, Netherlands Institute for Advanced Study in The Humanities and Social Sciences (NIAS), Belanda.*

Publikasinya tercatat dalam empat bahasa, yakni, i) Jerman, seperti: *Die Literarische Koraninterpretation; Eine Analyse ihrer Fruehen Elemente und Ihrer Entwicklung*

(2003); *Intellektuelle sollten den religioesen Aspekte des Islam ueberdenken* (2007); *Zum Umgang mit dem Anderen; Nahdlatul Ulamas Beitrag fuer das religioese Leben in Indonesien* (2008); ii) Inggris, seperti: *Islamic Religious Education: Indonesian Experience* (2013); *Interfaith Dialogue and Cooperation: Indonesian Perspective* (2012); *Anti Semitism in Indonesia; A Simplification of a Multi-Faced Islam* (2008), iii) Arab, seperti: *al-Tafsir Katashawwurin li-l-Qur'an; fi Ittijah Fahmi Kitab al-Muqaddas Hasba l-Siyaq al-Indunisiyi* (2008), dan iv) Bahasa Indonesia, seperti: *Menata Yang Terserak: Akademisi dalam Pusaran Birokrasi* (2015), *Pribumisasi al-Qur'an: Tafsir Berwawasan keIndonesiaan* (2012), *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen* (2010).

Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) dan lajnah Muwasholah Pengurus Pusat Jam'iyyah Ahli Tareqah al-Mu'tabarrah al-Nahdliyyah (JATMAN) ini pernah diamanahi beberapa jabatan strategis di Kemenag RI sebagai Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur KSKK Madrasah, Direktur Pendidikan Madrasah dan Kepala Pusat Litbang Kehidupan Keagamaan.

“

Wajar akan membuat seseorang tidak kagetan dan tidak gagap, proporsional membuat seseorang berfikir dan menyusun langkah-langkah strategis-antisipatif, sedangkan apa adanya membuat seseorang tidak mudah berharap terlalu banyak sekaligus tidak mudah untuk dikecewakan dengan kenyataan yang harus dihadapi



“

متى آلمك عدم إقبال الناس إليك أو توجههم
بالذم اليك فارجع إلى علم الله فيك
(الحكم لإبن عطاء الله السكندري)

Ketika berpalingnya orang darimu menyakitkanmu atau mereka menghadapmu dengan cacian dan sumpah serapah, kembalilah kepada ilmu Allah dalam dirimu [lakukanlah introspeksi apa yang salah dengan dirimu] (*al-Hikam*, ibn Atha'illah al-Sakandari)

BAHAN BACAAN

Al-Bantani, Nawawi. *Mirqatu Suudi T-Tasdiq : Syarh Sullam At- Taufiq*

_____ .*Murah Labid Tafsir al-Nawawi.*

Al-Isfahani, Abu Nu'aim. *Hilyatu l-Auliyā wa Tabaqatu l-Aṣfiyā.*

Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*, Marja. Bandung. (2011).

Al-Suyuti, Jalaluddin. *al-Asybah wa l-Nazair fi l- Furu'*, Cairo, Dar Al-Kutub al-Misriyah.(1986).

An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi. *Shahih Muslim.*

Ibn Abdullah Asy-Syaukani Ash-Shan'ani Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad. *Fath al-Qadīr.*

Ibn Abi Thalib, Ali. *Nahj Al-Balaghah.*

Ibn Abu Amir Al-Ashbahi, Abu Abdullah Malik ibn Anas Ibn Malik. *Al-Muwatta.*

Ibn Atha'illah As-Sakandari, Syekh Ahmad ibn Muhammad. *Al-Hikam.*

Ibn Ibad, Ahmad ibn Muhammad. *Al-Mafakhir al-'Aliyah fi-l Ma'at sir al-Syadziliyah.* Cairo : Dar al-'Arabiyya al-Kubra.

Ibn Malik ath-Tha'i al-Jayyani, Muhammad Ibn Abdullah. *Alfiyah Ibn Malik.*